

Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur

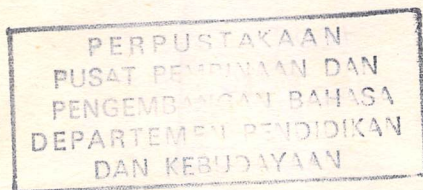
18

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Bppp

**Kedudukan dan Fungsi
Bahasa Indonesia
di Jawa Timur**

Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur



Sujanto
Soedjito, Abd. Rachman H.A.
Srie Soedarman, M. Hadi Sudiran



Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1979

Redaksi
S. Effendi (Ketua)
B.H. Hoed, Farid Hadi,
Dendy Sugono

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
No: Klasifikasi PB 499.21 8 SUJ h	No. Induk : 1009 Tgl. : 13-8-86 Ttd. :

Seri Bb 7

Naskah buku ini semula merupakan hasil Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Jawa Timur, 1976/1977, diedit dan diterbitkan dengan dana Proyek Penelitian Pusat.

Staf Inti Proyek Pusat : S. Effendi (Pemimpin), Zulkarnain (Bendaharawan), Farid Hadi (Sekretaris), Lukman Ali, Yayah B. Lumintintang, Basuki Suhardi, Koentamadi, Sri Sukesri Adiwimarta, Dendy Sugono (Para Asisten), Dr. Amran Halim, dan Dr. Muljanto Sumardi (Konsultan).

Staf Inti Proyek Penelitian Jawa Timur : M.A. Icksan (Pemimpin), Taryono (Bendaharawan), I.L. Marsoedi (Sekretaris).

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah. Alamat penerbit: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jalan Diponegoro 82, Jakarta Pusat.

PRAKATA

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/1975 — 1978/79) telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah termasuk sastranya tercapai, yakni berkembangnya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan berbagai kamus istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan pedoman pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media massa, (3) penterjemahan karya kesusastaan daerah yang utama, kesusastaan dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, (4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian, inventarisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan informasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah penghargaan.

Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan tersebut, dibentuklah oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974 dengan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mengingat luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu digarap dan luasnya daerah penelitian yang perlu dijangkau, mulai tahun 1976 proyek ini ditunjang oleh 10 proyek yang berlokasi di 10 propinsi, yaitu (1) Daerah Istimewa Aceh yang dikelola oleh Universitas Syiah Kuala, (2) Sumatra Barat yang dikelola oleh IKIP Padang, (3) Sumatra Selatan yang dikelola oleh Universitas Sriwijaya, (4) Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat, (5) Sulawesi Selatan yang dikelola oleh IKIP dan Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang, (6) Sulawesi Utara yang dikelola oleh Universitas Sam Ratulangi, (7) Bali yang dikelola oleh Universitas Udayana, (8) Jawa Barat yang dikelola oleh IKIP Bandung, (9) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, dan (10) Jawa Timur yang dikelola oleh IKIP Malang. Program kegiatan kesepuluh proyek di daerah ini merupakan bagian dari program kegiatan Proyek Penelitian Pusat di Jakarta yang disusun berdasarkan rencana induk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan program proyek-proyek daerah dilakukan terutama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan berdasarkan pengarahannya dan koordinasi dari Proyek Penelitian Pusat.'

Setelah lima tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan lebih dari 250 naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra dan lebih dari 30 naskah kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setelah tiga tahun bekerja, kesepuluh proyek di daerah menghasilkan 135 naskah laporan penelitian tentang berbagai aspek bahasa dan sastra daerah. Ratusan naskah ini tentulah tidak akan bermanfaat apabila hanya disimpan di gudang, tidak diterbitkan dan disebarkan di kalangan masyarakat luas.

Buku *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur* ini semula merupakan naskah laporan penelitian yang disusun oleh tim dari Fakultas Keguruan Sastra dan Seni IKIP Malang dalam rangka kerja sama dengan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Jawa Timur 1976/1977. Sesudah ditelaah dan diedit seperlunya di Jakarta, naskah tersebut diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan dana Proyek Penelitian Pusat dalam usaha

penyebarluasan hasil penelitian di kalangan penelitian bahasa, peminat bahasa, dan masyarakat pada umumnya.

Akhirnya, kepada Drs. S. Effendi, Pemimpin Proyek Penelitian Pusat, beserta staf, Drs. M.A. Icksan, Pemimpin Proyek Penelitian Jawa Timur, beserta staf, tim peneliti, redaksi, dan semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia.

Jakarta, Maret 1979

Prof. Dr. Amran Halim
Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, penelitian "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur dapat terselesaikan dengan selamat.

Penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Drs. Sujanto, dengan anggota Drs. Soedjito, Drs. Abd. Rachman, Srie Sudarman B.A. dan M. Hadi Sudiran, B.A.

Laporan penelitian ini menyajikan gambaran tentang frekuensi pemakaian bahasa Indonesia dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur. Gambaran ini merupakan hasil kegiatan pengolahan data yang pada dasarnya dilakukan menurut prinsip-prinsip pendekatan sosiolinguistik dengan memperhatikan variabel-variabel yang relevan dengan *domain* pemerintahan terutama masalah alih kode. Walaupun demikian, disadari bahwa prinsip-prinsip tersebut belum seluruhnya diterapkan. Namun, dengan potensi yang ada telah diusahakan secara maksimal sehingga boleh dikatakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dipandang cukup memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

- 1) Pimpinan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah - Jawa Timur yang telah memberi kepercayaan dan dana;
- 2) Dr. Zaini Machmoed dan Drs. I.L. Marsoedi sebagai konsultan.
- 3) Rektor IKIP Malang, Dekan FKSS beserta staf, dan Pimpinan Departemen Bahasa dan Sastra FKSS IKIP Malang yang telah memberikan izin kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- 4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Walikota dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, Gresik, Jember, dan Madiun, Camat Tambaksari, dan Wonocolo di Surabaya, Camat Kedamean di Gresik, Camat Kaliwates dan Mayang di Jember, Camat

Kota Madiun dan Jiwan di Madiun, Kepala Desa Tambaksari dan Gayungan di Surabaya, Kepala Desa Ngepung di Gresik, Kepala Desa Jember Kidul, Mangli, dan Mayang di Jember, Kepala Desa Kartoharjo, Patihan, dan Metesih di Madiun yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang sangat memuaskan dalam pelaksanaan penelitian. Demikian pula kepada para responden di sembilan desa tersebut di atas yang telah melayani peneliti dengan sebaik-baiknya;

5) Sdr. Sidik, Sdr. Soewarno, dan Sdr. Soenoto, karyawan IKIP Malang, yang telah ikut serta membantu menyelesaikan penelitian; dan semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini.

Akhirnya, diharapkan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan bahasa.

Malang, Maret 1977

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

<i>Prakata</i>	v
<i>Kata Pengantar</i>	ix
<i>Daftar isi</i>	xi
<i>Daftar Singkatan</i>	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Asumsi	5
1.5. Hipotesis	5
1.6. Pembahasan Masalah yang Diteliti	6
1.7. Istilah yang Dipergunakan	7
2. Tujuan Kepustakaan	10
2.1. Penelitian Sebelumnya	10
2.2. Kerangka Teori	11
3. Metode Pendekatan dan Prosedur yang Ditempuh	19
3.1. Metode Penelitian	19
3.2. Populasi	19
3.3. Sampel	19
3.4. Data	26
3.5. Penyimpulan Data	27
4. Pengolahan Data	34
4.1. Penjarangan Data	34
4.2. Pengolahan Data	35
4.3. Analisis Data	36

5.	Hasil Penelitian	69
5.1.	Hasil Kuantitatif	69
5.2.	Hasil Kualitatif	85
6.	Penutup	93
6.1.	Rangkuman Hasil Penelitian	93
6.2.	Masalah yang Masih Belum Digarap	96
	<i>Daftar Pustaka</i>	
	<i>Lampiran</i>	99

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan yang dipakai dalam buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

BD	bahasa daerah
BI	bahasa Indonesia
BI + BJ	campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa
BI + BM	campuran bahasa Indonesia dan bahasa Madura
BJ	bahasa Jawa
BI + BJ + BM	campuran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Madura
BM	bahasa Madura
X	bergantung kepada yang diajak bicara, artinya jika yang diajak bicara orang Jawa mempergunakan bahasa Jawa, jika orang Madura mempergunakan bahasa Madura.
TB	tidak berlaku, artinya apa yang ditanyakan dalam daftar pertanyaan tidak dapat dijawab, karena tidak pernah melaksanakan apa yang ditanyakan.
O1	orang pertama (pembicara)
O2	orang kedua (pendengar)
PFDP	pemimpin formal desa
P	penduduk biasa
N	jumlah responden
n	jumlah lebih dari dua
f	frekuensi
TFPB	tabel frekuensi pemakaian bahasa
TPP	tabel perbandingan persentase (pemakaian bahasa)
TS	tidak sekolah
SD -	sekolah dasar tidak tamat

SD +	sekolah dasar tamat
SLP	sekolah lanjutan (tingkat) pertama
SLA	sekolah lanjutan (tingkat) atas
PT	perguruan tinggi
S/J/M	Surabaya/Jember/Madiun
Ub/Rb/Rr	<i>urban/rurban/rural</i>
RK/RW	rukun kampung/rukun warga
RT	rukun tetangga
Pemdes	pemerintah desa
LSD	lembaga sosial desa
Kab.	kabupaten
Kodya	kota madya
Kotad	kota administrasi
DP	daftar pertanyaan
P1	partisipan satu orang
P2	partisipan dua orang

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggapannya perlu dicakup oleh kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan adalah fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:173 – 174).

Secara historis, kedudukan bahasa Indonesia (BI) sebenarnya telah diperkokoh oleh dua macam faktor, yaitu (1) faktor aspirasi nasional dan (2) faktor konstitusional. Aspirasi nasional, yang perwujudannya berupa Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), telah mengakui dan mengangkat BI sebagai bahasa nasional. Secara konstitusional BI telah ditetapkan sebagai bahasa negara. Penetapan ini tertuang dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, BI mempunyai empat fungsi, yaitu sebagai: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial-budaya bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:174—175).

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, BI mempunyai empat fungsi pula, yaitu sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:174—175).

Secara umum dapat dianggap bahwa baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, BI telah berhasil menjalankan fungsinya. Bukti-bukti tentang itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar, yang di antaranya berupa "Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan, serta surat-menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ditulis dalam BI. Pidato-pidato terutama pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan di dalam BI" (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:26).

Meskipun demikian mengingat sifat keanekaragaman masyarakat Indonesia, dapat diduga bahwa dalam interaksi verbal antara warga masyarakat, baik dalam situasi resmi, maupun situasi santai (tidak resmi), akan terjadi pemakaian dua bahasa atau lebih secara bersama-

sama atau secara bergantian. Dugaan ini dilandasi oleh pernyataan G. Sankoff yang berbunyi : "*The behaviour of multilinguals in communities where multilingualism is the norm ... communication regularly takes place in two or more codes ...*" (Pride dan Holmes, 1974:33).

Peristiwa pemakaian dua kode atau lebih (bahasa atau variasi bahasa yang berarti) secara bersama-sama atau bergantian itu dapat menyebabkan apa yang oleh Labov disebut *dialect mixture* (percampuran dialek) atau *code-switching* (alih-kode) (Ibid., 37).

Jika peristiwa percampuran-dialek atau alih-kode itu terjadi antara BI dan bahasa-bahasa daerah setempat (BD), tentu BI akan mengalami modifikasi struktur, dan bahkan mungkin akan kabur kedudukan dan fungsinya. "Kekaburan yang terdapat di dalam pembedaan fungsi dan kedudukan antara BI dan bahasa-bahasa lain, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam cara berfikir anak-anak kita" (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:20—21).

Berdasarkan hasil penelitian para sarjana IKIP Bandung tentang *Peranan Bahasa Sunda dalam Menjalankan Pemerintahan Desa di Jawa Barat* (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:115) kedudukan BI sebagai bahasa negara yang harus berfungsi sebagai alat komunikasi dalam menjalankan roda pemerintahan seolah-olah telah digantikan oleh bahasa Sunda. Kesimpulan dari hasil penelitian itu di antaranya berbunyi :

- "(1) Bahasa Sunda memegang peranan penting di dalam menjalankan pemerintahan desa di Jawa Barat, (...)
- (2) Peranan bahasa Sunda di dalam hal tersebut di atas, dewasa ini sukar kiranya untuk digantikan dengan bahasa lain, (...)
- (3) Pemakaian bahasa Sunda di dalam menjalankan pemerintahan desa ini di Jawa Barat ternyata efisien dan efektif, (...)"

Dari hasil penelitian itu terlihat bahwa bahasa Sunda di Jawa Barat telah "menggantikan" salah satu fungsi BI sebagai bahasa negara. Kasus seperti itu terlihat juga pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh para peserta Penataran Sociolinguistik yang diselenggarakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, terhadap sejumlah responden di desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor. Dari responden sebanyak 165 orang, yang mempergunakan BI dalam domain kedinasan terperinci sebagai berikut: berbicara dengan ketua RT = 1,21%, dengan Kepala Desa = 2%, dengan Camat = 8%, padahal yang mampu berbahasa Indonesia sebanyak 54% (Marsoedi, 1975:4).

Untuk mengetahui apakah gejala percampuran dialek pertumpang-tindihan fungsi antara BI dan BD seperti terjadi di Jawa Barat itu terjadi juga di Jawa Timur, perlu sekali dilaksanakan penelitian,

mengingat situasi kebahasaan di Jawa Timur pun tidak jauh berbeda dengan situasi kebahasaan di Jawa Barat.

Di Jawa Timur diduga bahwa BI akan mengalami pertumpangtindihan fungsi, di satu pihak dengan bahasa Jawa (BJ) dan di lain pihak dengan bahasa Madura (BM). Dugaan ini didasari oleh kenyataan bahwa bahasa pertama sebagian besar penduduk Jawa Timur adalah BJ dan BM.

Penelitian di Desa Bumiayu (desa jenis *rurban*), Kecamatan Kedungkandang, Daeran Tingkat II Kotamadya Malang Jawa Timur, tentang fungsi alih kode, menghasilkan kesimpulan sementara sebagai berikut: Dari responden Madura sebanyak lima puluh orang, yang mampu bahasa Indonesia secara aktif adalah 26%, yang mengerti secara pasif adalah 46% (jumlah kumulatif dengan yang aktif). Meskipun demikian, dalam domain kedinasan, frekuensi pemakaian jenis kode oleh pamong desa, berdasarkan jawaban responden terperinci sebagai berikut: BI = 12%, BJ = 42%, BM = 34%, BC = 12% (Marsoedi, 1976:35 — 38).

Dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa dalam masyarakat pedesaan, pemakaian BI secara lisan, khususnya dalam domain kedinasan, belum sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang diberikan kepadanya. Karena itu, agar pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan dalam bidang kebahasaan secara tepat, maka penelitian tentang situasi kebahasaan, khususnya tentang kedudukan dan fungsi BI di Jawa Timur, perlu segera dilaksanakan. Tetapi yang perlu diingat ialah bahwa apapun hasil obyektif penelitian ini, misalnya akan terdapat percampuran dialek atau pertumpangtindihan fungsi antara BI dan BJ atau BM, jangan sampai menimbulkan kebijaksanaan yang merugikan fungsi dan kedudukan BI.

Sesuai dengan Ch. A. Ferguson (1966:1) bahwa "*Once a language has been chosen for certain purposes in a country it may be necessary to take steps to assure its adequacy for these purposes. The questions to be answered generally refer to standardization and modernization*", maka hasil penelitian ini justru harus kita pergunakan sebagai data sumber informasi untuk menetapkan kebijaksanaan dalam bidang kebahasaan, yang antara lain berupa:

- (1) pengintensifan pembinaan dan pengembangan pengajaran BI di sekolah-sekolah;
- (2) pengintensifan penyuluhan pemakaian BI sampai ke desa-desa;
- (3) pengintensifan usaha pembakuan BI dalam segala aspeknya, baik aspek kebahasaannya maupun aspek distribusi geografisnya; dan

- (4) pengintensifan usaha pencendekiaan (intelektualisasi) dan pemodernan BI.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat merumuskan masalah yang hendak diteliti, diperlukan pembatasan ruang lingkup masalah. Mengingat sifat penelitian ini yang merupakan penelitian terapan, dan kurangnya sumber-sumber informasi serta hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian yang berjudul *Kedudukan dan Fungsi BI di Jawa Timur* ini dipusatkan pada penelitian terhadap *fungsi BI dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur*. Dengan demikian judul lengkap penelitian ini berbunyi *Kedudukan dan Fungsi BI di Jawa Timur : Sebuah Studi Deskriptif tentang Fungsi BI dalam Kedudukannya sebagai Bahasa Negara dalam Domain Pemerintahan Desa di Jawa Timur*.

Mengingat bahwa fungsi BI itu terlihat pada pemakaiannya, dan dalam *domain* pemerintahan desa yang seharusnya "wajib" berbicara dalam BI adalah *pemimpin formal desa* (PFD), maka penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- (1) Apakah para PFD di daerah Jawa Timur menggunakan BI dalam berbicara dengan sesama PFD atau dengan penduduk biasa (P) dalam membicarakan topik kedinasan, dan dalam situasi resmi?
- (2) Adakah perbedaan frekuensi pemakaian BI itu antara PFD - PFD di daerah *urban*, *rurban* dan *rural* di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan pada 1.2 di atas maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai di bawah ini.

1.3.1 Tujuan Umum

Memperoleh deskripsi yang sah tentang fungsi BI dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur, dalam rangka membantu usaha pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan kebahasaan yang antara lain berupa (1) pembinaan dan pembakuan BI, (2) pengembangan dan penyebaran penyuluhan pemakaian BI, dan (3) pembinaan dan pengembangan pengajaran BI di sekolah-sekolah.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Memperoleh deskripsi sosiolinguistik tentang frekuensi pemakaian BI

dalam *domain* pemerintahan desa oleh para PFD di daerah Jawa Timur, dengan memperhatikan variabel-variabel *pokok pembicaraan, situasi, lokasi dan partisipan*.

Dalam deskripsi ini secara implisit akan tergambar pula :

- 1) perbedaan frekuensi pemakaian BI di berbagai daerah sampel di Jawa Timur; dan
 - 2) perbedaan frekuensi pemakaian BI di jenis-jenis desa, yakni *urban, rurban, dan rural* di tiap daerah sampel.
- b. Deskripsi di atas itu akan merupakan jawaban atas pertanyaan apakah BI sebagai bahasa negara telah berfungsi dalam *domain* kedinasaan, khususnya dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur.

Sebagai ukuran bahwa sebagai bahasa negara BI telah berfungsi dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur ialah jika sekurang-kurangnya 60% dari PFD dari desa-desa yang diambil sebagai responden menyatakan mempergunakan BI secara lisan dalam domain pemerintahan desa, baik kepada sesama PFD maupun kepada P.

- c. Hasil penelitian permulaan ini diharapkan akan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian lebih lanjut yang lebih meluas dan mendalam.

1.4 Asumsi

Penelitian ini didasari oleh sejumlah asumsi. Asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut:

- a) Penduduk desa-desa di daerah Jawa Timur telah menguasai dua macam bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat.
- b) Di daerah Jawa Timur bahasa Indonesia dipergunakan sebagai *lingua franca* dalam interaksi verbal antara penduduk yang tidak sesuku bangsa.
- c) Kontak seseorang dengan orang di luar suku bangsanya yang belum dikenal secara baik dapat mempengaruhi kebiasaannya berbahasa Indonesia itu.
- d) Di daerah yang penduduknya heterogen secara etnis, pemakaian bahasa Indonesia lebih sering daripada di daerah yang penduduknya homogen.

1.5 Hipotesis

Untuk mencapai hasil penelitian sebagaimana disebut dalam tujuan khusus, penelitian ini diarahkan oleh hipotesis kerja sebagai berikut:

Dalam *domain* pemerintahan desa, para PFD dari desa-desa daerah Jawa Timur sebagai pembicara (orang pertama = O1), mempergunakan bahasa Indonesia secara lisan, baik kepada sesama PFD maupun kepada P.

1.6 Pembatasan Masalah yang Diteliti

Berdasarkan pertimbangan terbatasnya waktu, tenaga dan dana, maka masalah-masalah yang dicakup oleh judul penelitian ini perlu dibatasi. Pembatasan masalah itu dirumuskan di bawah ini.

1.6.1 Kedudukan Bahasa Indonesia

Dari dua macam kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang akan diambil sebagai titik tolak penelitian ini adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

1.6.2 Fungsi Bahasa Indonesia

Dalam kedudukan sebagai bahasa negara bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi (lihat 1.1). Dari empat fungsi itu, yang akan menjadi sasaran penelitian ini adalah fungsi yang ketiga, yaitu sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan sebagai yang tersebut pada 1.6 dan mengingat perlunya pentahapan dalam penelitian ini maka fungsi itu pun hanya akan diteliti penerapannya pada *tingkat pemerintahan desa*.

1.6.3 Saluran (Channel) Pemakaian Bahasa Indonesia

Pemakaian bahasa dapat melalui dua saluran, yaitu saluran lisan dan saluran tulis. Berdasarkan asumsi bahwa dalam *domain* pemerintahan telah dipakai Bahasa Indonesia secara tertulis, maka yang akan menjadi sasaran penelitian ini adalah pemakaian bahasa Indonesia secara lisan.

1.6.4 Domain

Karena titik tolak penelitian ini adalah bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, maka *domain* yang paling berarti untuk sasaran penelitian ini adalah *domain* kedinasan, yang dalam hal ini dikhususkan pada *domain* pemerintahan desa.

1.6.5 Pokok Pembicaraan

Sebagai akibat logis dari tempat pemakaian bahasa, yaitu dalam *domain* kedinasan, maka topik pembicaraan yang berarti untuk sasaran ini adalah pokok pembicaraan kedinasan yaitu masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum desa.

1.6.6 Situasi Pembicaraan

Situasi pembicaraan yang dapat mempengaruhi pemilihan bahasa

itu ada dua macam, yaitu situasi resmi (formal) dan situasi santai (informal).

Dari dua macam situasi itu yang berarti dalam hubungan dengan *domain* dan pokok pembicaraan adalah situasi resmi. Karena itu situasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah situasi resmi.

1.6.7 Hubungan Antartpartisipasi

Yang dimaksud dengan hubungan antartpartisipasi adalah berbagai ragam hubungan antara pembicara (selanjutnya disingkat O1) dan orang kedua (pendengar) (disingkat O2) yang dapat mempengaruhi pemilihan jenis bahasa.

Hubungan itu diantaranya adalah

- (1) apakah O1 dan O2 sesuku?
- (2) apakah O1 dan O2 sudah saling mengenal?
- (3) apakah O1 dan O2 sebaya?
- (4) apakah antara O1 dan O2 ada hubungan kekerabatan?
- (5) apakah O1 dan O2 mempunyai peran (hubungan peran) yang sama?

Sesuai dengan *domain* pokok pembicaraan dan situasi yang menjadi sasaran penelitian ini, maka hubungan antar O1 dan O2 yang perlu dan dapat dikendalikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. O1 dan O2 dianggap:
 - (1) sesuku bangsa;
 - (2) sudah saling mengenal;
 - (3) usia kira-kira sama; dan
 - (4) tidak memiliki hubungan kekerabatan.
- b. relasi peran:
 - (1) O1 adalah PFD;
 - (2) O2 adalah PFD dan P

1.7 Istilah yang Dipergunakan

Untuk menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah pokok yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka di bawah ini akan didefinisikan istilah-istilah pokok tersebut.

- a. Yang dimaksud dengan *kedudukan bahasa Indonesia* adalah status relatif bahasa Indonesia sebagai lambang nilai budaya Indonesia, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial Indonesia yang dihubungkan dengan bahasa Indonesia (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:194).
- b. Yang dimaksud dengan *fungsi bahasa Indonesia* adalah nilai pemakaian bahasa Indonesia yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa Indonesia dalam kedudukan yang diberikan kepadanya (Lembaga Bahasa Nasional, 1975:194).

- c. Yang dimaksud dengan pengertian *domain* dalam penelitian ini adalah sesuai dengan konsep J.A. Fishman (J.B. Pride 1974:20) tentang *domain* yang dirumuskan sebagai " ... is social cultural construct abstracted from topics of communication relationship between communicators and locales of communication, in accord with the institutions of a society and the spheres of activity of a speech community, in such a way that individual behaviour and social patterns can be distinguished from each other and yet related to each other."

Domain pemerintahan adalah "the govermental administration domain" yang dirumuskan sebagai "a social nexus wich brings people together primaly for a certain cluster of purposes" (J.B. Pride, 1974:20).

Desa adalah "masyarakat pada unit pemerintahan terendah" (Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa: 9).

Dari kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa proses interaksi verbal itu dapat diidentifikasi sebagai terjadi dalam *domain pemerintahan desa*, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) pokok pembicaraannya menyangkut masalah kepentingan pada tingkat desa;
- b) pembicara mempunyai peran yang sesuai dengan lembaga pemerintah desa; tegasnya, pembicaranya adalah PFD; dan
- c) situasi pembicaraannya menyebabkan hasil pembicaraan itu mempunyai pengaruh terhadap kepentingan umum desa.

Situasi yang demikian itu disebut situasi resmi (formal).

- d. Yang dimaksud *pemimpin formal desa* (PFD) adalah pemimpin tingkat desa yang memperoleh kekuasaannya karena dipilih oleh rakyat desa dan atau diangkat oleh pejabat di atas tingkatan desa dan atau pejabat di atasnya pada tingkat desa.

Pada pemerintahan tingkat desa terdapat tiga golongan PFD, yaitu

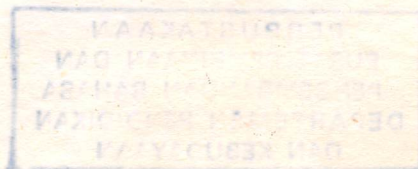
- 1) pamong desa yang terdiri atas : kepala desa, *carik kamituwo* (kepala kampung), *jogoboyo*, *jogotirto* (*uceng*), *kebyan*, dan *modin*;
- 2) pimpinan RK dan RW yang terdiri atas : ketua RK/RW dan ketua RT; dan
- 3) pengurus Lembaga Sosial Desa (LSD).

Ketiga golongan PFD itu, dalam penelitian ini dianggap sebagai variabel yang seragam. Oleh karena itu, mereka tidak perlu dibedakan dan disebut saja sebagai PFD. Mereka inilah yang akan menjadi informan dan atau responden dalam penelitian ini.

- e. Pengertian *desa* dalam penelitian ini, sebagaimana dirumuskan pada 1.7.c, adalah masyarakat pada satuan pemerintahan terendah. Jadi, kriterium untuk mengidentifikasi masyarakat sebagai desa adalah wila-

yah administratif yang pucuk pimpinannya berpangkat kepala desa/lu-
rah atau nama lain yang sederajat.

- f. Yang dimaksud *desa urban* (selanjutnya disebut *urban* saja) dalam pe-
nelitian ini adalah sesuai dengan *suburban* atau *faoubourg* yang ru-
musannya berbunyi "suatu area yang lokasinya terdekat dengan inti
kota" (Bintaro, 1968:109).
- g. Yang dimaksud *desa rurban* (selanjutnya disebut *rurban* saja) dalam
penelitian ini adalah sesuai dengan *suburban fringe* yang dirumuskan
sebagai "suatu area yang melingkari *suburban* dan merupakan daerah
peralihan antara daerah *urban* dengan daerah *rural*" (Bintaro, 1968 :
109).
- h. Yang dimaksud *desa rural* (selanjutnya disebut *rural*) dalam penelitian
ini adalah sesuai dengan desa (*rural settlement*), yang dari segi geografi
dapat dirumuskan sebagai "suatu daerah yang merupakan tempat ke-
diaman penduduk yang bersifat agraris yang sebagian atau sepenuhnya
terisolir dari kota" (Bintaro, 1968:95).



2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang kedudukan dan fungsi BI di Jawa Timur belum pernah dilaksanakan, lebih-lebih yang khusus meneliti kedudukan dan fungsi BI itu di dalam domain pemerintahan desa.

Beberapa penelitian kecil yang mirip dengan penelitian ini telah disebut dalam latar belakang masalah, yaitu penelitian para peserta penataran sosiolinguistik di Tugu (Cisarua, Bogor) dan penelitian I.L. Marsoedi tentang fungsi alih kode di desa Bumiayu (Kodya Malang) (Marsoedi, 1976).

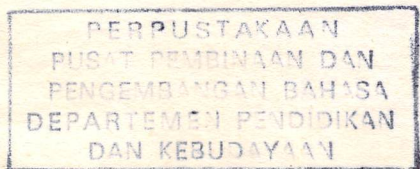
Penelitian lain yang perlu kami sebut pada laporan ini adalah penelitian John U. Wolff yang berjudul *The Function of Indonesian in Central Java*. Rangkuman hasil penelitian itu telah diceramahkan di FKSS-IKIP Malang pada tanggal 31 Mei 1975. Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah fungsi BI bagi masyarakat Jawa dan peranakan (Tionghoa) di Jawa Tengah.

Menurut Wolff fungsi BI di masyarakat Jawa Tengah itu sesuai benar dengan fungsi *High forms* seperti dikemukakan Ch. A. Ferguson (1974) sedang fungsi BJ sesuai dengan *Low forms*, walaupun pemisahan antara BI sebagai *High* dan BJ sebagai *Low* itu tidak tepat benar, karena terbukti bahwa pada kasus-kasus tertentu sering terjadi peralihan antara BI dan BJ.

Faktor-faktor yang mendorong pemilihan BI dalam proses konvensasi itu di antaranya adalah (1) pokok pembicaraan, (2) tempat dan waktu, misalnya pada pertemuan-pertemuan resmi, dan (3) penghindaran kewajiban memakai *undak-usuk* BJ, misalnya karena pembicaraan untuk memakai *krama* atau *krama inggil* kepada partisipan.

Tanner (1974:129 — 130) dalam laporan penelitiannya yang berjudul *Speech and Society among the Indonesian Elite: a Case Study of a Multilingual Community* di antaranya menyatakan bahwa ".....*Djakarta school children using Indonesian in class but switching to Dajartanese as soon as the recess bell rings, and that Parliament members speaking Javanese or Dutch before and after the session but using the national language, Indonesia, during the session itself.*"

Apa yang dikatakan Tanner itu jelas menunjukkan fungsi BI, yaitu bahwa BI sebagai bahasa nasional (dan bahasa negara) akan berfungsi dalam situasi resmi (dalam hal ini di kelas dan dalam sidang DPR), tetapi dalam situasi yang tidak resmi akan dipakai bahasa daerah penutur itu sendiri. Pada halaman 134 dikatakan bahwa BI itu kurang



kaya akan ungkapan-ungkapan yang menyatakan kesopanan bila dibandingkan dengan bahasa daerah, lebih-lebih BJ dan Bahasa Sunda.

Tiap kali menanyai responden, Tanner (1974:134) mendapat jawaban sebagai berikut : "*Oh yes, we may speak Indonesia, but in speaking to our older relatives it is not so polite*", atau "*Yes, I can speak Indonesian to the Consul (the Indonesian consul who was stationed in a nearly metropolis was Javanese), but it is nicer if I speak high Javanese.*"

Jawaban responden terakhir ini menyebabkan kita agak ragu untuk menyebut bahwa BI merupakan lambang *kebanggaan nasional*. Lambang kebanggaan nasionalkah BI jika seorang mahasiswa di Amerika berbicara dengan Konsul Indonesia di Amerika dengan BJ?

Demikianlah beberapa penelitian yang sedikit banyak bersangkutan dengan masalah fungsi BI.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Tentang Kedudukan dan Fungsi BI

Konsep tentang *kedudukan* dan *fungsi* bahasa itu agaknya sukar dipisahkan, sebab tiap kali kita berbicara tentang kedudukan selalu melibatkan fungsinya, bahkan "nama" kedudukan bahasa itu selalu "diangkat" dari fungsinya.

Dari sumber pustaka yang dapat kami jangkau, satu-satunya pustaka yang memuat definisi tentang kedudukan bahasa hanyalah "Politik Bahasa Nasional: Laporan Seminar" seperti yang sudah kami uraikan pada 1.1. Buku-buku lain tidak ada yang memuat definisi tentang kedudukan (status) bahasa. Yang ada hanyalah klasifikasi bahasa berdasarkan tipe fungsi dan klasnya.

William A. Stewart (1974:76 — 90) yang telah menguraikan tipologi sosiolinguistik untuk mendeskripsikan multilingualisme nasional pun tidak menyebut-nyebut istilah *kedudukan* bahasa. Dalam tulisan itu Stewart mengklasifikasikan bahasa berdasarkan pengkhususan-pengkhususan sebagai berikut.

a. Berdasarkan *ada atau tidaknya* ciri-ciri *pembakuan, otonomi, kesejahteraan* dan *daya hidup* suatu bahasa, maka diperoleh tujuh tipe bahasa, yaitu

- 1) bahasa *standard* (lambang:S),
- 2) bahasa *classical* (lambang:C),
- 3) bahasa *artificial* (lambang:A),
- 4) bahasa *vernacular* (lambang:V),
- 5) bahasa *dialect* (lambang:D),
- 6) bahasa *creole* (lambang:K),
- 7) bahasa *pidgin* (lambang:P)

b. Berdasarkan *pengkhususan fungsinya* diperoleh sepuluh macam bahasa, yaitu:

- 1) bahasa *official* (lambang:O),
- 2) bahasa *provincial* (lambang:p),
- 3) bahasa *wider communication* (lambang:w),
- 4) bahasa *internasional* (lambang:i),
- 5) bahasa *kapital* (lambang:c),
- 6) bahasa *group* (lambang:g),
- 7) bahasa *educational* (lambang:e),
- 8) bahasa *school subject* (lambang:s),
- 9) bahasa *literary* (lambang:l),
- 10) bahasa *religious* (lambang:r).

c. Berdasarkan *pengkhususan tingkat pemakaian*, yaitu persentase jumlah penutur, diperoleh enam kelas bahasa, yaitu

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) kelas I | 75% + |
| 2) kelas II | 50% + |
| 3) kelas III | 25% + |
| 4) kelas IV | 10% + |
| 5) kelas V | 5% + |
| 6) kelas VI | Kurang dari 5% |

Macam-macam nama bahasa beserta lambang-lambanganya itu, dengan modifikasi-modifikasi tertentu, akan dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan multilingualisme nasional.

2.2.2 Tentang Diglosia

Bila dalam suatu masyarakat bahasa dipergunakan dua variasi bahasa atau lebih, masing-masing menurut kondisi yang berbeda, disebut oleh Ch. A. Ferguson (1974:232 — 251) dengan istilah *diglossia*.

Contoh situasi semacam itu adalah Baghdad. Di Baghdad orang-orang Arab Kristen menggunakan "dialek Arab Kristen" bila berbicara di kalangan mereka sendiri, tetapi bila mereka berbicara dengan orang-orang dalam kelompok tercampur akan menggunakan dialek umum Baghdad, yaitu "dialek Arab Islam".

Dalam masyarakat diglosia, dialek yang dianggap umum atau standard disebut dialek H (*high*) atau H saja, sedang dialek kedaerahan disebut L (*low*). Baik H maupun L, masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. H dipakai misalnya dalam upacara-upacara agama di gereja atau mesjid, pidato di parlemen, memberi kuliah, siaran berita, surat-surat kabar dan sebagainya, sedang L dipakai misalnya dalam

berbicara di kalangan keluarga, teman, perintah kepada pembantu, atau pekerja, membuat karikatur politik sastra rakyat.

Yang menjadi soal sekarang adalah apakah situasi kebahasaan di Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya dapat disebut diglosia ?

John U. Wolff dalam referatnya yang berjudul *Diglosia dan Bilingualisme* mengatakan "Istilah diglosia digunakan pada masyarakat yang terdiri dari satu bangsa tetapi menggunakan *dua bahasa* atau dua logat yang berlainan, dan juga, yang paling penting, ialah kedua bahasa tersebut atau logat memainkan peranan mereka masing-masing di dalam masyarakat itu" (1974:3). Selanjutnya dikatakan bahwa "Jika ini dipikirkan memang akan kita lihat adanya situasi diglosia di sini. Bahasa Indonesia menduduki fungsi tertentu, bahasa Jawa menduduki yang tertentu pula. Kita memilihnya sesuai dengan fungsinya."

Sesuai dengan pendapat Wolff itu kita dapat juga menyatakan bahwa situasi diglosia itu pun terlihat di Jawa Timur, yaitu bahwa 'BI mempunyai fungsi tertentu dan BJ atau BM mempunyai fungsi tertentu pula. Secara umum dapat dianggap bahwa BI menduduki fungsi dalam pembicaraan yang bersifat formal, sedang BJ atau BM yang bersifat tradisional.

Di samping mempunyai fungsi tertentu (fungsi sebagai bahasa negara) dalam situasi diglosia, menurut Wolff BI mempunyai peranan tersendiri di kalangan orang Jawa asli, yaitu sebagai tingkatan bahasa tertentu. Kecenderungan mengangkat BI dalam tingkatan tertentu nampak juga di Jawa Timur, atau di kalangan penduduk tertentu. Di kalangan penduduk Cina, yang sudah terbiasa menggunakan BJ tetapi tanpa "unggah-ungguh", BI (baku atau variannya) dipergunakan sebagai bahasa tingkatan yang tinggi.

2.2.3 Bilingualisme

Dalam hubungan dengan istilah ini, Wolff (1974:3) menguraikan sebagai berikut: "Istilah *bilingualism* atau dwibahasa cukuplah bila diartikan 'kemampuan untuk menggunakan dua bahasa'. Berdasarkan definisi ini, dapatlah dikatakan bahwa *diglosia* pun sebenarnya merupakan salah satu bentuk khusus dari *bilingualism*. Tapi dalam praktek istilah *bilingualism* tidak bisa diterapkan untuk peristiwa *diglosia*. Istilah itu (*bilingualisme*) dipergunakan pada keadaan bilamana seseorang atau sejumlah orang berbicara menggunakan dua buah bahasa, tetapi kedua bahasa itu tidak mempunyai peranan sendiri-sendiri di dalam masyarakat pemakai bahasa. ... pemilihan bahasa yang akan digunakan tergantung pada kemampuan pembicara dan pendengar."

Joshua A. Fishman (Machmoed, 1974:1) mendefinisikan *bilingualisme* sebagai "*demonstrated ability to engage in communication via*

more than one language", sedang William F. Mackey (Machmoed, 1974:15) menjelaskannya sebagai berikut: "*If language is the property of the group, bilingualism is the property of the individual.*"

Dari uraian di atas terlihat bahwa konsep *diglosia* dan *bilingualisme* itu sebenarnya berbeda dalam penerapannya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa situasi *diglosia* itu dapat terjadi dalam suatu masyarakat bila warga masyarakat itu adalah bilingual.

Dalam hubungan dengan penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur BI tidak dipergunakan oleh para PFD, karena PFD itu tidak menguasai BI atau karena P sebagai partisipan hanya mengerti BJ atau BM saja yang berarti bahwa situasi *diglosia* tidak terjadi karena warga masyarakat adalah monolingual, maka tidak dapat disimpulkan bahwa BI sebagai bahasa negara *tidak berfungsi* pada domain pemerintahan desa, melainkan bahwa BI *belum berfungsi* pada pemerintahan desa, karena syarat untuk BI berfungsi memang belum ada.

2.2.4 Masalah Pemilihan Bahasa

Dalam masyarakat monolingual hanya terdapat satu macam bahasa saja untuk pengantar semua kepentingan hidup yang harus diantarkan dengan bahasa (Soepomo, 1975:1). Dalam masyarakat yang demikian tentu tidak terjadi masalah pemilihan bahasa. Sebaliknya pada masyarakat bilingual atau multilingual, masalah pemilihan bahasa itu timbul, karena dalam masyarakat multilingual terdapat lebih dari satu bahasa sebagai pengantar kepentingan-kepentingan hidupnya.

Jawa Timur merupakan masyarakat yang multilingual. Di Jawa Timur paling tidak terdapat tiga macam bahasa, yaitu: BI, BJ, dan BM, sehingga dalam tiap proses interaksi verbal antara dua orang secara bersemuka (*face-to-face*) timbul masalah pemilihan bahasa (BJ, BM, atau BI).

2.2.5 Variabel-variabel Penentu Pemilihan Bahasa

G. Sankoff (1974, 38-51) telah mengadakan penelitian tentang "Kasus Buang". Masyarakat Buang (Nugini) adalah multilingual dengan tiga macam bahasa, yaitu Buang, Yabem, dan Neo Melanesia. Dalam penelitian itu ia membuat model prediktif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa oleh orang Buang sebagai berikut.

Variabel Penentu	Putusan Pilihan Bahasa
A. Kepada orang Buang a.1 pada <i>situasi resmi</i> a.1.1 <i>keagamaan</i> a.1.2 <i>bisnis</i> (pemerintahan, peristiwa sosial) a.1.3 <i>tradisional</i> (misalnya pembagian ubi) a.2 pada <i>situasi tak resmi</i> a.2.1 <i>secara tertulis</i> a.2.2 <i>secara lisan</i> : a.2.2.1 <i>keadaan khusus</i> (misalnya melucu) a.2.2.2 <i>keadaan normal</i>	Y, NM, B B, NM B Y, NM NM, Y B
B. Kepada orang bukan Buang : b.1 Yang tak dikenal (<i>stranger</i>) b.2 Yang dikenal (<i>non-stranger</i>) b.2.1 Misionaris, Guru, Pastur b.2.2 Penutur Bukawa atau Yabem b.2.3 Penutur Buang b.2.4 Orang yang lain	 NM Y Y, NM B, NM, Y NM

Keterangan : Y = bahasa Yabem
B = bahasa Buang
NM = bahasa Neo Melanesia

Dari skema ini jelas bahwa Sankoff menempatkan *partisipan* (*inter-locutor*, pendengar, O2) sebagai faktor pertama yang mempengaruhi pilihan bahasa. Kemudian menyusul variabel *situasi* dan *domain* serta *topik*.

Dari model Sankoff ini, yang paling berarti bagi penelitian yang dilaporkan ini adalah A, a.1., a.1.2.

2.2.6 Tentang Domain

J.B. Pride (*Ibid*, 13) mengulas apa yang diuraikan oleh J.A. Fishman sebagai berikut: "*Fishman discusses the utility of the concept of 'domain' in abstracting from the behaviour of large numbers of individuals, in order to describe and analyse code-switching at the societal level.*"

Dari ulasan Pride ini jelas bahwa untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis proses alih-kode atau pemilihan bahasa diperlukan konsep tentang *domain*.

Setelah mengulas pandangan-pandangan orang lain, seperti Schmidt Rohr, Mak, Frey dan sebagainya, J.A. Fishman mendefinisikan *domain* sebagai berikut.

"... domain is a socio-cultural construct abstracted from topics of communication, relationships between communicators, and locales of communication, in accord with the institutions of a society and spheres of activity of a institutions of a society and spheres of activity of a speech community, in such a way that individual behaviour and social patterns can be distinguished from each other and yet related to each other."

Dari definisi ini kita ketahui bahwa domain adalah konstruk sosio-budaya yang diabstraksikan dari:

- (1) pokok pembicaraan,
- (2) hubungan antarpartisipan,
- (3) tempat dan waktu (*setting*) pembicaraan,

"... domain is a socio-cultural construct abstracted from topics of communication, relationships between communicators, and locales of communication, in accord with the institutions of a society and spheres of activity of a speech community, in such a way that individual behaviour and social patterns can be distinguished from each other and yet related to each other."

Dari definisi ini kita ketahui bahwa domain adalah konstruk sosio-budaya yang diabstraksikan dari:

- (1) pokok pembicaraan,
- (2) hubungan antarpartisipan,
- (3) tempat dan waktu (*setting*) pembicaraan,

dan semua itu dengan cara tertentu harus sesuai dengan lembaga-lembaga masyarakat tertentu dan suasana kegiatan masyarakat bahasa itu, sehingga tingkahlaku individu dan pola-pola kemasyarakatan dapat dibedakan satu sama lain tetapi masih saling berkaitan.

Jadi domain adalah (konstruk yang merupakan hasil dari) abstraksi atau peringkasan pada tataran-lebih tinggi (*higher-order*) dari studi terperinci tentang interaksi bersemuka yang melibat masalah pemilihan bahasa.

Di antara berbagai faktor yang menunjang kepada atau menjadi bagian dari konstruk domain terdapat tiga macam faktor, yaitu: *pokok pembicaraan*, *hubungan* dan *tempat (locale)*, yang dianggap lebih penting daripada yang lain. Karena itu, satu persatu akan diulas di bawah ini.

2.2.7 Pokok Pembicaraan

Kenyataan bahwa dua orang yang sedang berbincang-bincang tiba-tiba mengganti bahasa (dari bahasa X ke bahasa Y) bila topiknya berganti, mendorong kita untuk menarik kesimpulan bahwa pokok pembicaraan itu sendiri tentulah merupakan faktor pengatur pemakaian bahasa dalam *setting* multilingual.

Implikasi pemilihan bahasa karena pokok pembicaraan itu, ialah bahwa dalam konteks multilingual tertentu, topik-topik tertentu agak "lebih baik" atau lebih wajar dijelaskan dalam bahasa tertentu daripada dalam bahasa yang lain. Tetapi kewajaran ini mungkin mencerminkan atau mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor yang berbeda tetapi saling memperkuat. Dengan demikian, penutur-penutur multilingual mungkin "memperoleh kebiasaan" berbicara tentang pokok x dalam bahasa X. Hal itu mungkin disebabkan oleh :

- a. bahasa itulah yang telah dilatihkan kepada mereka untuk membicarakan pokok itu;
- b. mereka mungkin (dan partisipannya) kekurangan istilah khusus untuk mendiskusikan pokok x dalam bahasa Y secara memuaskan;
- c. istilah-istilah umum yang tepat untuk membicarakan pokok x yang dimiliki bahasa Y tidak sebanyak yang dimiliki bahasa X;
- d. bahasa Y dianggap asing atau tidak wajar untuk membicarakan pokok x.

Serba ragamnya sumber pengaturan (pemilihan bahasa) oleh pokok pembicaraan itu menunjukkan bahwa pokok itu sendiri mungkin belum merupakan variabel analitis yang memuaskan soalnya pemilihan bahasa itu juga dapat dipandang dari segi pola-pola kemasyarakatan yang lebih luas dan norma-norma sosiolinguistik tentang *setting* multilingual.

2.2.8 Hubungan Antartpartisipasi

Dalam studi tentang perilaku multilingual, *domain* keluarga merupakan salah satu domain yang penting. Braunshausen (1928) telah membedakan domain keluarga atas dasar hubungan antartpartisipasi. Tetapi ia hanya membedakannya atas dasar "anggota-anggota" keluarga, yaitu *ayah, ibu, anak, pelayan*, dan seterusnya.

Sebaliknya Gross (1951) mengkhususkan dasar 'pasangan dua' (*dyads*) dalam keluarga, seperti hubungan *kakek-nenek, nenek-kakek, kakek-ayah, ayah-kakek*, dan seterusnya. Pendekatan Gross ini penting karena tidak saja memperhitungkan interaksi anggota keluarga sebagai pembicara-pendengar semata-mata, melainkan juga memperhitungkan perilaku bahasa atas dasar 'hubungan-peran' (*role-relation*).

Dalam masyarakat tertentu, munculnya perilaku tertentu (termasuk perilaku bahasa) hampir selalu dapat diharapkan (bahkan disyaratkan), bila individu-individu tertentu saling berhadapan muka (Goodenough, 1965). Dengan demikian, tiap domain dapat dibedakan atas dasar hubungan-peran yang dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu merupakan kekhususan. Misalnya dalam *domain* keagamaan (Katholik) kita temukan hubungan-peran sebagai berikut : *Uskup-pastur, pastur-uskup, pastur-umat, umat-pastur*, dan seterusnya. Dalam *domain* sekolah kita temukan hubungan-peran sebagai berikut : *kepala sekolah-guru, guru-kepala sekolah, guru-murid, murid-guru* dan seterusnya. Dalam *domain* pemerintahan desa kita temukan hubungan-peran sebagai berikut : *kepala desa-carik, carik-kepala desa, kepala desa-kamituwo, kamituwo-kepala desa, kepala desa-penduduk, penduduk-kepala desa*, dan seterusnya.

Dengan demikian, dalam menganalisa pemakaian bahasa dalam masyarakat multilingual, variabel hubungan-peran ini memegang peranan penting.

2.2.9 Tempat Pembicaraan (*locale*)

Ervin (1964) dan Gumperz (1964) telah menunjukkan banyak contoh tentang pentingnya *tempat* sebagai komponen yang menentukan dalam analisis situasi. Pada dasarnya *domain* itu memang dihubungkan dengan tempat, dalam arti bahwa kebanyakan kelembagaan sosial itu pertama sekali memang berhubungan dengan tempat.

Jadi, jika dalam proses pemilihan bahasa secara bersemuka itu kesesuaian pokok pembicaraan dan kesesuaian hubungan-peran merupakan petunjuk pola-pola sosial yang lebih luas, maka batasan tempat dan kesesuaian tempat yang berlaku dalam pemilihan bahasa secara bersemuka tentulah mempunyai implikasi dan ekstrapolasinya yang luas juga.

3. METODE PENDEKATAN DAN PROSEDUR YANG DITEMPUH

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan *metode deskriptif*, yaitu metode yang hendak mencoba memberikan atau menggambarkan kenyataan sebagaimana adanya. Meskipun demikian, hasil kuantitatif yang merupakan harapan utama penelitian ini, dalam laporan ini tidak hanya akan disajikan secara deskriptif. Hasil itu juga akan ditafsirkan sebab-sebabnya, lebih-lebih yang ada sangkut-pautnya dengan asumsi dan atau hipotesis.

3.2 Populasi

Sesuai dengan judul dan tujuan, yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh PFD dari desa-desa seluruh Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Daerah Tingkat I Jawa Timur bahwa jumlah PFD dan desa-desa di seluruh Jawa Timur secara lengkap tercantum pada buku *Jawa Timur dalam Angka*. Karena buku tersebut sulit dicari dan tidak ditemukan petunjuk lain yang bisa memberikan informasi, maka jumlah PFD dan desa-desa di seluruh Jawa Timur tidak dapat dicantumkan. Sebagai gambaran mengenai jumlah PFD di desa-desa Jawa Timur, di sini dicantumkan jumlah PFD di desa kecamatan sumber sampel sebanyak 1.589 orang.

Jumlah PFD ini secara terperinci dapat dilihat pada Tabel D.

3.3 Sampel

Secara administratif daerah Jawa Timur meliputi tujuh daerah karesidenan dan 38 daerah tingkat II. Untuk menentukan responden sebagai sumber data dalam penelitian ini, dilakukan secara bertahap pemilihan daerah sampel berturut-turut dari daerah tingkat II sampai daerah tingkat desa. Pengambilan sampel ini dilakukan mengingat luasnya wilayah daerah Jawa Timur, waktu, dan tenaga yang ada sekarang ini sangat terbatas.

Untuk menetapkan daerah sampel, pada dasarnya dipergunakan teknik acak-berlapis (*stratified random sampling*), kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Untuk kasus-kasus tertentu akan dipergunakan teknik purposif, sedang untuk responden-responden yang sudah dianggap homogen akan dipergunakan teknik acak-kebetulan (*accidental random sampling*).

3.3.1 Pemilihan Daerah Sumber Sampel

Berdasarkan asumsi bahwa multilingualisme di daerah Jawa Timur terdiri atas tiga tipe, yaitu : (1) tipe multilingual, (2) tipe trilingual, dan (3) tipe *bilingual*, maka daerah sumber sampel akan dipilih secara purposif, yaitu dengan tujuan agar tiap tipe terwakili.

Adapun yang dimaksud dengan istilah *multi-*, *tri-*, dan *bilingual* yang dipergunakan untuk menunjuk tipe ini mengacu kepada makna dasar kata-kata itu, yaitu : *multi* = *banyak*, *tri* = *tiga* dan *bi* = *dua*.

Diasumsikan bahwa daerah yang termasuk bertipe multilingual adalah daerah Surabaya, khususnya kota Surabaya. Sebagai kota "metropolitan", tentunya di Surabaya terdapat berbagai macam golongan etnis, sehingga juga akan terdapat berbagai bahasa.

Yang diasumsikan termasuk daerah bertipe trilingual adalah daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, sehingga di daerah itu akan terdapat tiga macam bahasa, yaitu BJ dan BM, masing-masing sebagai bahasa pertama, dan BI sebagai bahasa ke dua. Daerah-daerah yang diasumsikan termasuk bertipe ini adalah : Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Yang diasumsikan termasuk daerah bertipe bilingual adalah daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya terdiri atas suku Jawa atau suku Madura, sehingga di daerah itu terdapat dua macam bahasa, yaitu BJ atau BM, masing-masing sebagai bahasa pertama dan BI sebagai bahasa kedua. Dipandang dari bahasa pertamanya, maka di Jawa Timur akan terdapat dua macam tipe bilingual, yaitu bilingual BJ-BI dan bilingual BM-BI.

Yang diasumsikan termasuk daerah bertipe bilingual BI-BJ adalah bekas karesidenan Madiun, bekas karesidenan Kediri, bekas karesidenan Bojonegoro, Jombang dan Mojokerto. Yang diasumsikan termasuk daerah bertipe bilingual BM-BI adalah Madura dan Situbondo.

Selain tiga tipe daerah seperti tersebut di atas, agaknya daerah-daerah yang membujur utara-selatan, mulai dari sebelah selatan Surabaya, yaitu Sidoarjo sampai ke Kepanjen (jadi meliputi kota-kota Sidoarjo, Porong, Bangil, Pandaan, Lawang, Malang dan Kepanjen), mempunyai corak sendiri, yaitu "tipe antara". Tipe ini kita namakan *bi-tri-lingual*, yaitu BJ-BM-BI, dengan perkiraan BJ lebih dominan daripada BM.

Berdasarkan asumsi tipe-tipe daerah seperti tersebut di atas, maka dipilihlah tiga daerah sumber sampel sebagai berikut :

- (1) tipe multilingual: daerah Surabaya;
- (2) tipe bilingual BJ-BI: daerah Madiun;
- (3) tipe trilingual: daerah Jember.

Pemilihan daerah Madiun dan Jember, yang masing-masing merupakan wakil dari tipenya, juga didasarkan pertimbangan bahwa kedua daerah itu secara geografis jauh dari Surabaya, sehingga kemungkinan "pengaruh" dari Surabaya relatif kecil. Jarak kedua kota itu dari Surabaya adalah 198 km (Jember) dan 169 km (Madiun).

Daerah yang bertipe bilingual BM-BI dan bertipe bi-tri-lingual, mengingat waktu dan tenaga terpaksa tidak diteliti.

3.3.2 *Penentuan Daerah Tingkat II Sumber Sampel*

Ketiga daerah sumber sampel tersebut di atas secara administratif terperinci sebagai berikut:

- a. Daerah Surabaya, sebagai daerah bekas karesidenan, mempunyai enam daerah tingkat II yang terdiri atas dua kota madya (Kodya) dan empat kabupaten (Kab).
- b. Daerah Jember, sebagai daerah bekas kabupaten, mempunyai dua daerah tingkat II, yaitu sebuah kota administratif (Kotad) dan sebuah kabupaten.
- c. Daerah Madiun, sebagai daerah bekas karesidenan, mempunyai enam daerah tingkat II, yaitu sebuah kodya dan lima kabupaten.

Dengan demikian daerah tingkat II sumber sampel berjumlah 14 yang terdiri atas: 10 daerah Kab., 3 daerah Kodya, dan 1 daerah Kotad.

Istilah Kodya dan Kotad dalam penelitian ini dianggap sama saja, karena perbedaannya hanya terletak pada nama sedangkan sifat-sifat yang berarti bagi penelitian ini tidak berbeda.

Berdasarkan pertimbangan bahwa tiap lokasi dan tiap jenis daerah perlu diwakili, maka daerah tingkat II sumber sampel dipilih secara purposif sebagai berikut:

- 1) tiga Kodya, masing-masing dari daerah Surabaya, Jember dan Madiun;
- 2) tiga Kab, masing-masing dari daerah Surabaya, Jember dan Madiun.

3.3.3 *Penentuan Daerah Kecamatan Sumber Sampel*

Berdasarkan hasil penjajagan yang dilaksanakan ke daerah-daerah tersebut di atas, perincian jumlah kecamatan tiap daerah tingkat II di atas adalah sebagai berikut.

a. Daerah kodya:

- 1) Surabaya mempunyai 16 kecamatan, 11 kecamatan terletak dalam kota dan 5 kecamatan terletak di pinggiran kota.
- 2) Jember mempunyai 3 kecamatan, semuanya terletak di dalam kota.
- 3) Madiun mempunyai 1 kecamatan, terletak di dalam kota.

b. Daerah kabupaten:

- 1) Gresik mempunyai 18 kecamatan, yang perincian letaknya sebagai berikut: 1 di dalam kota, 2 di pinggiran kota dan 15 di luar kota. Dari hasil penjajagan ternyata bahwa secara administratif Kabupaten Surabaya telah ditiadakan, dan "pemerintahannya" baik secara fisik maupun administratif telah dipindahkan ke Gresik.
- 2) Jember mempunyai 24 kecamatan, semuanya terletak di luar kota (kantor pusat kabupaten sendiri terletak di pusat kota, berdampingan dengan kantor pusat Kotad).
- 3) Madiun mempunyai 13 kecamatan, semuanya terletak di luar kota (kantor pusat kabupaten terletak di dalam kota, berdekatan dengan kantor kodya).

Dari jumlah kecamatan seperti tersebut di atas, dengan pertimbangan bahwa harus diperoleh jenis-jenis desa: *urban*, *rurban*, dan *rural*, serta pertimbangan prosedur perizinan, maka kecamatan-kecamatan yang dipilih sebagai sumber sampel adalah sebagai berikut.

Tabel A
Daftar Kecamatan Sumber Sampel

Daerah	Jenis Daerah	Jumlah	Sampel	
			Jumlah	N a m a
Surabaya	Kodya	16	2	Tambaksari, Wonocolo
	Kab. (Gresik)	18	1	Kedamean
Jember	Kodya	3	1	Kaliwates
	Kabupaten	24	1	Mayang
Madiun	Kodya	1	1	Kota Madiun
	Kabupaten	1	7	Jiwan
	Jumlah	75	13	

3.3.4 Penentuan Desa Sumber Sampel

Dari hasil orientasi ternyata bahwa kecamatan-kecamatan yang tersebut pada Tabel A itu masing-masing terdiri dari desa-desa sebagai berikut.

Tabel B
Daftar Jumlah Desa Kecamatan Sumber Sampel

Daerah	Kecamatan	Jenis Desa			Jumlah
		<i>Urban</i>	<i>Rurban</i>	<i>Rural</i>	
	Tambaksari	6	—	—	6
Surabaya	Wonocolo		13	—	13
	Kedamean	—	—	15	15
Jember	Kaliwates	4	2	—	6
	Mayang	9	—	6	6
Madiun	Kota Madiun	—	11	—	20
	Jiwan	—	—	29	29
	Jumlah	19	26	50	95

Dengan pertimbangan bahwa setiap daerah dan setiap jenis desa perlu diwakili, maka dari desa-desa sumber sampel dalam tabel di atas itu dipilih secara purposif sebagai berikut :

- a. dari desa *urban* sebanyak 19 buah itu akan diambil 3 buah desa, masing-masing dari Kodya Surabaya, Jember dan Madiun;
- b. dari desa *rurban* sebanyak 26 buah itu akan diambil 3 buah desa, masing-masing dari Surabaya, Jember dan Madiun;
- c. dari desa *rural* sebanyak 50 buah itu akan diambil 3 buah desa pula, masing-masing dari Surabaya, Jember dan Madiun.

Dengan demikian desa-desa sumber sampel yang akan menjadi sasaran penelitian ini berjumlah 9 buah desa, dengan perhitungan persentase sebagai berikut.

- 1) *urban* 3 desa = $3/19 \times 100\% = 15,8\%$
- 2) *rurban* 3 desa = $3/26 \times 100\% = 11,5\%$
- 3) *rural* 3 desa = $3/50 \times 100\% = 6\%$

Pemilihan sebuah desa dari tiap jenis desa dan dari tiap daerah dilaksanakan dengan teknik *acak-kebetulan* (*accidental random sampling*). Dengan teknik *sampling* sebagai yang diuraikan di atas, diperoleh desa sumber sampel sebagai berikut.

Tabel C
Daftar Nama Desa Sumber Sampel

Daerah	Jenis Desa	Jumlah	Nama Desa
Surabaya	<i>Urban</i>	1	Tambaksari
	<i>Rurban</i>	1	Gayungan
	<i>Rural</i>	1	Ngepung
Jember	<i>Urban</i>	1	Jember Kidul
	<i>Rurban</i>	1	Mangli
	<i>Rural</i>	1	Mayang
Madiun	<i>Urban</i>	1	Kartoharjo
	<i>Rurban</i>	1	Patihan
	<i>Rural</i>	1	Metesih

3.3.5 Penentuan Sampel dan Responden

a. Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah para PFD. Dari hasil penjajagan ternyata bahwa jumlah PFD jauh lebih besar dari yang diasumsikan (lihat Disain Penelitian pada Lampiran I). Jumlah yang diasumsikan adalah 675 orang, sedang kenyataannya adalah 1.589 orang. Di samping perbedaan jumlah yang sangat menyolok, penyebaran PFD itu pun pada desa-desa sumber sampel sangat tidak seimbang. Jumlah dan penyebaran PFD pada desa-desa sumber sampel, sebagai hasil orientasi terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel D
Jumlah PFD Desa Sumber Sampel

Jenis PFD	Daerah	Jenis Desa			
		<i>Urban</i>	<i>Rurban</i>	<i>Rural</i>	Jumlah
Pamong Desa	Surabaya	8	9	10	27
	Jember	27	13	13	53
	Madiun	11	12	14	37
Pimpinan RK(RW) /RT	Surabaya	104	27	13	144
	Jember	692	143	162	997
	Madiun	57	27	35	119
Pengurus	Surabaya	22	25	7	54
	Jember	30	40	4	74
LSD	Madiun	45	32	7	84
	Jumlah	996	328	265	1.589

b. Penentuan Responden

Penetapan jumlah responden dipergunakan teknik purposif berlapis sebagai diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan pertimbangan bahwa PFD dari setiap jenis desa adalah seragam, maka jumlah responden untuk seluruh daerah dari setiap jenis desa diambil sekaligus sebesar 7,5%.

Dengan perhitungan seperti itu diperoleh responden sejumlah sebagai berikut.

- 1) Responden *urban* : $7,5/100 \times 996 \times 1 \text{ orang} = 74,7$ dibulatkan : 75 orang
- 2) Responden *rurban* : $7,5/100 \times 328 \times 1 \text{ orang} = 24,6$ dibulatkan : 25 orang
- 3) Responden *rural* : $7,5/100 \times 265 \times 1 \text{ orang} = 19,9$ dibulatkan : 20 orang

Dengan demikian jumlah seluruh responden 120 orang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah responden itu untuk tiga daerah, maka setiap daerah akan mendapat bagian sepertiganya, yaitu : $\frac{1}{3} \times 120 \text{ orang} = 40 \text{ orang}$.

Mengingat bahwa jumlah responden untuk setiap jenis desa harus dibagi untuk tiga daerah, maka jumlahnya harus dapat dibagi tiga. Dengan demikian, jumlah responden untuk desa *rurban* dan *rural* perlu diubah menjadi seperti berikut :

a) Responden *rurban* : dari 25 menjadi 24 orang.

b) Responden *rural* : dari 20 menjadi 21 orang.

Dengan perhitungan dan modifikasi seperti tersebut di atas, perincian jumlah responden menjadi sebagai berikut.

- (1) Untuk setiap *urban* setiap daerah, masing-masing adalah $\frac{1}{3} \times 75 \text{ orang} = 25 \text{ orang}$.
- (2) Untuk setiap *rurban* setiap daerah, masing-masing adalah $\frac{1}{3} \times 24 \text{ orang} = 8 \text{ orang}$.
- (3) Untuk setiap *rural* setiap daerah, masing-masing adalah $\frac{1}{3} \times 21 \text{ orang} = 7 \text{ orang}$.

Mengingat bahwa jumlah responden dari setiap jenis desa terdiri atas tiga macam golongan PFD, yaitu : pamong desa, pimpinan RK (RW)/RT, dan pengurus LSD, dan setiap golongan perlu diwakili, maka jumlah itu harus dibagi lagi atas dasar perimbangan jumlah jenis-jenis PFD secara keseluruhan.

Dengan teknik *sampling* purposif berlapis sebagai yang diuraikan berturut-turut seperti di atas akhirnya di perincian responden sebagai berikut.

Tabel E
Daftar Jumlah Responden

Jenis PFD	Daerah	Jenis Desa			
		Urban	Rurban	Rural	Jumlah
Pamong Desa	Surabaya	5	2	2	9
	Jember	5	2	2	9
	Madiun	5	2	2	9
Pimpinan RK(RW)/ RT	Surabaya	10	3	3	16
	Jember	10	3	3	16
	Madiun	10	3	3	16
Pengurus LSD	Surabaya	10	3	2	15
	Jember	10	3	2	15
	Madiun	10	3	2	15
	Jumlah	75	24	21	120

c. Identifikasi Responden

Dari jumlah dan jenis PFD yang akan diwawancarai sebagai yang tersebut pada tabel di atas akan diidentifikasi siapa-siapa (nama) mereka itu. Pemilihan siapa-siapa mereka itu dilaksanakan dengan teknik acak-kebetulan (*accidental random sampling*), yaitu mewawancarai siapa saja dari PFD yang kebetulan dijumpai, dengan catatan bahwa tiap jenis PFD tidak boleh melebihi jumlah yang terdaftar di atas.

3.4 Data

Data Penelitian ini terdiri atas :

- a. Data dasar yaitu data yang berupa informasi-informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis (statistik desa, buku laporan dan sebagainya) dan penjelasan lisan dari informasi pangkal pejabat desa atau

orang lain yang dipandang cukup tahu tentang berbagai masalah desa sumber sampel, tentang situasi umum desa sumber sampel (jumlah penduduk, komposisi suku bangsa, tingkat perekonomian, tingkat pendidikan, latar belakang budaya dan sebagainya). Data dasar ini dapat dipergunakan sebagai alat pembantu dalam strategi penelitian maupun dalam analisis data utama.

- b. Data utama yaitu data kuantitatif yang berupa pernyataan/jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti tentang pemakaian bahasa secara lisan dalam domain pemerintahan desa.
- c. Data tambahan yaitu kualitatif yang berupa catatan-catatan peneliti, hasil dari pengamatan yang tidak sistematis selama peneliti berada di lapangan. Data tambahan ini dapat dipergunakan sebagai alat pembantu menafsirkan hasil penelitian.

3.5 Pengumpulan data

3.5.1 Teknik Pengumpulan

Data sebagai yang tersebut pada 3.4 di atas dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

- a. data dasar dikumpulkan dengan *instrumen* yang berbentuk *angket* dan wawancara sambil lalu (*casual interview*) dengan informan kunci (*key informant*).
- b. data utama dikumpulkan dengan teknik wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang pilihan jawabannya sudah tersedia.
- c. data tambahan dikumpulkan dengan teknik pengamatan tidak sistematis (*casual observation*) dan wawancara tidak sistematis.

3.5.2 Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket, seperangkat daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara tertulis, dan peneliti sendiri.

Pada dasarnya instrumen harus mampu menggali data yang diperlukan secara sah. Oleh karena itu, instrumen harus merupakan penjabaran operasional dari asumsi-asumsi dan atau hipotesis-hipotesis.

Penelitian ini dalam kenyataannya menggunakan dua macam instrumen, yaitu instrumen pengumpulan data dasar dan instrumen pengumpulan data utama.

a. Instrumen Data Dasar

Instrumen ini dipergunakan untuk menggali data dasar yang diperlukan untuk membantu proses penelitian berikutnya.

Bentuk instrumen data dasar ini dilandasi oleh penalaran sebagai berikut:

- 1) untuk menentukan desa sumber sampel yang tepat, diperlukan pengetahuan tentang situasi daerah tingkat II dan kecamatan yang membawahi desa sumber sampel tersebut;
- 2) untuk menetapkan nama jenis desa sumber sampel, diperlukan pengetahuan tentang letak desa (jarak dari pusat kota), batas-batasnya dan tingkat perekonomian penduduk (mata pencaharian penduduk);
- 3) untuk mengetahui homogen tidaknya komposisi sukubangsa penduduk, diperlukan pengetahuan tentang perbandingan secara nominal atau secara persentase komposisi sukubangsa penduduk; dan
- 4) untuk menentukan berapa jumlah responden dan jenis PFD yang akan diwawancarai, diperlukan pengetahuan tentang jenis kelembagaan dan berapa masing-masing personal tiap jenis lembaga itu.

Atas dasar penalaran seperti tersebut di atas maka instrumen data dasar disusun dalam bentuk angket seperti terlampir (lihat Lampiran II).

b. Instrumen Data Utama

Instrumen data utama ini dipergunakan untuk menggali data utama, yaitu data tentang pemakaian bahasa secara lisan oleh PFD dalam domain pemerintahan desa di desa-desa sampel.

1) Bentuk Instrumen

Instrumen ini berbentuk seperangkat daftar pertanyaan (DP) tertutup, dalam arti bahwa setiap butir (*item*) telah disediakan pilihan jawabannya, DP ini bagi peneliti berfungsi sebagai pedoman wawancara.

Secara lahiriah instrumen ini terdiri atas tiga perangkat DP, yaitu DP untuk pamong desa, DP untuk pimpinan RK(RW)/RT dan DP untuk pengurus LSD. Meskipun demikian, "isi" ketiga DP itu tidak berbeda, dalam arti bahwa jenis kegiatan, lokasi kegiatan, jenis pokok pertanyaan yang dipersoalkan, jenis partisipan dan jumlah partisipan adalah seragam. Satu-satunya perbedaan terletak pada penjabaran pokok pertanyaan dalam jenis kegiatan tertentu. Maksud pembedaan penjabaran itu ialah agar dalam jenis kegiatan tertentu pokok itu dapat tertampung dalam wadah kelembagaan yang sesuai. Misalnya, DP item no. 10 (lihat Lampiran 1). Dalam rapat pamong desa, topik yang diajukan adalah masalah rencana pembangunan desa. Topik semacam itu tentu tidak relevan bagi rapat Pengurus LSD.

Dengan mengingat bahwa variabel-variabel yang dijabarkan dalam instrumen ini seragam, maka tiga perangkat DP itu sebenarnya hanya seperangkat saja.

2) Susunan Instrumen

Susunan DP dalam instrumen ini didasarkan pada penalaran, asumsi, dan atau hipotesis sebagai di bawah ini.

- a) Asumsi bahwa karakteristik pembicara mempengaruhi kemampuan berbahasa; dijabarkan pada butir No. 2 — 7.
- b) Asumsi bahwa kemampuan alih kode (*code switching*) dipengaruhi oleh jumlah penguasaan bahasa (*linguistic repertoire*) penutur; dijabarkan dalam butir no. 8.¹
- c) Asumsi bahwa kontak seseorang dengan orang di luar golongan etnisnya yang belum dikenal secara baik dapat mempengaruhi kebiasaan ber-BI; makin sering kontak itu makin terbiasalah kebiasaannya ber-BI (lihat 1.4. (3); dijabarkan pada butir No. 9.
- d) Hipotesis yang menyatakan bahwa dalam *domain* pemerintahan desa, para PFD dari desa-desa daerah Jawa Timur sebagai pembicara (orang pertama = O1) mempergunakan BI secara lisan baik kepada sesama PFD maupun kepada P (lihat 1.5) dijabarkan pada butir No. 10 — 17.²

1

Dari hasil wawancara terbukti bahwa asumsi yang menyatakan bahwa penduduk desa-desa di daerah Jawa Timur telah menguasai dua buah bahasa, yaitu BI dan BD setempat (lihat 1.4 a) tidak tepat benar. Dari 120 responden, terdapat 7 orang yang hanya menguasai BJ saja. Akibat asumsi itu ialah bahwa butir No. 8 kekurangan pilihan jawaban yang menyebabkan juga tidak tersedianya kode jawaban. Oleh karena itu, butir No. 8 direvisi dengan menambah pilihan jawaban : BJ ☐ O.

2

Sayang sekali bahwa DP bagi responden Pimpinan RK (RW)/RT kehilangan satu butir. Hal itu disebabkan oleh dikejanya waktu untuk segera "turun lapangan", sehingga instrumen yang sudah dicobakan dan kemudian direvisi dan dikonsep secara baik, mengalami salah ketik. Kesalahan ketik tersebut baru diketahui setelah berada di lapangan. Karena lapangan tersebar di tiga wilayah, dan wawancara berjalan serentak, maka hilangnya satu butir itu terpaksa dibiarkan saja, demi keseragaman hasil.

Butir yang tidak terketik itu adalah butir yang menyangkut *pelayanan* RK (RW)/RT terhadap seorang partisipan. Dalam tabel *TFPB*, yaitu tabel yang memuat secara menyeluruh hasil wawancara, hilangnya butir itu diperlihatkan dalam kolom nomor butir. Pada tabel itu kolom nomor butir terisi sbb.: butir No. 10, 11, 12, 13 berarti sama bagi semua perangkat DP; butir No. 14/- berarti nomor 14 bagi perangkat DP Pemdes dan LSD tidak ada bagi perangkat DP RK (RW)/RT; butir No. 15/14, 16/15, 17/16 berarti bahwa nomor depan bagi perangkat DP Pemdes dan LSD, senomor belakang bagi perangkat DP RK (RW)/RT.

3.5.3 Proses Pengumpulan Data

Mengingat bahwa satu-satunya teknik pengumpulan data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini hanyalah wawancara, maka demi tercapainya keterpercayaan dan kesahihan data yang tinggi, diperlukan instrumen yang tepat dan pelaksanaan wawancara yang cermat. Untuk keperluan itu dilaksanakan tahap-tahap kegiatan sebagai di bawah ini.

a. Tahap Persiapan Wawancara

- 1) Penyusunan pedoman pelaksanaan wawancara. Pedoman ini dipergunakan sebagai petunjuk bagi para calon pewawancara dalam menciptakan hubungan, memancing data yang dicari, menggunakan instrumen, dan sebagainya.
- 2) Percobaan instrumen dan latihan wawancara. Setelah calon-calon pewawancara (anggota tim) dan pembantunya memahami seluk-beluk instrumen dan pedoman pelaksanaannya, mereka melaksanakan latihan wawancara dan percobaan instrumen di daerah percobaan. Yang diambil sebagai daerah percobaan adalah sebuah desa *urban*, sebuah desa *rurban*, dan sebuah desa *rural*, yaitu desa Kidul Dalam, Summersari (Kodya Malang) dan desa Karang Besuki (Kab. Malang). Sebagai responden percobaan dari tiap desa percobaan adalah tiga orang PFD, masing-masing dari pamong desa, RK (RW)/RT, dan pengurus LSD.
- 3) Evaluasi terhadap hasil latihan dan percobaan. Hasil latihan wawancara dan percobaan instrumen ini didiskusikan, dan mengakibatkan direvisinya sejumlah butir dalam instrumen.

b. Tahap Pelaksanaan Wawancara

- 1) Sesuai dengan jumlah daerah yang diteliti, maka tim dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing untuk melaksanakan wawancara di daerah penelitian Surabaya/Gresik, Jember dan Madiun.
- 2) Responden yang telah berhasil diwawancarai berjumlah 120 orang, sesuai dengan jumlah yang direncanakan atau diidentifikasi.
- 3) Wawancara berlangsung serempak di tiga daerah penelitian, dari tanggal 28 November – 5 Desember 1976.
- 4) Untuk menghindari suasana kedinasan dan diperolehnya jawaban yang wajar dan spontan, sedapat-dapatnya wawancara dilaksanakan di rumah responden dan hanya dengan seorang responden saja. Sedang datangnya pewawancara ke rumah responden tidak perlu diantar oleh pejabat desa (lebih-lebih responden yang telah diwawancarai). Dalam praktek ternyata bahwa suasana seperti yang diharapkan itu tidak sepenuhnya tercapai, karena

adanya berbagai kesulitan. Di desa-desa *rurban*, dan *rural* umumnya para pewawancara diantar oleh petugas desa, karena pewawancara sendiri memang sulit mencari rumah-rumah responden yang sebagian besar tidak bertanda pengenalan. Di desa-desa *urban* pewawancara tidak diantar dan memang menolak untuk diantar. Hal itu dimungkinkan, karena di desa *urban* identitas responden yang PFD itu memang relatif mudah dicari.

Usaha untuk mewawancarai seorang responden secara terpisah pun tidak seluruhnya dapat dicapai. Hal semacam itu umumnya terjadi pada wawancara di kantor, atau kalau di rumah karena pewawancara diantar oleh petugas yang menjadi responden pula. Meskipun demikian, didapat kesan bahwa jawaban-jawaban responden-responden itu cukup wajar dan tidak meniru jawaban responden sebelumnya. Di Desa Mangli (*rurban*, Jember), pewawancara diantar oleh Kepala Desa sendiri (terutama karena waktu wawancara sudah cukup malam, berakhir pukul 20.30). Sesampai di rumah responden setelah Kepala Desa ini memperkenalkan pewawancara dengan tuan rumah (responden) selalu mengatakan begini: "Bapak ini (maksudnya pewawancara) akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pemakaian bahasa, jawablah sebagaimana adanya." Selanjutnya Kepala Desa selalu diam selama wawancara berlangsung.

Secara umum diperoleh kesan bahwa proses wawancara ini berlangsung lancar dan wajar. Jika terjadi kesulitan menjumpai responden, hal itu bukan disebabkan oleh tanggapan negatif terhadap penelitian ini, melainkan karena memang responden sedang tidak berada di rumah.

Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan pewawancara terlihat jelas bahwa responden menanggapi secara serius penelitian ini, dan memberikan jawaban-jawaban yang spontan dan wajar. Bahkan ada di antara responden yang memberikan komentar sambil menerka-nerka tujuan penelitian ini dengan mengatakan begini: "Penelitian ini kami anggap baik sekali, karena tentunya kalau nanti ternyata bahwa sebagian besar rakyat di desa-desa belum dapat ber-BI, maka rakyat di desa-desa itu akan dikursus bahasa Indonesia." (komentar seorang Ketua RK Desa Jember Kidul, yang juga seorang guru). Komentar yang sama diperoleh dari seorang ketua RT di Jember Kidul juga dan dari ketua RT di Surabaya.

Di samping data dasar dan data utama, penelitian ini pun mencoba mengumpulkan data tambahan atau data pelengkap. Data tambahan ini dikumpulkan dengan teknik pengamatan sambil lalu, yang hasilnya

dicatat peneliti dalam buku catatan harian.

Data (kualitatif) di bawah ini diangkat dari buku-buku catatan harian para peneliti yang diisi selama berada di lapangan baik yang diperoleh sambil berwawancara maupun yang diperoleh di luar waktu wawancara.

a. Dari daerah Surabaya. Dari desa *urban* Surabaya diperoleh catatan sebagai berikut.

- 1) Dalam melayani P yang sedang menghadap di kantor, PFD mempergunakan BI yang diselingi BJ.
- 2) Dalam rapat antara PFD, pembicara mempergunakan BI.

b. Dari daerah Jember. Dari daerah ini diperoleh catatan sebagai berikut.

- 1) Di kantor Kecamatan Kaliwates (di pusat kota), para pegawai dalam berbicara dengan sesama pegawai mempergunakan BM yang kadang-kadang diselingi BJ, atau BI, dan Camat mempergunakan BM kepada pegawai dan kepada peneliti mempergunakan BI.
- 2) Di kantor Kecamatan Mayang (luar kota, jarak 13 km dari Jember), pegawai-pegawai mempergunakan BM dalam berbicara dengan teman-temannya sesama pegawai, tetapi mempergunakan BI kepada peneliti.

3) Di kantor Desa Mayang (*rural*) dalam melayani P, Carik mempergunakan BM, sedang kepada tamu (peneliti) mempergunakan BI. Di rumah Kepala Desa, dalam rapat dengan para kerawat yang dihadiri pula oleh peneliti atas permintaan Kepala Desa, Kepala Desa mempergunakan BM yang kadang-kadang diselingi istilah BI atau bahasa Arab sesuai dengan konteks istilah yang dipakai. Jika pada suatu ketika minta pembenaran kepada peneliti, tentang apa yang dikatakan kepada kerawat itu, kepala desa mempergunakan BI, kadang-kadang juga dengan BM. (Kepala Desa Mayang ini menguasai secara aktif tiga bahasa, yaitu BM, BI dan Bahasa Arab.

Sesudah rapat dan sesudah diwawancarai, Kepala Desa menjelaskan bahwa ia mempergunakan BM kepada orang tua, misalnya kepada Kyai Kampung Klayu (bagian desa Mayang) yang juga Ketua P2A, karena jika mempergunakan BI dianggapnya tidak sopan. Seorang kepala kampung desa Mayang menjelaskan sebagai berikut: "Pada umumnya para kerawat di sini mempergunakan BI kepada atasan (khususnya kepada Pak Camat), itu untuk menghormat."

- 4) Di kantor Balai Desa Mangli (*rurban*, jarak dari kota Jember 6 km, para kerawat mempergunakan BM yang diselingi BJ dalam berbicara dengan sesama kerawat atau dengan P yang sedang menghadap. Kepada peneliti ia mempergunakan BI, tetapi setelah mengetahui bahwa peneliti seorang Jawa, kadang-kadang mempergu-

nakan BJ. Kepala Desa menjelaskan bahwa para ketua RK umumnya mempergunakan BI kepada kepala desa.

c) Dari Daerah Madiun

- 1) Di kantor Kepala Desa Kartoharjo (*urban*), para PFD mempergunakan BI dalam berbicara, baik kepada sesama PFD maupun kepada P yang sedang menghadap, demikian juga kepada peneliti.
- 2) Di kantor Desa Patihan (*rurban*), dalam melayani P, Carik mempergunakan BM, sedang kepada tamu (peneliti) mempergunakan BI dan di Desa Metesih (*rural*), mempergunakan BJ.
- 3) Ketua LSD Patihan menjelaskan bahwa kepada anggota-anggota LSD ia berusaha terus mempergunakan BI.
- 4) Di rumah Kepala Desa Metesih terjadi pertemuan mendadak antara pamong desa di satu pihak dan Camat beserta rombongan petugas Keluarga Berencana dari Kecamatan Jiwan di lain pihak, yang juga dihadiri oleh peneliti. Dalam pertemuan itu dipergunakan BJ.

Demikianlah beberapa catatan hasil pengamatan sambil lalu, yang diharapkan dapat dipergunakan untuk membantu menafsir hasil penelitian secara keseluruhan.

4. PENGOLAHAN DATA

4.1 Penyajian Data

Data utama yang dikumpulkan dengan teknik wawancara berencana yang mempergunakan instrumen tertulis model pertanyaan tertutup sebagai pedoman wawancara, dalam bab ini akan disajikan dalam bentuk-bentuk seperti di bawah ini.

4.1.1 Lembar Himpunan Kode Data (Coding-Sheet)

Jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen ditandai dengan cek atau garis silang pada nomor kode jawaban yang dipilih. Kode jawaban pada instrumen itu kemudian dipindahkan ke dalam Lembar Himpunan Kode Data (disingkat LHKD). Urutan pemindahan kode data dari instrumen yang telah terisi jawaban itu ke dalam LHKD adalah sebagai berikut.

a. Data dari daerah Surabaya :

- 1) *urban* masuk ke dalam LHKD Ia;
- 2) *rurban* masuk ke dalam LHKD Ib;
- 3) *rural* masuk ke dalam LHKD Ic; dan
- 4) jumlah kumulatif dari ketiga jenis desa itu masuk LHKD I.

b. Data dari daerah Jember :

- 1) *urban* masuk ke dalam LHKD IIa;
- 2) *rurban* masuk ke dalam LHKD IIb;
- 3) *rural* masuk ke dalam LHKD IIc; dan
- 4) jumlah kumulatif dari ketiga jenis desa itu masuk LHKD II;

c. Data dari daerah Madiun :

- 1) *urban* masuk ke dalam LHKD IIIa;
- 2) *rurban* masuk ke dalam LHKD IIIb;
- 3) *rural* masuk ke dalam LHKD IIIc; dan
- 4) jumlah kumulatif dari ketiga jenis desa itu masuk LHKD III.

d. Data dari seluruh Jawa Timur :

Jumlah kumulatif dari LHKD I + LHKD II + LHKD III merupakan data untuk seluruh Jawa Timur, dan dihimpun dalam LHKAD IV.

4.1.2 Penghitungan Data

Data yang terhimpun dalam LHKD tersebut di atas selanjutnya dihitung sesuai dengan jenisnya masing-masing dan dikelompokkan berdasarkan:

- a. identitas/karakteristik responden;
- b. sumber perolehan bahasa; dan
- c. pemakaian bahasa dalam topik kedinasan.

Hasil penghitungan ini dimasukkan ke dalam daftar dan diberi nama TURUS.

Urutan pemindahan jumlah data sejenis ke dalam TURUS sesuai dengan urutan LHKD di atas, sehingga terdapat TURUS sebagai berikut.

LHKD Ia dipindahkan ke TURUS Ia
LHKD Ib dipindahkan ke TURUS Ib
LHKD Ic dipindahkan ke TURUS Ic
LHKD I dipindahkan ke TURUS I
LHKD IIa dipindahkan ke TURUS IIa
LHKD IIb dipindahkan ke TURUS IIb
LHKD IIc dipindahkan ke TURUS IIc
LHKD II dipindahkan ke TURUS II
LHKD IIIa dipindahkan ke TURUS IIIa
LHKD IIIb dipindahkan ke TURUS IIIb
LHKD IIIc dipindahkan ke TURUS IIIc
LHKD III dipindahkan ke TURUS III
LHKD IV dipindahkan ke TURUS IV

4.2 Pengolahan Data

Mengingat waktu dan fokus penelitian ini, maka data yang tersimpan pada TURUS tersebut di atas (4.1.2) tidak akan diolah seluruhnya. Dari tiga kategori data utama, yaitu identitas responden, sumber perolehan bahasa, dan pemakaian bahasa dalam topik kedinasan, hanya kategori yang ketigalah akan diolah, yang tentu saja dikorelasikan dengan identitas responden, khususnya butir No. 6 dalam daftar pertanyaan, yaitu PFD. untuk memudahkan pengolahan, maka korelasi antara PFD dan pemakaian bahasa perlu dimasukkan ke dalam tabel-tabel, karena tabel memang merupakan alat peringkas untuk menyajikan data asli yang telah diorganisir (Ardhana dan Soetrisno, 1973: 2.3).

4.2.1 Tabel Frekuensi Pemakaian Bahasa

Dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan TURUS, serta dengan memperhitungkan variabel-variabel tetap :

- (1) pembicara (O1) = PFD,
- (2) domain = pemerintahan desa,
- (3) topik = kedinasan,
- (4) situasi = resmi,

maka diperoleh Tabel tentang Frekuensi Pemakaian Bahasa (selanjutnya disingkat : TFPB) sebagai berikut (lihat Lampiran 1):

TFPB Ia tentang frekuensi pemakaian bahasa di *urban* Surabaya
 TFPB Ib tentang frekuensi pemakaian bahasa di *rurban* Surabaya
 TFPB Ic tentang frekuensi pemakaian bahasa di *rural* Surabaya
 TFPB I tentang frekuensi pemakaian bahasa di daerah Surabaya
 TFPB IIa tentang frekuensi pemakaian bahasa di *urban* Jember
 TFPB IIb tentang frekuensi pemakaian bahasa di *rurban* Jember
 TFPB IIc tentang frekuensi pemakaian bahasa di *rural* Jember
 TFPB II tentang frekuensi pemakaian bahasa di daerah Jember
 TFPB IIIa tentang frekuensi pemakaian bahasa di *urban* Madiun
 TFPB IIIb tentang frekuensi pemakaian bahasa di *rurban* Madiun
 TFPB IIIc tentang frekuensi pemakaian bahasa di *rural* Madiun
 TFPB III tentang frekuensi pemakaian bahasa di daerah Madiun
 TFPB IV tentang frekuensi pemakaian bahasa di seluruh Jawa Timur

Tabel ini sebenarnya masih merupakan himpunan "data mentah", dalam arti bahwa data itu hanya diangkat langsung dari instrumen, lengkap dengan penunjukan nomor butir dalam instrumen, yaitu dari nomor butir 10—16/17. Satu-satunya pengaturan adalah tidak diurutkannya nomor butir. Nomor butir berada di dalam urutan "jenis kegiatan". Kriteria untuk mengurutkan jenis kegiatan ialah mulai dari yang "paling resmi" sampai kepada jenis kegiatan yang "keresmiannya diragukan".

4.2.2 Tabel Perbandingan Persentase Frekuensi Pemakaian Bahasa

Untuk mengolah data lebih lanjut, dari TFPB tersebut di atas (4.2.1) disusun tabel perbandingan persentase frekuensi pemakaian bahasa antara berbagai jenis desa dan antara berbagai daerah dengan memusatkan salah satu variabel pembeda.

Dari berbagai kemungkinan korelasi yang dapat disusun, untuk keperluan analisis data laporan ini akan disusun dua belas tabel perbandingan persentase pemakaian bahasa (selanjutnya disingkat TPP), yang masing-masing akan langsung dijelaskan pada nomor berikut ini.

4.3 Analisis Data

Tabel perbandingan frekuensi pemakaian bahasa (TPP) sebanyak dua belas sebagai yang dilampirkan ini (lihat Lampiran 2) disusun berdasarkan pemusatan pokok masalah yang akan dianalisis.

Tiga pokok masalah itu adalah

- (1) tentang pemakaian BI dalam *rapat* (TPP I—VI);

- (2) tentang pemakaian BI dalam *pelayanan* TPP VII—IX);
- (3) tentang pemakaian BI dalam *perjumpaan* (TPP X—XII).

Kriteria untuk mengurutkan pokok masalah itu adalah "tingkat keresmian" jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang paling resmi (rapat), yang kurang resmi pada rapat (pelayanan), dan yang keresmiannya diragukan (perjumpaan). Yang dimaksud perjumpaan di sini adalah proses bertemunya dua orang individu (di sini PFD) yang terjadi secara tidak sengaja dan di tempat pertemuan itu terjadi pembicaraan tentang topik kedinasan yang belum direncanakan sebelumnya.

Dengan berbagai variabel tetap seperti yang telah tercantum dalam TPP dan variabel penentu pemilihan bahasa, maka tiga pokok masalah itu berturut-turut akan dianalisis pada nomor-nomor berikut ini.

4.3.1 Pemakaian BI dalam Rapat

Analisis terhadap pemakaian BI dalam rapat ini menurut urutan (1) daerah demi daerah (Surabaya, Jember, Madiun), dan (2) jenis desa demi jenis desa (*urban*, *rurban*, *rural*) di daerah Jawa Timur.

a. Pemakaian BI dalam Rapat di Surabaya

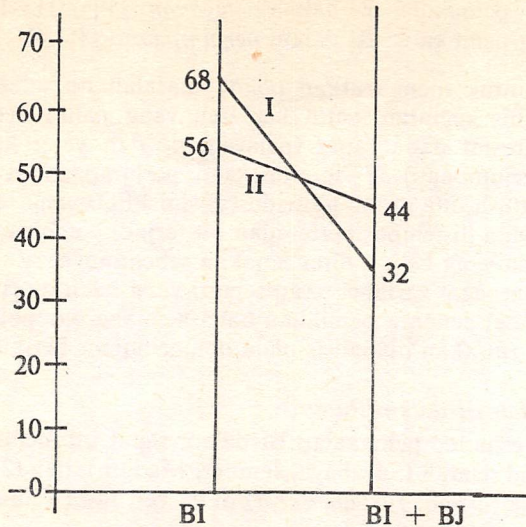
Dalam TPP I terlihat bahwa pemakaian bahasa dalam domain pemerintahan desa di daerah Surabaya hanya terjadi dalam dua macam bahasa, yaitu BI dan BJ. Pemakaian BI dan BJ oleh para PFD daerah Surabaya, dengan variabel-variabel tetap dan variabel penentu pemilihan bahasa yang berupa partisipan menunjukkan pola-pola umum sebagai berikut.

1) Desa *Urban*

Di *urban* terlihat bahwa persentase pemakaian BI adalah 68%, sedang BI + BJ adalah 32%, jika partisipan adalah sesama PFD. Jika partisipannya PFD + P, pemakaian BI menurun menjadi 56%, sedang pemakaian BI + BJ naik menjadi 44%.

Dari kedua kasus itu tampak jelas bahwa variabel partisipan sangat berpengaruh terhadap pemilihan jenis bahasa. Memang kita melihat penurunan persentase pemakaian BI dan kenaikan persentase pemakaian BI + BJ, jika partisipannya PFD + P. Meskipun demikian, persentase pemakaian BI masih tampak lebih tinggi dari pada persentase pemakaian BI + BJ. Ini berarti bahwa ada usaha nyata dari para PFD untuk menggunakan BI dengan fungsi yang sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara.

Perbedaan persentase pemakaian BI dan BI + BJ, jika partisipannya berbeda, secara grafis dapat dilukiskan sebagai berikut.



Grafik 1 : Pemakaian BI dan BI + BJ dalam Rapat di *Urban* Surabaya
 Keterangan I = partisipan PFD
 II = partisipan PFD + P

2) Desa *rurban*

Di desa *rurban* terdapat fenomena yang menarik dalam hal pemakaian bahasa. Jika partisipannya PFD, BI dipergunakan 100%, tetapi jika partisipannya PFD + P dipergunakan BI + BJ secara 100%. Kasus ini dapat ditafsirkan sebagai gagalnya usaha PFD untuk mempergunakan BI, jika partisipannya adalah $PFD \div P$. Hal itu barangkali disebabkan oleh tingkat pendidikan dan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia P masih agak rendah.

3) Desa *rural*

Di desa *rural* ternyata BI sama sekali tidak dipergunakan. Baik terhadap partisipan PFD maupun partisipan PFD + P hanya dipakai BJ secara 100%. Hal ini tentulah disebabkan oleh tingkat pendidikan dan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia PFD maupun P yang masih sangat rendah.

4) Secara keseluruhan, data pemakaian BI dalam rapat di daerah Surabaya ini dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut:

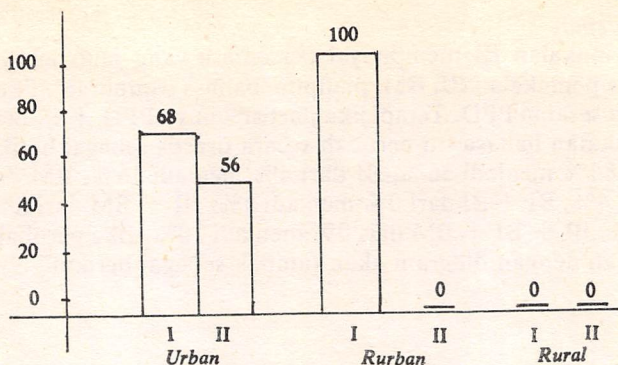


Diagram 2 : Pemakaian BI dalam Rapat di Surabaya

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

5) Kesimpulan Sementara

Dari hasil analisis data dari daerah Surabaya tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut :

- asumsi bahwa penduduk Jawa Timur sekurang-kurangnya menguasai dua macam bahasa, yaitu BI dan BD setempat ternyata tidak benar bagi *rural* Surabaya, dan kurang benar bagi *rurban* Surabaya;
- hipotesis yang berbunyi "Dalam *domain* pemerintahan desa, para PFD dari desa-desa daerah Jawa Timur, sebagai pembicara (orang pertama = O1) mempergunakan BI secara lisan baik kepada sesama PFD maupun kepada P" (lihat 1.5), juga tidak benar, karena ternyata di Surabaya hanya dicapai 56% PFD yang mempergunakan BI secara lisan kepada PFD + P, padahal ukuran untuk menganggap bahwa BI telah berfungsi, jika dicapai 60% (lihat 1.3.2 2)).

b. Pemakaian BI dalam Rapat di Daerah Jember

Dari TPP II ternyata bahwa pemakaian bahasa dalam *domain* pemerintahan desa, khususnya dalam rapat, di daerah Jember ini cukup menarik, sebab semua kemungkinan pilihan jenis bahasa yang disediakan dalam instrumen terisi. Dengan mempergunakan variabel partisipan sebagai penentu pemilihan bahasa, maka pemakaian bahasa di daerah Jember menunjukkan pola-pola umum sebagai berikut.

1) Desa Urban

Pemakaian BI mempunyai persentase yang jauh lebih tinggi daripada pemakaian BJ, BM, maupun 'bahasa campuran', jika partisipannya sesama PFD. Tetapi jika partisipannya PFD + P, persentase pemakaian bahasa itu berubah secara drastis sebagai berikut:

BI dari 84% menjadi 36%, BJ dari 4% menjadi 16%, BM dari 0% menjadi 4%, BI + BJ dari 0% menjadi 4%, BI + BM dari 8% menjadi 16%, BI + BJ + BM dari 0% menjadi 16%. Jika perubahan ini dilukiskan dengan diagram akan tampak sebagai berikut.

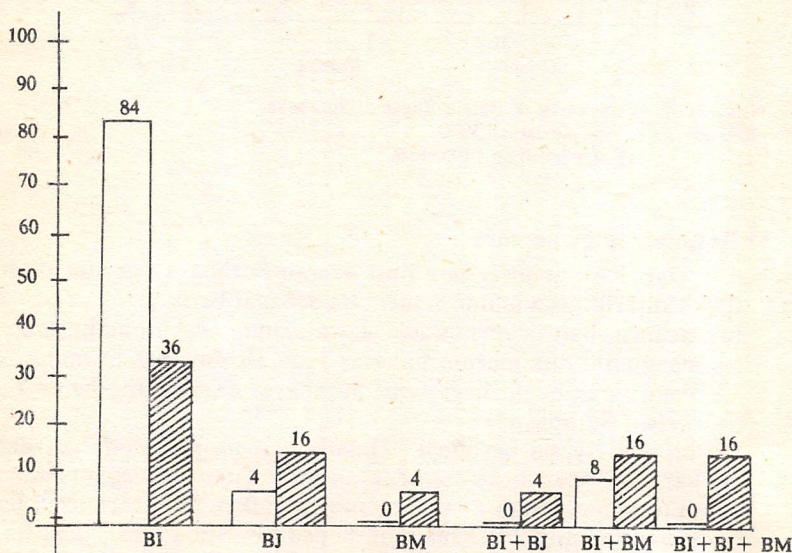


Diagram 2 : Perubahan Pemakaian Bahasa di *Urban* Jember

Keterangan: = partisipan PFD

= partisipan PFD + P

Perubahan yang drastis dalam pemakaian BI itu barangkali dapat ditafsirkan sebagai adanya perbedaan tingkat pendidikan yang menyolok antara PFD dan P di *urban* daerah Jember.

2) Desa Rurban

Suatu gejala yang istimewa di *rurban* Jember ini ialah kenyataan bahwa jika partisipannya PFD pemakaian BI sama persentasenya dengan pemakaian BM, yaitu masing-masing 37,5%. Pemakaian BJ sama dengan pemakaian BI + BM, yaitu masing-masing 12,5%. Dengan partisipan PFD + P pola pemakaian bahasa beru-

bah. BM naik menjadi 50%, sedang BI, BJ, BI + BM turun, masing-masing menjadi 12,5%, 0%, 0%. Tetapi muncul pemakaian 'bahasa campuran' yaitu BJ + BM dan BI + BJ + BM, masing-masing 12,5%.

Pola perubahan pemakaian bahasa di *rurban* Jember ini dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

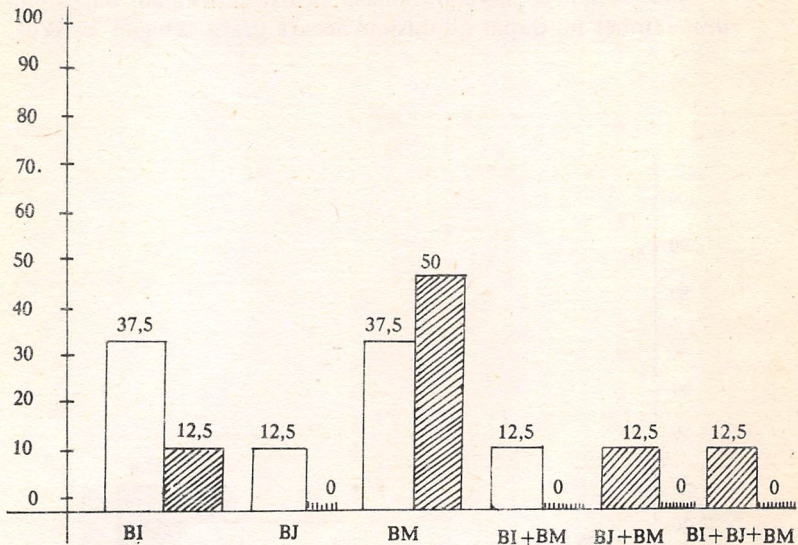


Diagram 3 : Perubahan Pemakaian Bahasa di *Rurban* Jember

Keterangan : = partisipan PFD
 = partisipan PFD + P

Dari kenyataan itu agaknya dapat disimpulkan bahwa *rurban* Jember ini adalah tipe masyarakat 'trilingual' dengan catatan bahwa bahasa yang dominan adalah BM. Perubahan pemakaian BJ dari 12,5% menjadi 0% barangkali merupakan petunjuk bahwa rakyat di *rurban* Jember ini tidak dapat atau tidak mau memakai BJ jika berkomunikasi dengan PFD dalam situasi resmi di kantor.

3) Desa Rural

Di *rural* Jember variasi pemakaian bahasa dalam domain pemerintahan desa ternyata hanya tiga macam bahasa, yaitu BI, BJ,

dan BM. Seperti juga di *rurban*, di *rural* inipun BM tampak dominan sekali, baik bagi partisipan PFD maupun bagi partisipan PFD + P. Yang nampak aneh di sini ialah bahwa pemakaian BJ hanya terjadi jika partisipannya PFD + P, sedang bila partisipannya PFD+BJ tidak terpakai sama sekali. Ini tentunya merupakan petunjuk bahwa di *rural* Jember terdapat P suku Jawa, tetapi tidak terdapat PFD yang bersuku Jawa.

Perubahan pemakaian bahasa akibat perubahan partisipan di *rural* Jember ini dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

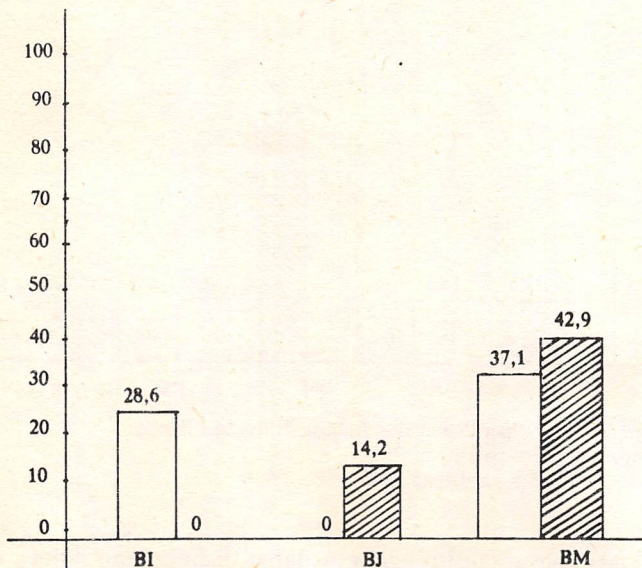


Diagram 4 : Perubahan Pemakaian Bahasa di *Rural* Jember

Keterangan :  = partisipan PFD
 = partisipan PFD + P

- 4) Dengan mengabaikan bahasa-bahasa yang lain, maka pemakaian BI oleh PFD daerah Jember untuk kegiatan rapat dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut :

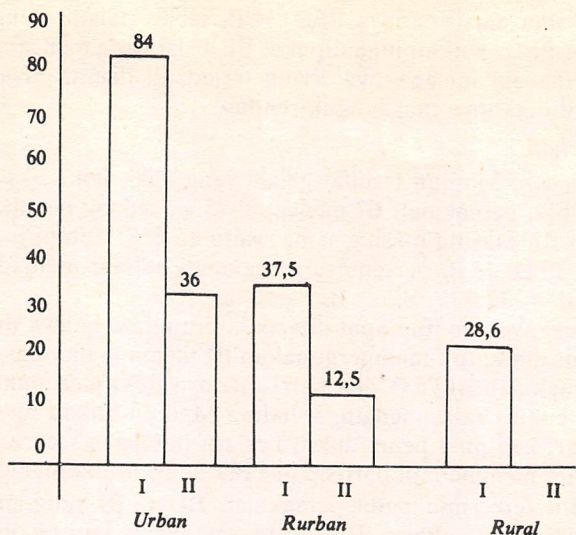


Diagram 5 : Pemakaian BI dalam Rapat di Jember.

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

5) Kesimpulan Sementara

Dari hasil analisis data daerah Jember tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut :

- asumsi bahwa daerah Jember bertipe trilingual ternyata benar, dengan catatan bahwa perbandingan antara BJ dan BM berubah-ubah menurut tipe desa. Di *urban* BJ lebih dominan daripada BM, sedang di *rurban* dan *rural* sebaliknya, yaitu BM lebih dominan daripada BJ;
- hipotesis penelitian ini tidak terbukti, baik di *urban*, *rurban* maupun *rural*.

c. Pemakaian BI dalam rapat di Daerah Madiun

Data tentang pemakaian bahasa dalam rapat-rapat di daerah Madiun sebagaimana tercantum dalam TPP III dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Desa *Urban*

PFD *urban* Madiun mempergunakan BI secara 100% dalam menghadapi partisipan sesama PFD. Persentase itu menurun men-

jadi 52% jika partisipannya PFD + P, sebab dalam menghadapi partisipan PFD + P ini juga dipakai BI + BJ yang mencapai 48%. Gejala semacam ini agaknya sering terjadi di daerah *urban* yang taraf pendidikannya masih agak rendah.

2) Desa *Rurban*

Di *rurban* Madiun terlihat gejala yang agak lain. Jika partisipannya PFD, pemakaian BI mencapai 75%, sedang pemakaian BI + BJ dan BJ, masing-masing sama, yaitu 12,5%. Tetapi jika partisipannya PFD + P, persentase pemakaian bahasa menjadi BI = 12,5%, BJ = 37,5%, BI + BJ = 50%.

Dari kenyataan itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa di *rurban* Madiun usaha untuk mempergunakan BI memang nampak dengan jelas. Pemakaian BI 75% jika partisipannya PFD merupakan prestasi yang cukup baik, mengingat bahwa Madiun bukan merupakan kota besar, lagi pula penduduknya relatif homogen secara etnis.

Dalam menghadapi partisipan PFD + P, usaha mempergunakan BI itu tercermin pada pemakaian BI + BJ yang mencapai 50%. Karena pemakaian BI secara sempurna kurang dipahami oleh P, maka BI terpaksa "dicampuri" dengan BJ. Dengan demikian bahasa yang paling dominan di *rurban* Madiun adalah BI + BJ, karena mencapai 50%, sedang BJ dan BI, masing-masing adalah 37,5% dan 12,5%.

3) Desa *Rural*

Dapat kiranya diduga bahwa di desa *rural*, BI memang masih terlalu sukar bagi penduduk biasa maupun bagi PFD. Hal itu terlihat jelas juga di *rural* Madiun. BI sama sekali tidak pernah dipakai, baik kepada sesama PFD maupun kepada PFD + P. Meskipun demikian usaha untuk mempergunakan BI tampak juga, walaupun terpaksa harus "dicampuri" dengan BJ, lebih-lebih jika partisipannya sesama PFD.

Pola perubahan pemakaian BI + BJ akibat perbedaan partisipan adalah 42,9% untuk PFD dan 14,1% untuk PFD + P, sedang pemakaian BJ adalah 57,1% untuk PFD dan 85,9% untuk PFD + P.

- 4) Dari data tentang pemakaian bahasa dalam rapat di daerah Madiun ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian BI dapat dilukiskan dalam diagram sebagai berikut.

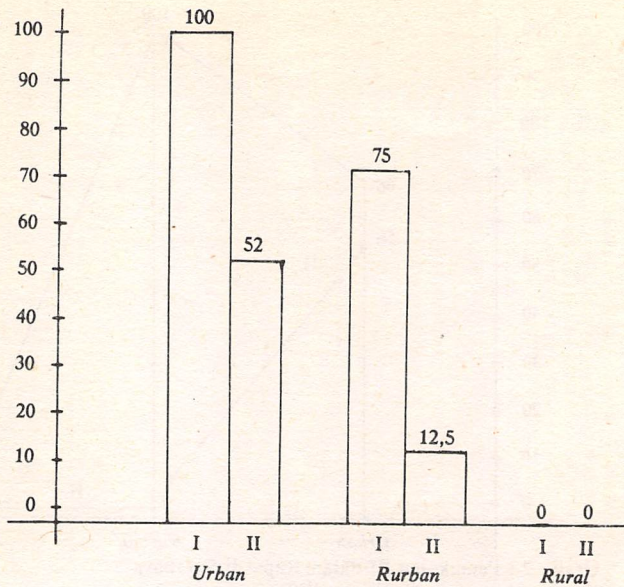


Diagram 6 : Pemakaian BI dalam Rapat di Madiun.

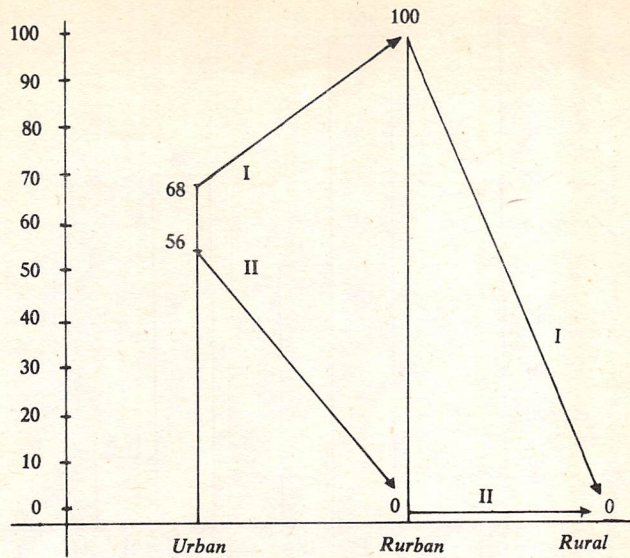
Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

5) Kesimpulan Sementara

Dari hasil analisis data daerah Madiun ini dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut:

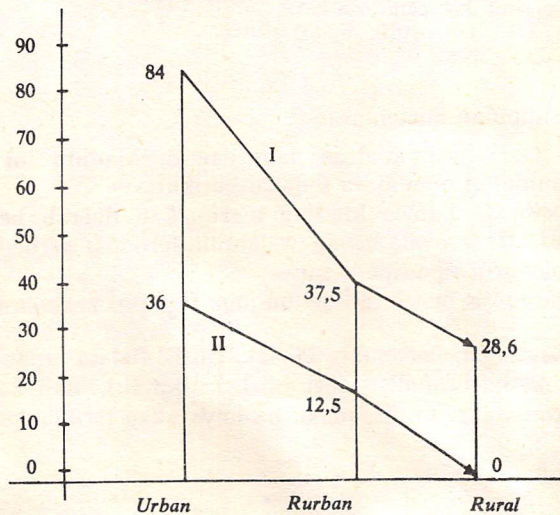
- a) asumsi bahwa Madiun merupakan daerah bertipe bilingual BJ - BI ternyata benar, walaupun terdapat perbedaan bertingkat menurut tipe-tipe desanya;
 - b) hipotesis penelitian belum juga terbukti kebenarannya.
- d. Perbandingan Persentase Pemakaian BI dalam rapat di Jawa Timur
- Jika hasil analisis dari 4.3.1a), 4.3.1b), dan 4.3.1c) dibandingkan secara grafis, maka hasilnya akan terlihat sebagai di bawah ini :



Grafik 2 : Pemakaian BI dalam Rapat di Surabaya

Keterangan : I = partisipan PFD

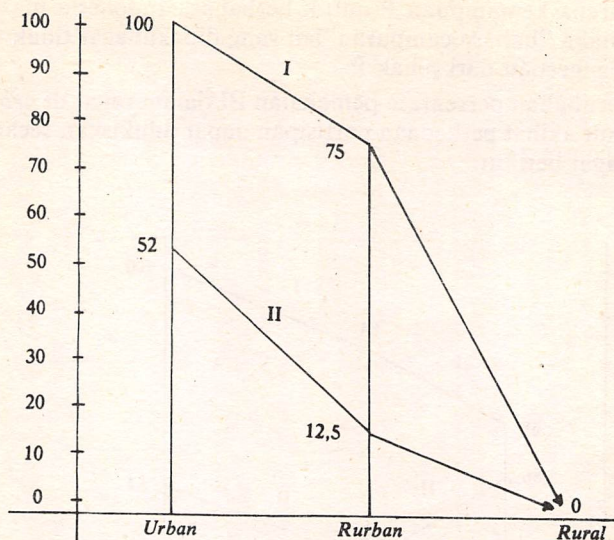
II = partisipan PFD + P



Grafik 3 : Pemakaian BI dalam Rapat di Jember.

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P



Grafik 4 : Pemakaian BI dalam Rapat di Madiun

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

e. Pemakaian BI dalam Rapat di *Urban* Jawa Timur

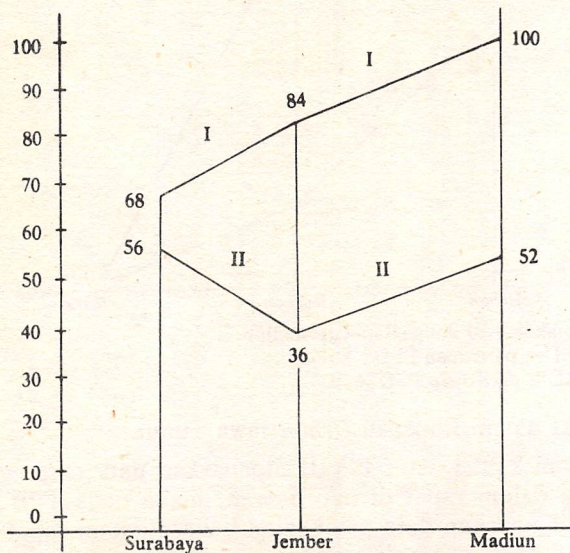
Jika dalam TPP I — TPP III dipaparkan data tentang pemakaian bahasa dalam rapat di tiap daerah, maka pada TPP IV — TPP VI ini dipaparkan data pemakaian bahasa dalam rapat di tiap jenis desa dari daerah Jawa Timur.

Data tentang pemakaian BI dalam rapat di *urban* Jawa Timur yang tercantum dalam TPP IV dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Di desa *urban* ketiga daerah (Surabaya, Jember, Madiun) pada umumnya BI lebih banyak dipakai daripada BD "murni" atau "bahasa campuran" (BI + BJ, BI + BM, BI + BJ + BM); BD yang dipakai secara "murni" dalam rapat hanya terdapat di daerah Jember, yaitu BJ dan BM;
Di ketiga daerah, "bahasa campuran" yang dipakai adalah BI + BJ. Di Jember, selain BI + BJ dipakai juga BI + BM dan BI + BJ + BM;
- 2) BI secara "murni" lebih banyak dipakai jika partisipannya PFD. Tetapi jika P ikut partisipan, persentase pemakaian BI itu menurun, sehingga persentase pemakaian BD "murni" (untuk Jember) atau "bahasa campuran" naik. Kasus ini merupakan petunjuk adanya usaha PFD untuk sebanyak-banyaknya mempergunakan BI, te-

tapi karena kemampuan P untuk berbahasa Indonesia masih kurang, maka "bahasa campuran"lah yang dipakai agar tidak terjadi salah pengertian dari pihak P.

Pola perubahan persentase pemakaian BI dalam rapat di *urban* Jawa Timur akibat perbedaan partisipan dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 5 : Perubahan Pemakaian BI dalam Rapat di *Urban* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

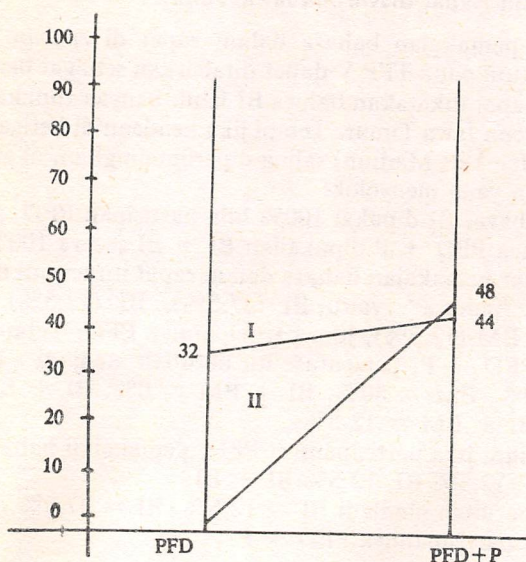
Dari grafik itu terlihat bahwa "jarak" persentase antara I dan II berbeda di tiap daerah. "Jarak" yang paling pendek adalah Surabaya, yaitu $68 - 56 = 12$.

Di Jember dan Madiun "jarak" itu sama, yaitu masing-masing 48. (Jember $84 - 36 = 48$, Madiun $100 - 52 = 48$).

"Jarak" persentase ini tentunya merupakan petunjuk bahwa partisipan P di Surabaya lebih mampu berbahasa Indonesia daripada di Jember dan di Madiun. Akan tetapi usaha PFD di Madiun untuk berusaha menggunakan BI dalam domain pemerintahan desa, khususnya dalam rapat, paling berhasil daripada Jember maupun Surabaya.

Pada nomor 4.3.1e.1) telah disebut bahwa BI + BJ dipakai di ketiga daerah (Surabaya, Jember, Madiun). Persentase pemakaian BI + BJ ini yang paling tinggi adalah di Madiun, yaitu 48% jika partisipannya PFD + P. Di Surabaya 44%, dan di Jember paling rendah, yaitu hanya 4%. Di Jember, di samping BI + BJ dipakai juga BI + BM dan BI + BJ + BM. Kedua "bahasa campuran" terakhir ini tak pernah dipakai di daerah Surabaya dan Madiun.

Tentang pemakaian BI + BJ dalam rapat di *urban* ini yang perlu dibandingkan adalah pemakaiannya di Surabaya dan Madiun. Pola perubahan persentase pemakaian BI + BJ akibat perubahan partisipan itu untuk kedua daerah tersebut dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 6 : Pemakaian BI + BJ dalam Rapat di *Urban* Jawa Timur

Keterangan : I = Surabaya

II = Madiun

Dari grafik itu dapat ditafsirkan bahwa agaknya para PFD Surabaya merasa lebih bebas untuk mempergunakan BI + BJ daripada PFD daerah Madiun, mengingat bahwa perbedaan persentase BI + BJ akibat perbedaan partisipan hanya 12% (44 — 32). Di Madiun perbedaan itu sangat menyolok, yaitu 48% (48 — 0). Hal itu meru-

pakan petunjuk bahwa perbedaan kemampuan berbahasa Indonesia antara PFD dan P cukup besar, atau dengan kata lain : P di *urban* Madiun masih rendah kemampuannya untuk berbahasa Indonesia. Tentang pemakaian BM dan BI + BM atau BI + BJ + BM dalam rapat telah diuraikan di atas. Bahasa itu hanya dipergunakan di Jember, sedangkan di Surabaya tidak, padahal di Surabaya tentunya terdapat cukup banyak penduduk yang merupakan penutur asli BM.

Untuk menjelaskan kasus itu tentu diperlukan penelitian tersendiri tentang *sikap kebahasaan (language attitude)* atau *kesetiaan bahasa (language loyalty)* penutur-penutur asli BM di kedua daerah tersebut.

f. Pemakaian BI dalam Rapat di *Rurban* Jawa Timur

Data tentang pemakaian bahasa dalam rapat di *rurban* Jawa Timur yang tercantum pada TPP V dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Secara umum dapat dikatakan bahwa BI lebih banyak dipakai dalam rapat di *rurban* Jawa Timur. Tetapi jika keadaan di ketiga daerah (Surabaya, Jember, Madiun) saling diperbandingkan, akan terdapat perbedaan yang menyolok;

Di *rurban* Surabaya, BI dipakai 100% bila partisipan PFD, tetapi jika partisipannya PFD + P dipakailah BI + BJ secara 100%;

Di *rurban* Jember pemakaian bahasa dalam rapat itu terjadi dalam empat macam "bahasa", yaitu BI (37,5%), BJ (12,5%), BM (37,5%), BI + BM (12,5%), jika partisipannya PFD. Tetapi jika partisipannya PFD + P, persentase itu berubah menjadi : BI = 12,5%, BJ = 0%, BM = 50%, BI + BM = 0%, BJ + BM = 12,5%, BI + BJ + BM = 12,5%;

Di *rurban* Madiun, jika partisipannya PFD, pemakaian bahasa itu adalah 75% BI, 12,5% BJ, 12,5% BI + BJ.

Persentase itu berubah menjadi BI = 12,5%, BJ = 37,5%, BI + BJ = 50% jika partisipannya PFD + P.

- 2) Dari kasus-kasus di atas dapat diuraikan beberapa hal yang menarik.

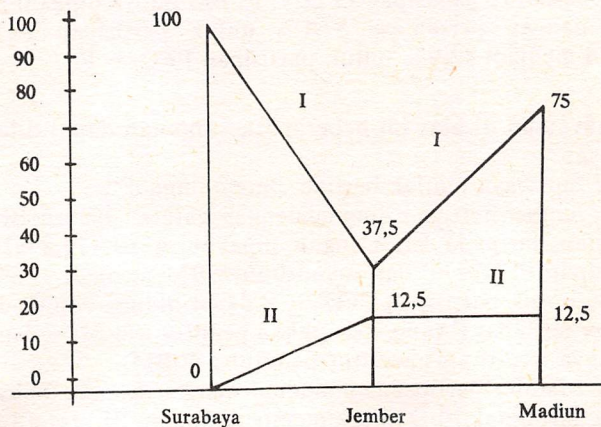
Dengan dipakainya BI + BJ oleh PFD *rurban* Surabaya secara 100% di dalam rapat yang dihadiri juga oleh P merupakan petunjuk bahwa dari pihak P ada keinginan besar untuk mempergunakan BI dalam domain pemerintahan desa, akan tetapi kemampuan berbahasa Indonesianya belum baik. Sebaliknya dari pihak PFD terdapat kecenderungan untuk berusaha agar P tidak merasa "asing", sehingga dipakailah BI + BJ. Agaknya PFD *rurban* Surabaya tidak segan-segan meninggalkan pemakaian BI "murni" demi berhasil-

nya komunikasi mereka dengan P.

Dengan tidak dipakainya BJ jika menghadapi partisipan PFD + P di *rurban* Jember ini, agaknya merupakan petunjuk bahwa sebagian besar penduduk *rurban* Jember adalah penutur-penutur asli BM.

Dengan pemakaian BI + BJ yang persentasenya cukup tinggi, yaitu 50% di *rurban* Madiun, agaknya juga merupakan petunjuk bahwa para PFD menampakkan usaha untuk mempergunakan BI dalam domain pemerintahan desa. Karena kurangnya kemampuan P untuk ber-BI "murni", demi komunikasi tercapai, maka dipergunakanlah BI + BJ.

- 3) Pola perubahan persentase pemakaian BI di *rurban* Jawa Timur berdasarkan perubahan partisipan itu dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 7 : Pemakaian BI di *Rurban* Jawa Timur.

Keterangan : I = partisipan PFD

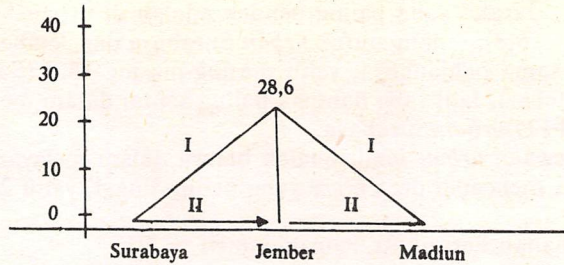
II = partisipan PFD + P

Dari grafik itu dapat dilihat bahwa "jarak" persentase antara I dan II berbeda-beda. "Jarak" persentase itu agaknya merupakan petunjuk "jarak" tingkat pendidikan antara PFD dan P. Jika dugaan itu benar, tentulah tingkat pendidikan (sekurang-kurangnya tentang kemampuan berbahasa Indonesia) antara PFD dan P di *rurban* Jember tidak jauh berbeda, di Madiun agak jauh berbeda dan di Surabaya amat jauh berbeda.

g. Pemakaian BI dalam Rapat di *Rural* Jawa Timur

Beberapa masalah yang tampak menonjol dari TPP VI dapat diuraikan sebagai berikut : -

- 1) Dalam rapat-rapat di *rural* Jawa Timur terasa sekali bahwa pemakaian BD lah yang paling sering, baik dengan partisipan PFD maupun dengan partisipan PFD + P. Pemakaian BI hanya terlihat di *rural* Jember dengan persentase yang amat rendah (28,6%), jika partisipannya PFD. Pemakaian BI + BJ hanya terlihat di *rural* Madiun dengan persentase 42,9% untuk partisipan PFD dan 14,1% untuk partisipan PFD + P. Pemakaian BJ secara mutlak terlihat di *rural* Surabaya, baik untuk partisipan PFD maupun partisipan PFD + P. Di *rural* Jember pemakaian BJ hanya terdapat 14,2% untuk partisipan PFD + P, sedang untuk partisipan PFD 0%. Di *rural* Madiun terjadi perbedaan persentase pemakaian BJ, yaitu 57,1% untuk partisipan PFD dan naik menjadi 85,9% untuk partisipan PFD + P. BM hanya dipakai di *rural* Jember dengan persentase 57,1% untuk partisipan PFD dan menurun menjadi 42,9% untuk partisipan PFD + P.
- 2) Dari kenyataan di atas ini beberapa kesimpulan dapat ditarik, di antaranya:
 - a) *Rural* Surabaya mutlak bertipe "mono-lingual";
 - b) *Rural* Jember bertipe trilingual dengan catatan bahwa BM lebih dominan daripada BJ. Dengan dipakainya BJ (14,2%) untuk partisipan PFD + P dan menurunnya BM menjadi 42,9% dari 57,1% untuk partisipan PFD + P dapat diduga bahwa di *rural* Jember terdapat P yang merupakan penutur asli BJ, sedang para PFD nya terdiri atas penutur-penutur asli BM;
 - c) *Rural* Madiun bertipe monolingual dengan catatan bahwa ada usaha dari pihak PFD untuk mempergunakan BI. Tetapi karena kemampuan P untuk memahami BI masih sangat kecil, maka dipakailah BI yang "dicampuri" BJ demi kelancaran komunikasi antara PFD dan P.
- 3) Secara grafis, pemakaian BI dalam rapat di *rural* Jawa Timur itu terlihat sebagai berikut:



Grafik 8 : Pemakaian BI dalam Rapat di *Rural* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan PFD

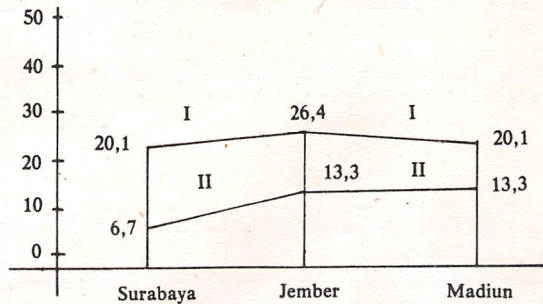
II = partisipan PFD + P

4.3.2 Pemakaian BI dalam Pelayanan

a. Pemakaian BI dalam Pelayanan di *Urban* Jawa Timur

Dengan variabel-variabel tetap sebagai yang terlihat pada TPP VII dan kenyataan pemakaian bahasanya tampak jelas bahwa variabel *perbedaan jumlah partisipan* berpengaruh terhadap pemakaian bahasa. Pola perubahan persentase pemakaian bahasa akibat perubahan jumlah partisipan dapat dilukiskan sebagai berikut :

1) Perubahan persentase Pemakaian BI



Grafik 9 : Pemakaian BI dalam Pelayanan di *Urban* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan 2 orang P (P2)

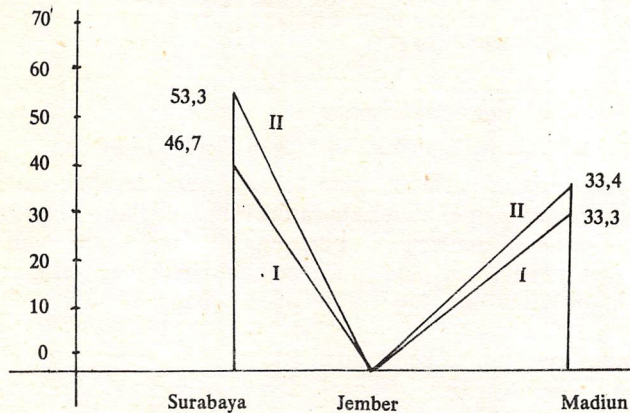
II = partisipan 1 orang P (P1)

Dari grafik itu tampak jelas lagi bahwa PFD *urban* Madiun secara sadar berusaha untuk mempergunakan BI dalam domain pemerintahan desa. Hal itu terlihat pada "jarak" persentase antara P2

dan P1. "Jarak" yang paling pendek adalah di urban Madiun ($20,1 - 13,3 = 6,8$), sedang untuk *urban* Surabaya dan Jember "jarak" itu hampir sama panjangnya, yaitu masing-masing 13,4 (Surabaya) dan 13,1 (Jember). Jadi yang nampak paling santai dalam menghadapi P1 adalah PFD *urban* Surabaya.

Keistimewaan *urban* Jember ialah bahwa dalam melayani P2, pemakaian BI mencapai persentase yang paling tinggi, yaitu 26,4%.

2) Perubahan Persentase Pemakaian BI + BJ



Grafik 10 : Pemakaian BI + BJ dalam Pelayanan di *Urban* Jawa Timur

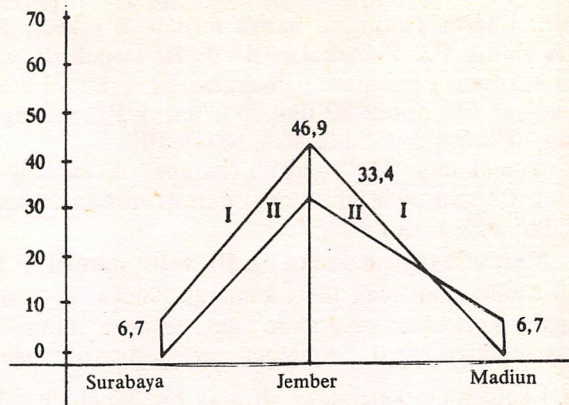
Keterangan : I = partisipan P2

II = partisipan P1

Dari grafik ini tampak bahwa di *urban* Jember BI + BJ tak pernah dipakai dalam melayani P.

Di *urban* Surabaya dan Madiun terlihat lagi perbedaan sikap PFD dalam melayani P. Sikap itu tampak pada "jarak" antara P2 dan P1. Karena jarak antara P2 dan P1 di *urban* Surabaya jauh lebih besar (6,6%) daripada di *urban* Madiun (0,1%), maka dalam melayani P1 PFD *urban* Surabaya itu merasa lebih santai daripada PFD *urban* Madiun.

3) Perubahan Persentase Pemakaian BJ



Grafik 11 : Pemakaian BJ dalam Pelayanan di Jawa Timur

Keterangan : I = partisipasi P2

II = partisipasi P1

Perbandingan persentase pemakaian BJ untuk melayani P ini memperlihatkan gejala yang agak aneh. P2 diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih formal daripada P1, sehingga akan dipakai pula bahasa yang bersifat resmi. Pemakaian BJ dalam masyarakat Jawa atau dalam "kelompok etnis Jawa" di mana pun berada tentulah dianggap penciptaan suasana yang santai (informal) daripada pemakaian bahasa lain. Jadi, perbandingan persentase pemakaian BJ seperti : $P2 : P1 = 6,7 : 0$ (Surabaya), $46,9 : 33,4$ (Jember) agaknya terbalik. Terbaliknya perbandingan yang menyebabkan kaitan dengan masalah resmi/tidak resmi itu barangkali disebabkan oleh tidak dapat diperhitungkannya variabel X, yaitu bergantung siapa P1.

Perbandingan persentase yang sesuai dengan masalah keresmian ini agaknya seperti yang diperlihatkan oleh *urban* Madiun, yaitu $P2 : P1 = 0 : 6,7$ atau perbandingan lain asal $P2 < P1$.

Yang paling menarik dari grafik di atas adalah persentase pemakaian BJ yang cukup tinggi, baik bagi P2 (46,9%) maupun bagi P1 (33,4%), sedangkan pemakaian BM, baik untuk P2 maupun P1 0%, dan pemakaian BI + BM hanya terdapat 6,7% untuk P2 dan 0% untuk P1. Kenyataan ini memperkuat kesimpulan (lihat kesimpulan 4.3.1 (2) (e)) bahwa *urban* Jember bertipe trilingual dengan BJ lebih dominan daripada BM.

b. Pemakaian BI dalam Pelayanan di *rurban* Jawa Timur

- 1) Dari TPP VIII ternyata bahwa pemakaian BI untuk melayani P di *Rurban* Jawa Timur itu hanya terjadi di *rurban* Surabaya, yaitu 20% untuk P2. Pemakaian BI + BJ terjadi di *rurban* Surabaya dan Madiun. Persentase pemakaian BI + BJ ini di *rurban* Surabaya adalah 0% untuk P2 dan 20% untuk P1, sedang di *rurban* Madiun 20% untuk P2 dan 40% untuk P1.

Pemakaian BJ "murni" terdapat di *rurban* Madiun (40% untuk P2 dan 60% untuk P1) dan di *rurban* Jember (40% untuk P2 dan 20% untuk P1).

Merosotnya pemakaian BI, BI + BJ, dan BI + BM ini barangkali disebabkan oleh jenis kegiatan pelayanan, yang tentunya dianggap kurang menciptakan suasana resmi dibandingkan dengan jenis kegiatan rapat, sehingga mempengaruhi pemilihan bahasa.

- 2) Dari kenyataan-kenyataan di atas itu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Perbandingan persentase pemakaian BI dan BI + BJ di *rurban* Surabaya dalam pelayanan ini sesuai dengan pemakaiannya dalam rapat. Jika dalam rapat perbandingan itu 100 : 100, di sini 20 : 20. Jadi, kesimpulannya pun sama pula, yaitu tampak adanya usaha PFD *rurban* Surabaya untuk mempergunakan BI dalam domain kedinasan. "Dicampurinya" BI dengan BJ itu semata-mata demi kepentingan komunikasi, karena P belum mampu berbahasa Indonesia secara baik;
 - b) Perbandingan persentase pemakaian BI + BJ di *rurban* Madiun yaitu $P2 : P1 = 20 : 40$ menampakkan lagi gejala bahwa para PFD *rurban* Madiun cukup sadar akan tingkat keresmian BI + BJ, sehingga makin kurang resmi makin tinggi persentase pemakaiannya. Perbandingan semacam itu tampak lagi di dalam pemakaian BJ, yaitu $P2 : P1 = 40 : 60$;
 - c) Di *rurban* Jember persentase pemakaian BJ, yaitu $P2 : P1 = 40 : 0$, serta persentase pemakaian BM, yaitu $P2 : P1 = 40 : 20$, mungkin merupakan petunjuk bahwa BJ mempunyai tingkat keresmian yang lebih tinggi daripada BM. Tetapi anggapan ini barangkali dapat ditolak oleh variabel X yang cukup tinggi untuk P1 (80%), sebab X ini mungkin dapat BJ mungkin dapat BM. Selain itu, situasi pemakaian bahasa dalam pelayanan di *rurban* Jember memperkuat lagi kesimpulan (lihat 4.3.1 (2)(e)) bahwa *rurban* Jember merupakan daerah bertipe trilingual dengan BM sebagai bahasa yang dominan, atau sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli BM.

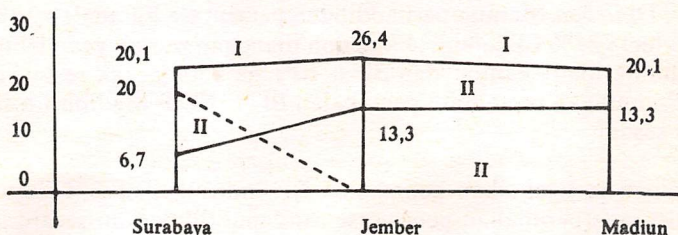
c. Pemakaian BI dalam Pelayanan di *Rural* Jawa Timur.

Dari TPP IX dapat dilihat dengan jelas bahwa untuk melayani P tidak pernah dipakai BI. Ini mudah diduga. Jika di dalam rapat saja BI tak pernah dipakai (kecuali *rural* Jember dengan persentase 28,6%), apalagi di dalam pelayanan yang tingkat keresmiannya lebih rendah daripada rapat.

Dalam tabel itu terlihat jelas tipe masyarakat *rural* masing-masing. Barangkali untuk *rural* Surabaya dan Madiun dapat disebut 'tipe kejawaan', karena di kedua *rural* dipakai BJ 100%, baik untuk P2 maupun untuk P1, sedang *rural* Jember dapat disebut 'tipe kemaduraan', karena mempergunakan BM dengan persentase 50% untuk P2 dan 75% untuk P1. Khusus untuk *rural* Jember ini masih terdapat variabel X yang mungkin dapat BM atau BJ, bahkan mungkin BI, yakni yang dapat mengubah persentasenya.

d. Perbandingan Persentase Pemakaian BI dalam Pelayanan di Jawa Timur

Analisis pemakaian BI untuk melayani P di Jawa Timur ini (a, b, dan c) dapat dibandingkan secara grafis sebagai berikut (hanya *urban* dan *rurban*).



Grafik 12 : Pemakaian BI dalam Pelayanan di Jawa Timur.

Keterangan : I = partisipan P2

II = partisipan P1

— = desa *Urban*

- - - = desa *Rurban*

4.3.3 Pemakaian BI dalam Perjumpaan

a. Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Urban* Jawa Timur

Dengan memperhatikan variabel tetap sebagai yang tercantum pada TPP X dan variabel penentu pemilihan bahasa, yaitu *lokasi*,

maka pemakaian BI di Urban Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pemakaian BI "murni"

Di *urban* daerah Jember, lokasi tidak mempengaruhi pemakaian BI. Baik di kantor maupun di jalan para PFD yang sedang bertemu muka dan mengadakan pembicaraan topik kedinasan yang tidak terencana sebelumnya mempergunakan BI sama persentase, yaitu 28%.

Di *urban* Surabaya dan Madiun, lokasi mempengaruhi persentase pemakaian BI sebagai bukti dapat dikemukakan persentase pemakaian BI di Surabaya mencapai 36% di kantor dan 28% di jalan, sedang di Madiun 80% di kantor dan 76% di jalan.

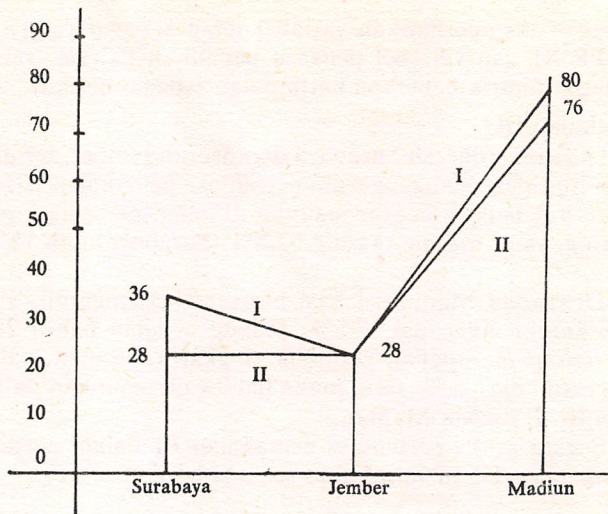
2) Pemakaian BI + BJ

Pola perubahan persentase pemakaian BI + BJ pun menunjukkan adanya keragaman. Di Surabaya dan Jember pola perubahan itu sama pula, yaitu persentase pemakaian BI + BJ di kantor lebih tinggi daripada di jalan. Di kantor dicapai 52% (Surabaya) dan 6% (Jember), sedang di jalan 44% (Surabaya) dan 4% (Jember). Jika BI + BJ dianggap mempunyai sifat tak resmi, maka perbandingan persentase itu tentulah terbalik.

Di *urban* Madiun perbandingan persentase itu adalah 16% (di kantor) : 24% (di jalan). Jika jalan dianggap *setting* yang lebih tak resmi daripada kantor, dan BI + BJ juga bersifat tak resmi, maka perbandingan persentase pemakaian BI + BJ di Madiun itu tentulah sesuai.

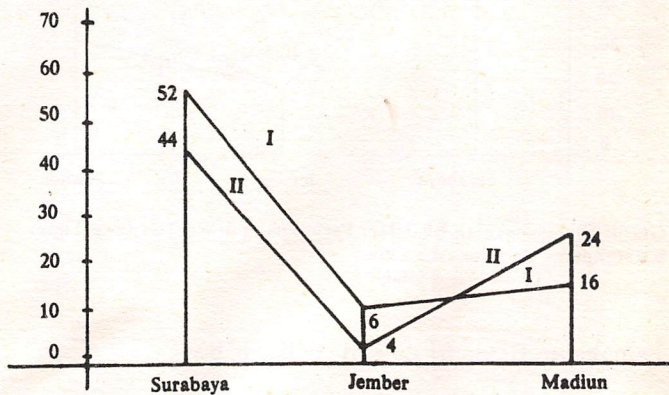
3) Dengan mengabaikan pemakaian BJ "murni" dan BM "murni", maka pola perubahan persentase itu dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

a) Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Urban*



Grafik 13 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Urban* Jawa Timur.
Keterangan : I = lokasi kantor
II = lokasi jalan

b) Pemakaian BI + BJ dalam Perjumpaan di *Urban*



Grafik 14 : Pemakaian BI + BJ dalam Perjumpaan di *Urban* Jawa Timur
Keterangan : I = lokasi kantor
II = lokasi jalan

b. Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Rurban* Jawa Timur

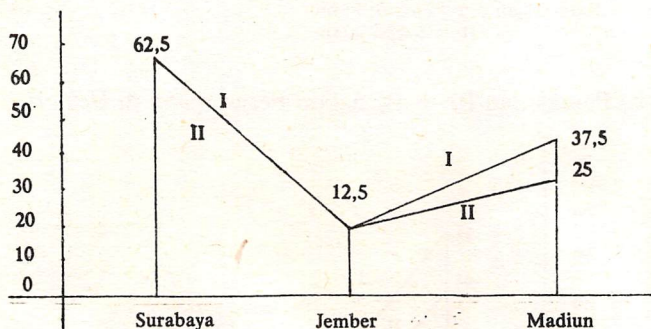
Dengan memperhatikan variabel tetap sebagai yang tercantum pada TPP XI dan variabel penentu pemilihan bahasa, yaitu *lokasi*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1) Pemakaian BI

Di *rurban* daerah Surabaya dan daerah Jember, terlihat bahwa lokasi itu tidak mempengaruhi persentase pemakaian BI. Di kedua *rurban* itu, baik di kantor maupun di jalan, persentase pemakaian BI sama, yaitu masing-masing 62,5% (Surabaya) dan 12,5% (Jember).

Di *rurban* Madiun, lokasi ternyata berpengaruh. Pemakaian BI di kantor mencapai 37,5%, sedang di jalan hanya 25%. Jadi, jika *setting* merupakan petunjuk tingkat keresmian, yaitu kantor lebih resmi daripada jalan, maka hal itu dicerminkan dalam pemakaian BI di *rurban* Madiun.

Secara grafis persentase pemakaian BI dalam perjumpaan di *rurban* Jawa Timur ini terlihat sebagai berikut.



Grafik 15 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Rurban* Jawa Timur

Keterangan : I = lokasi kantor

II = lokasi jalan

2) Pemakaian BI + BJ dan BI + BJ + BM

Pemakaian BI + BJ hanya terjadi di *rurban* Surabaya dan Madiun. Di Surabaya persentase pemakaian BI + BJ memperhatikan tingkat keresmian di kantor dan di jalan. Di kantor pema-

kaian BI + BJ mencapai 12,5%, sedang di jalan naik menjadi 50%.

Di Madiun pemakaian BI + BJ tidak memperlihatkan tingkat keresmian itu, karena terbukti bahwa persentase pemakaiannya sama, baik di kantor maupun di jalan, yaitu 25%.

Pemakaian BI + BJ + BM hanya terjadi di *rurban* Jember dengan persentase 12,5% di kantor dan 0% di jalan.

3) Pemakaian BD "murni"

Pemakaian BD "murni", yaitu BJ dan BM hanya terjadi di *rurban* Madiun dan Jember. Pemakaian BJ yang terjadi di Jember, baik di kantor maupun di jalan mencapai persentase sama, yaitu 25%. Di *rurban* Madiun persentase pemakaian BJ di kantor dan di jalan berbeda, masing-masing 37,5% dan 50%. Jika BJ merupakan cermin pemakaian bahasa yang kurang resmi, maka perbandingan persentase pemakaian BJ antara kantor dan jalan sebagai 37,5% : 50% atau 3 : 4 itu tentulah sesuai.

Pemakaian BM di *rurban* Jember memperlihatkan pola yang berlawanan dengan pemakaian BJ di *rurban* Madiun, yaitu 50% di kantor dan 37,5% di jalan.

Kasus ini barangkali dapat diterangkan melalui pengaruh "lingkungan". Di kantor barangkali terdapat banyak orang penutur asli BM, sedang di jalan akan terdapat orang-orang lain yang bukan penutur asli BM, sehingga pemakaian BM menurun.

4) Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Rural* Jawa Timur

Dari TPP XII ternyata bahwa pemakaian BI itu rupanya memang tak pernah muncul di desa-desa *rural* Jawa Timur. Dalam tabel ini terlihat jelas bahwa tidak saja tidak terpakainya BI atau "bahasa campuran", melainkan tampak juga bahwa lokasi tidak berpengaruh apa-apa terhadap pemakaian bahasa.

4.3.4 *Perbandingan Persentase Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Jalan*

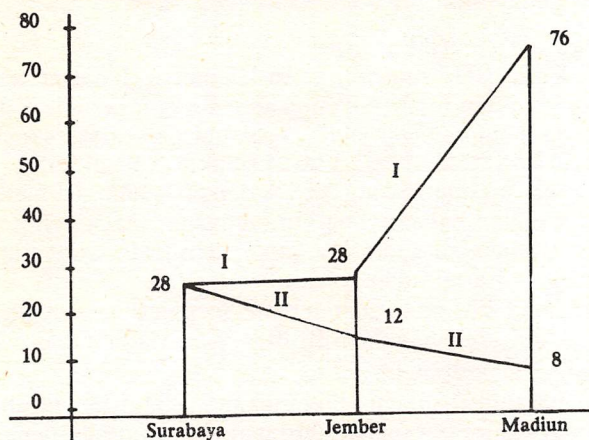
Data tentang sub bab ini belum di-TPP-kan. Analisis di bawah ini diangkat langsung dari TFPB, dengan variabel tetap :

- (1) pembicara : PFD,
- (2) *domain* : pemerintahan desa,
- (3) topik : kedinasan,
- (4) situasi : resmi,
- (5) lokasi : jalan,

dan variabel penentu pemilihan bahasa *partisipan* (PFD lawan P), maka dapat diperoleh deskripsi tentang perbandingan pemakaian BI sebagai berikut.

a. Di *Urban* Jawa Timur

Data tentang pemakaian BI yang termuat dalam TFPB Ia, IIa, dan IIIa dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 16 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Urban* Jawa Timur

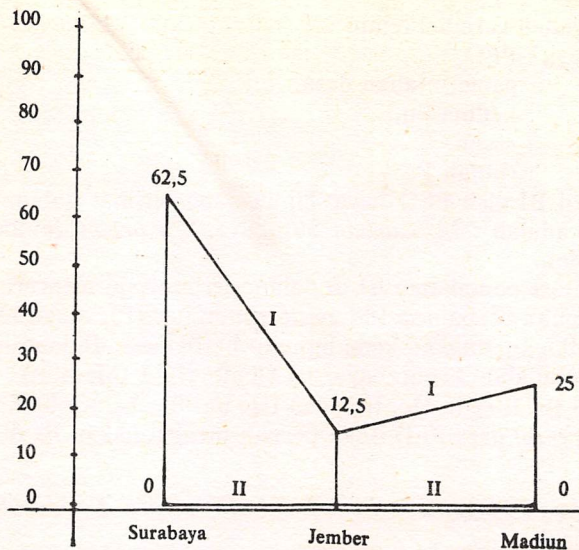
Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan P

Dari grafik itu terlihat bahwa perbedaan "jarak" persentase di ketiga daerah itu sangat jelas. Jika "jarak" itu ditafsirkan sebagai jarak tingkat pendidikan atau kemampuan berbahasa Indonesia, maka tingkat pendidikan PFD dan P di *urban* Surabaya itu sama, sedang di Jember dan Madiun berbeda. Perbedaan kemampuan berbahasa Indonesia antara PFD dan P di Jember tidak sejauh di Madiun, sebab di Jember hanya berselisih 16%, sedang Madiun 68%. Meskipun demikian, PFD *urban* Madiun sudah memperlihatkan usaha yang cukup tinggi untuk mempergunakan BI dalam topik kedinasan terhadap sesama PFD, sekalipun lokasinya di jalan.

b. Di *Rurban* Jawa Timur

Dari TFPB Ib, IIb, dan IIIb, data tentang perbandingan persentase pemakaian BI dalam perjumpaan di jalan dengan partisipan PFD vs. P itu dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 17 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Rurban* Jawa Timur
 Keterangan : I = partisipan PFD
 II = partisipan P

Situasi di *rurban* Surabaya ini agak terbalik dengan situasi *urbannya*. Jika di *urban* 'jarak' antara PFD dan P 0%, di *rurban* menjadi 62,5%. Tetapi usaha PFD *rurban* untuk mempergunakan BI lebih berhasil daripada di *urban*.

Di *rurban* Jember dan Madiun 'jarak' itu, bila dibandingkan dengan *urbannya* masing-masing, terlihat sesuai.

Dari ketiga *rurban* itu yang jelas sama ialah bahwa terhadap P tidak pernah dipakai BI.

c. Di Rural Jawa Timur

Dari TFPB Ic, IIC, dan IIIC jelas terlihat bahwa baik kepada sesama PFD maupun kepada P tidak pernah dipakai BI.

4.3.5 Pemakaian BI dalam Perintah

Data tentang pemakaian BI dalam Perintah ini tidak di-TPP-kan, karena tidak ada variabel pembandingan penentu pemilihan bahasa. Yang dimaksud *perintah* di sini ialah kegiatan PFD berkeliling mendatangi rumah-rumah P untuk memberi instruksi, misalnya tentang kerja bakti, jaga malam, atau untuk memberi informasi tertentu.

Dengan variabel-variabel tetap:

- (1) pembicara : PFD,
- (2) domain : pemerintahan desa,
- (3) topik : kedinasan,
- (4) situasi : resmi,
- (5) lokasi : rumah P,

maka pemakaian BI oleh PFD Jawa Timur yang terlihat dalam TFPB Ia, IIa, IIIa itu adalah : 24% *urban* Surabaya, 8% *urban* Jember dan 8% *urban* Madiun.

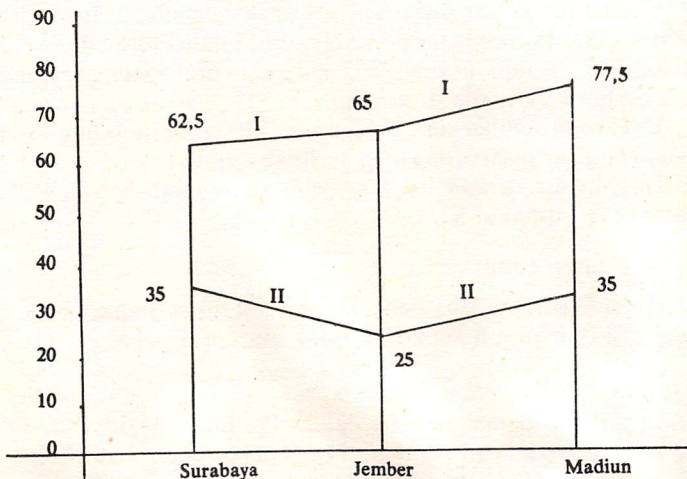
Jika persentase pemakaian BI di dalam perintah ini mencerminkan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia penduduk (P), maka terbukti bahwa perbandingan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia P di ketiga *urban* itu adalah 3 (Surabaya) : 1 (Jember) : 1 (Madiun).

Dari TFPB Ib, Ic, IIb, IIc, IIIb dan IIIc terlihat bahwa baik di *rurban* maupun di *rural* para PFD tidak pernah menggunakan BI di dalam perintah.

4.3.6 Perbandingan Persentase Pemakaian BI secara Keseluruhan di Tiga Daerah

Dengan membandingkan TFPB I, II, dan III, maka persentase pemakaian BI dari tiap jenis kegiatan dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

a. Pemakaian BI dalam Rapat



Grafik 18 : Perbandingan Pemakaian BI dalam Rapat di Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan PFD

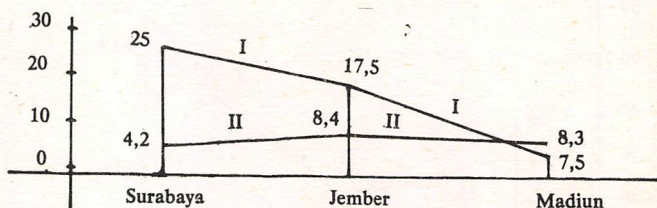
II = partisipan P

Dari grafik itu terlihat bahwa:

- 1) Pemakaian BI dalam rapat (suatu kegiatan yang paling tinggi tingkat kedinasan dan keresmiannya) di daerah Surabaya paling rendah, sedang Jember lebih tinggi daripada Surabaya dan Madiun yang paling tinggi.
- 2) Di ketiga daerah itu hipotesis belum terbukti kebenarannya.

b. Pemakaian BI dalam Pelayanan di Kantor

Dari TFPB I, II, dan III, persentase pemakaian BI di ketiga daerah untuk melayani penduduk dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 19: Pemakaian BI dalam Pelayanan di Kantor Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan P2

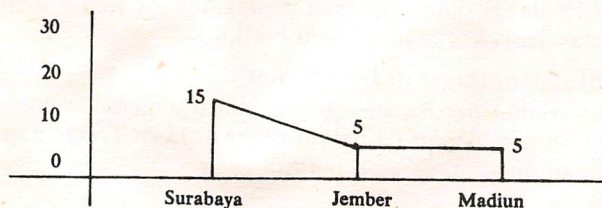
II = partisipan P1

Dari grafik ini terlihat bahwa pemakaian BI dalam pelayanan makin merosot dibandingkan dengan pemakaian dalam rapat. Yang aneh ialah bahwa "gerak" grafik itu berlawanan dengan "gerak" grafik pada rapat. Pemakaian dalam rapat "gerak" itu adalah Surabaya - Jember - Madiun (dari bawah ke atas), sedang di sini "gerak" itu berlawanan mutlak (khususnya untuk P2).

Di sini pun jelas bahwa hipotesis makin jauh dari kenyataan.

c. Pemakaian BI dalam Perintah

Grafik persentase pemakaian BI dalam perintah terlihat sebagai berikut.

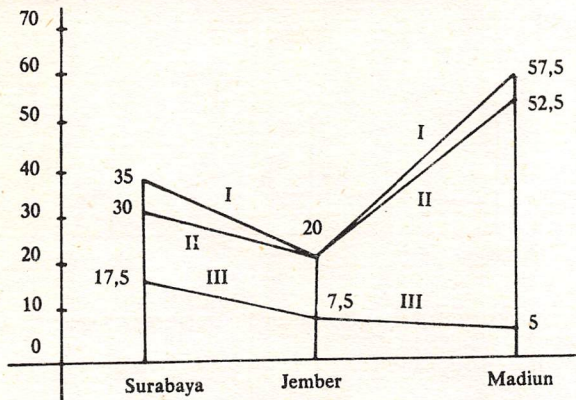


Grafik 20: Pemakaian BI dalam Perintah Di Jawa Timur

Pemakaian BI dalam perintah makin lebih rendah lagi daripada dalam pelayanan. Mungkin hal itu disebabkan variabel *setting* tempat, yaitu *kantor* lawan *rumah*. Di sini terlihat lagi bahwa Surabaya paling tinggi persentasenya. Hipotesis makin tak terbukti lagi kebenarannya.

d. Pemakaian BI dalam Perjumpaan

Dengan variabel penentu pemilihan bahasa yang terdiri atas partisipan dan *setting* tempat, persentase pemakaian BI di ketiga daerah dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.



Grafik 21: Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan PFD lokasi kantor
 II = partisipan PFD lokasi jalan
 III = partisipan P lokasi jalan

Dari grafik ini terlihat bahwa, baik lokasi jalan maupun kantor, jika partisipannya PFD, persentase pemakaian BI di Madiun paling tinggi, kemudian disusul Surabaya, dan yang terendah Jember.

Jika partisipan P dan lokasinya jalan, persentase yang paling tinggi adalah Surabaya, berturut-turut Jember dan Madiun.

4.3.7 Persentase Pemakaian BI secara Keseluruhan di Jawa Timur

Dari TFPB IV dapat dideskripsikan pemakaian BI secara menyeluruh dengan urutan jenis kegiatan sebagai berikut.

a. Pemakaian BI dalam Rapat di Jawa Timur

Dengan variabel partisipan sebagai penentu pemilihan bahasa, maka persentase pemakaian BI dalam rapat di Jawa Timur dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

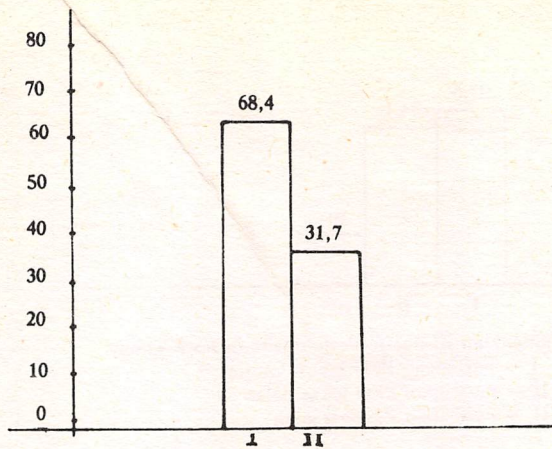


Diagram 7: Pemakaian BI dalam Rapat di Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan PFD

II = partisipan PFD+P

b. Pemakaian BI dalam Pelayanan di Jawa Timur

Dengan variabel penentu pemilihan bahasa dalam pelayanan terhadap P di kantor adalah jumlah partisipan, maka pemakaian BI itu dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

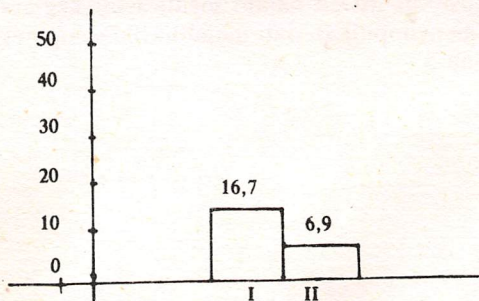


Diagram 8: Pemakaian BI dalam Pelayanan di Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan P2

II = partisipan P1

c. Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Jawa Timur

Dengan variabel pembeda *partisipan* dan *lokasi* pemakaian BI dalam Perjumpaan di Jawa Timur dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

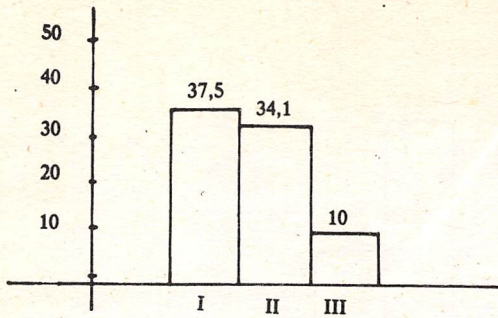


Diagram 9: Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan PFD lokasi kantor

II = partisipan PFD lokasi jalan

III = partisipan P lokasi jalan

d. Pemakaian BI dalam Perintah di Jawa Timur

Pemakaian BI dalam memberi perintah atau informasi kepada P dan lokasi di rumah P, maka persentase pemakaian BI hanya mencapai 8,3%.

Demikianlah analisis frekuensi pemakaian BI dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur secara umum.

Adapun hasil deskripsi kuantitatif dalam segala jenis kegiatan dan deskripsi kualitatif yang menyimpulkan dan membuktikan hipotesis dan asumsi diuraikan pada bab 5.

5. HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan khusus penelitian ini (lihat 1.3.2) dan hasil analisis data (lihat 4.3), maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan seperti di bawah ini.

5.1 Hasil Kuantitatif

Yang dimaksud hasil kuantitatif dalam buku ini adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang menyatakan persentase frekuensi pemakaian BI.

5.1.1 Berdasarkan TFPB I, II, III, dan IV, perbedaan persentase frekuensi pemakaian BI oleh para PFD dalam domain pemerintahan desa antara tiga daerah sampel dan hasil rata-rata seluruh Jawa Timur dideskripsikan dengan diagram-diagram : 10, 11, 12, 13, dan 14.

a. Pemakaian BI dalam Rapat

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) lokasi: kantor,
- (4) situasi : resmi.

dan variabel penentu pemilihan bahasa: partisipan (PFD atau PFD + P) maka persentase frekuensi pemakaian BI dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

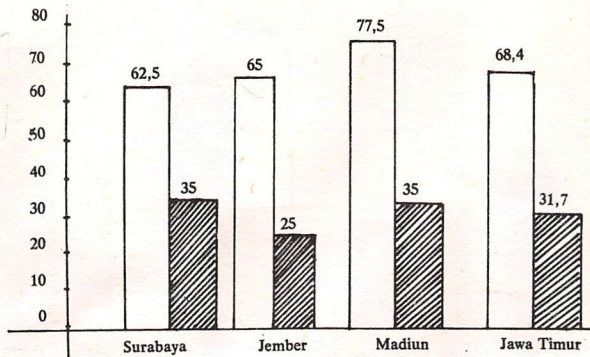


Diagram 10 : Pemakaian BI dalam Rapat secara Keseluruhan di Jawa Timur

Keterangan : □ = partisipan PFD

▨ = partisipan PFD + P

b. Pemakaian BI dalam Pelayanan

Dengan variabel tetap :

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan
- (3) lokasi : kantor
- (4) situasi : resmi

dan variabel penentu pemilihan bahasa: jumlah partisipan (P2 atau P1) maka persentase pemakaian bahasa Indonesia dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

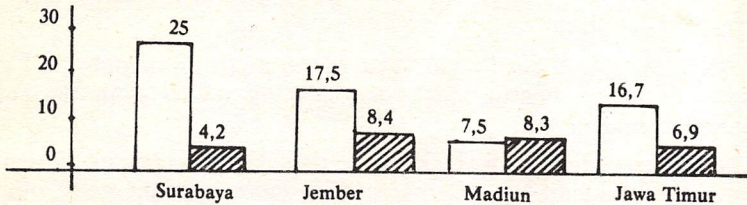


Diagram 11 : Pemakaian BI dalam Pelayanan secara Keseluruhan di Jawa Timur

Xeterangan : □ = partisipan P2
 ▨ = partisipan P1

c. Pemakaian BI dalam Perjumpaan

Dengan variabel tetap :

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan
- (3) partisipan : PFD
- (4) situasi : resmi

dan variabel penentu pemilihan bahasa: lokasi kantor atau jalan maka persentase pemakaian bahasa Indonesia dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

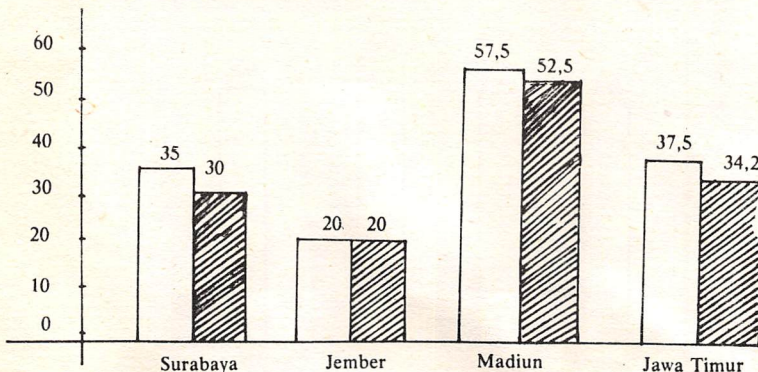


Diagram 12: Pemakaian BI dalam Perjumpaan secara Keseluruhan di Jawa Timur

Keterangan: □ = lokasi: kantor
 ▨ = lokasi: jalan

Dengan Variabel tetap b.

- (1) pembicara (O1) : PFD
- (2) topik : kedinasan
- (3) lokasi : jalan
- (4) situasi : resmi

dan variabel penentu pemilihan bahasa: partisipan (PFD atau P)
maka persentase frekuensi pemakaian bahasa Indonesia dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

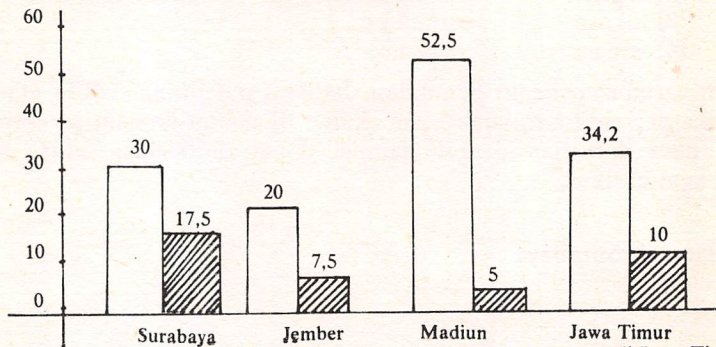


Diagram 13 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan secara Keseluruhan di Jawa Timur

Keterangan : □ = partisipan PFD

▨ = partisipan P

d. Pemakaian BI dalam Perintah

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara : PFD
- (2) topik : kedinasan
- (3) partisipan : P
- (4) lokasi : rumah P
- (5) situasi : resmi

dan variabel pembanding: tidak ada, maka persentase frekuensi pemakaian bahasa Indonesia dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

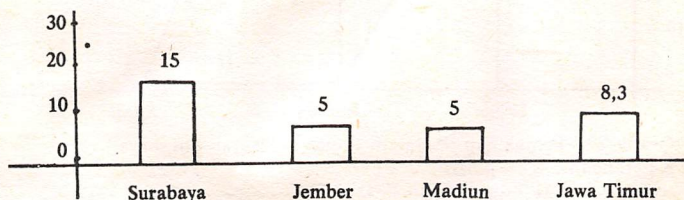


Diagram 14 : Pemakaian BI dalam Perintah secara Keseluruhan di Jawa Timur

5.1.2 Perbedaan persentase frekuensi pemakaian BI oleh para PFD dalam domain pemerintahan desa menurut jenis-jenis desa dari tiap daerah sampel, dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

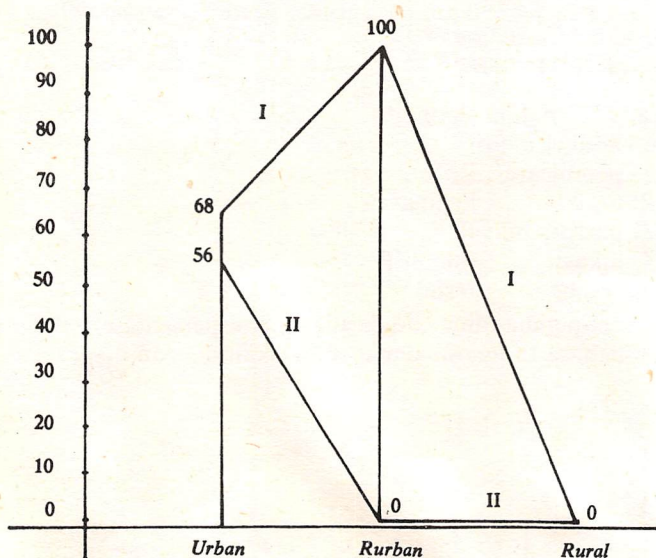
a. Pemakaian BI dalam Rapat

Dengan variabel tetap :

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) lokasi : kantor,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa: partisipan (PFD atau P), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam domain pemerintahan desa dari tiap daerah sampel dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Daerah Surabaya

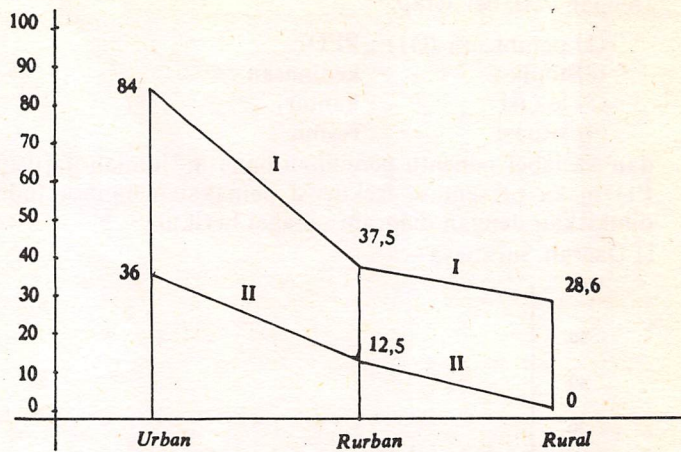


Grafik 22 : Pemakaian BI dalam Rapat di Daerah Surabaya

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

2) Daerah Jember

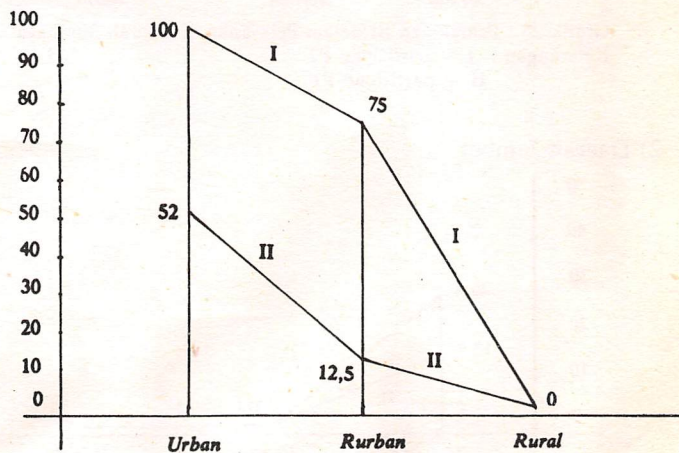


Grafik 23 : Pemakaian BI dalam Rapat di Daerah Jember

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

c) Daerah Madiun



Grafik 24 : Pemakaian BI dalam Rapat di Daerah Madiun

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

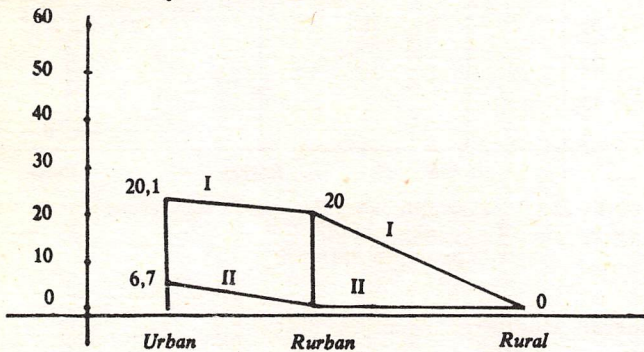
b. Pemakaian BI dalam Pelayanan

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) lokasi : kantor,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa: jumlah partisipan (P2 atau P1) maka persentase frekuensi pemakaian bahasa Indonesia dapat dilukiskan dengan diagram sebagai berikut.

1) Daerah Surabaya

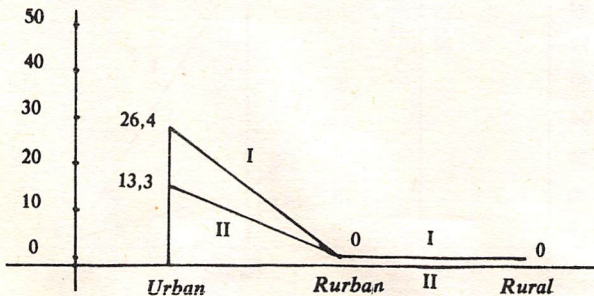


Grafik 25 : Pemakaian BI dalam Pelayanan di Daerah Surabaya

Keterangan : I = partisipan P2

II = partisipan P1

2) Daerah Jember

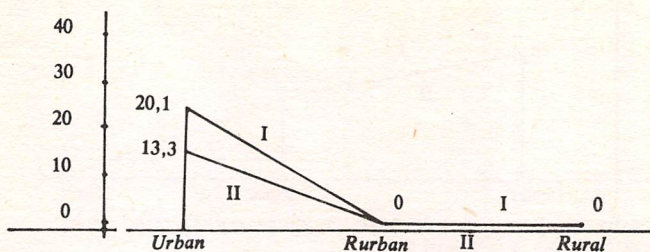


Grafik 26 : Pemakaian BI dalam Pelayanan di Daerah Jember

Keterangan : I = partisipan P2

II = partisipan P1

3) Daerah Madiun



Grafik 27: Pemakaian BI dalam Pelayanan di Daerah Madiun

Keterangan: I = partisipan P2

II = partisipan P1

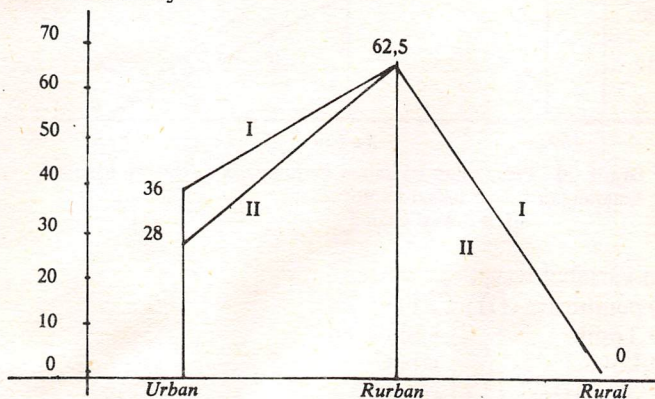
c. Pemakaian BI dalam Perjumpaan

Dengan variabel tetap :

- (1) pembicara (O1): PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) partisipan : PFD,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa: lokasi (kantor atau jalan), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam perjumpaan di tiap daerah sampel dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Daerah Surabaya

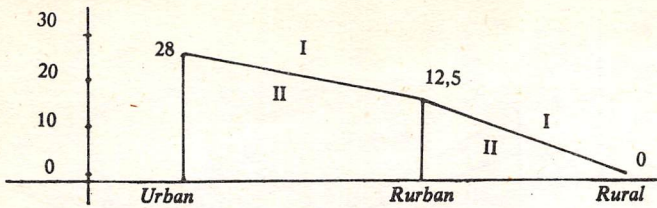


Grafik 28 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Daerah Surabaya

Keterangan : I = lokasi kantor

II = lokasi jalan

2) Daerah Jember

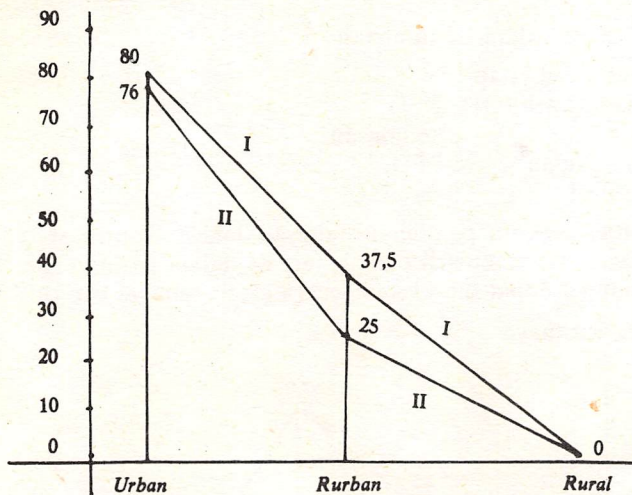


Grafik 29 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Daerah Jember

Keterangan : I = lokasi kantor

II = lokasi jalan

3) Daerah Madiun



Grafik 30 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Daerah Madiun

Keterangan : I = lokasi kantor

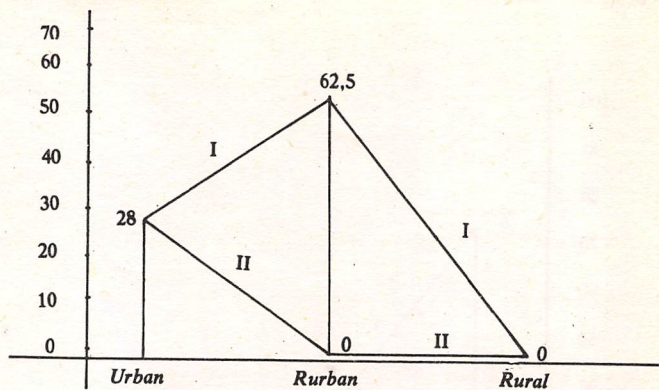
II = lokasi jalan

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) Topik : kedinasan,
- (3) Lokasi : jalan,
- (4) Situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa: partisipan (PFD atau P), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam perjumpaan di tiap daerah sampel adalah sebagai berikut.

1) Daerah Surabaya

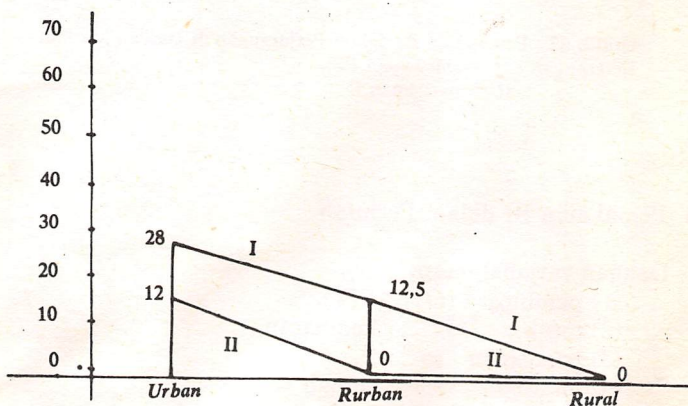


Grafik 31 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Daerah Surabaya

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan P

2) Daerah Jember

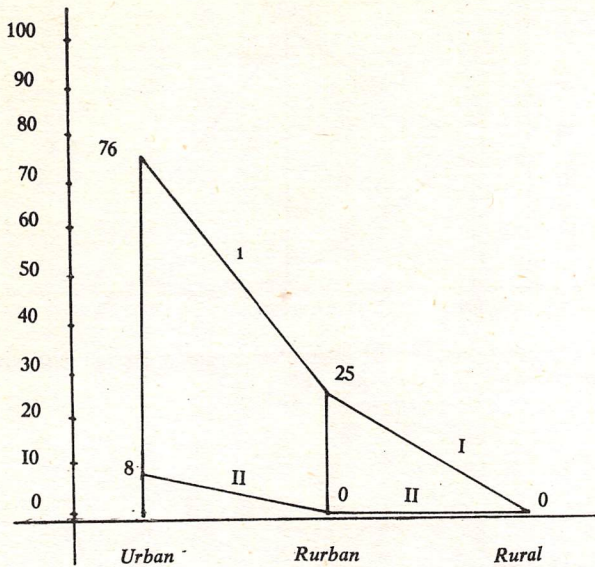


Grafik 32 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Daerah Jember

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan P

3) Daerah Madiun



Grafik 33 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di Daerah Madiun
 Keterangan : I = partisipan PFD
 II = partisipan P

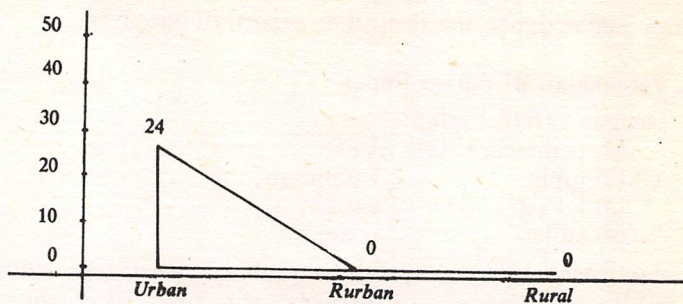
d. Pemakaian BI dalam Perintah

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) partisipan : P,
- (4) lokasi : rumah P,
- (5) situasi : resmi,

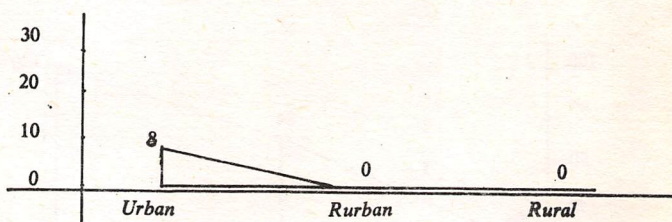
maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam perintah pada tiap daerah sampel dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Daerah Surabaya



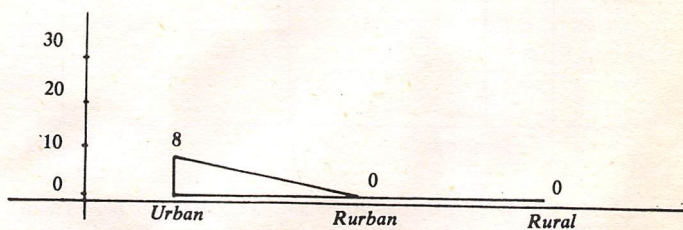
Grafik 34 : Pemakaian BI dalam Perintah di Daerah Surabaya

2) Daerah Jember



Grafik 35 : Pemakaian BI dalam Perintah di Daerah Jember

3) Daerah Madiun



Grafik 36 : Pemakaian BI dalam Perintah di Daerah Madiun

5.1.3 Perbandingan persentase frekuensi pemakaian BI oleh para PFD dalam domain pemerintahan desa di antara desa-desa sejenis di daerah Jawa Timur dapat dideskripsikan seperti di bawah ini.

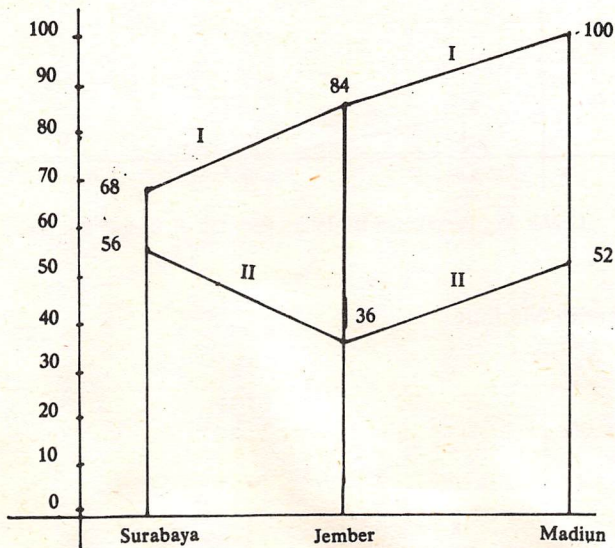
a. Pemakaian BI dalam Rapat

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD
- (2) topik : kedinasan,
- (3) lokasi : kantor,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa : *partisipan* (PFD atau PFD + P), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam rapat di tiap jenis desa di Jawa Timur dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Desa Urban Jawa Timur

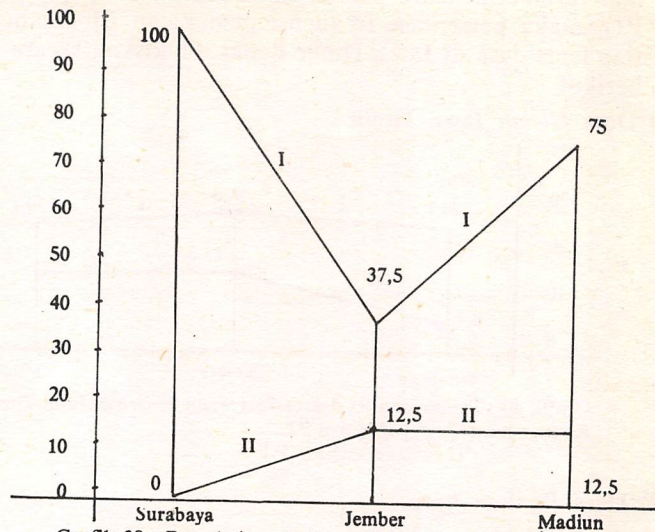


Grafik 37 : Pemakaian BI dalam Rapat di *Urban* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan PFD

II = partisipan PFD + P

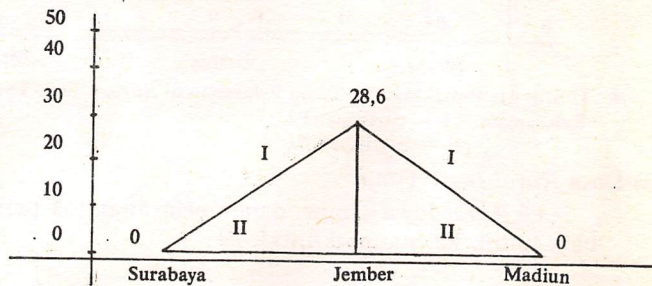
2) Desa *Rurban* Jawa Timur



Grafik 38 : Pemakaian BI dalam Rapat di *Rurban* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan PFD
II = partisipan PFD + P

3) Desa *Rural* Jawa Timur



Grafik 39 : Pemakaian BI dalam Rapat di *Rural* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan PFD
II = partisipan PFD + P

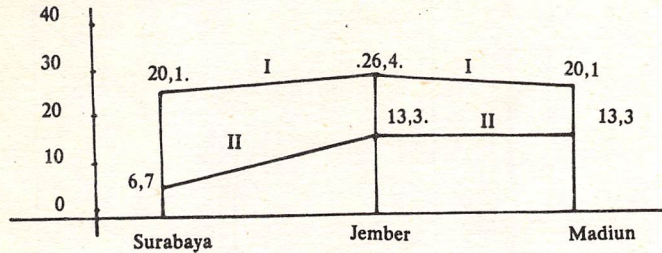
b. Pemakaian BI dalam Pelayanan

Dengan variabel tetap :

- (1) Pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) lokasi : kantor,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa: jumlah partisipan (P2 atau P1), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam pelayanan di tiap jenis desa di Jawa Timur dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

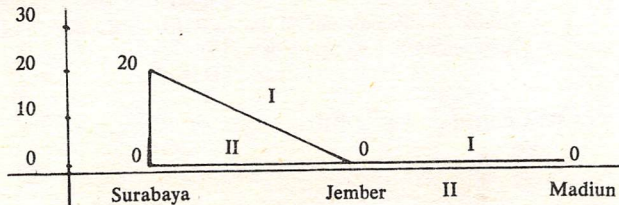
1) Desa *Urban* Jawa Timur



Grafik 40 : Pemakaian BI dalam Pelayanan di *Urban* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan P2
II = partisipan P1

2) Desa *Rurban* Jawa



Grafik 41: Pemakaian BI dalam Pelayanan di *Rurban* Jawa Timur

Keterangan : I = partisipan P2
II = partisipan P1

3) Desa *Rural* Jawa Timur

Di *Rural* Jawa Timur, dalam pelayanan tak pernah dipakai BI baik untuk P2 maupun untuk P1.

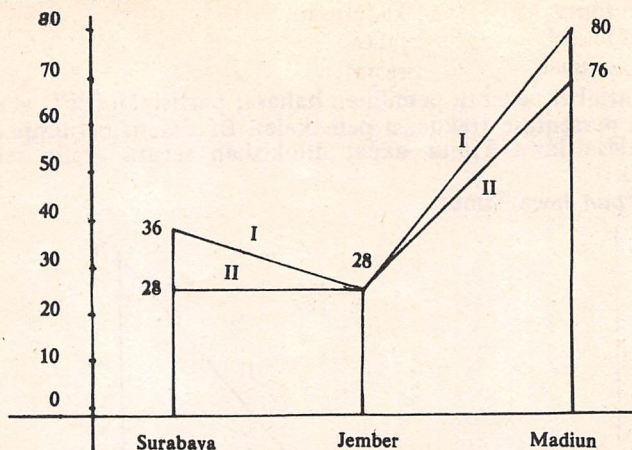
c. Pemakaian BI dalam Perjumpaan

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) partisipan : PFD,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa : Lokasi (kantor atau jalan), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam perjumpaan di tiap jenis desa Jawa Timur dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Desa *Urban* Jawa Timur

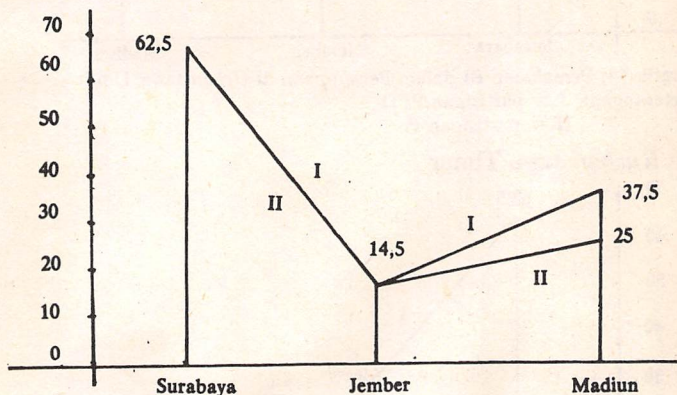


Grafik 42 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Urban* Jawa Timur

Keterangan : I = lokasi kantor

II = lokasi jalan

2) Desa *Rurban* Jawa Timur



Grafik 43 : Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Rurban* Jawa Timur

Keterangan : I = lokasi kantor

II = lokasi jalan

3) Desa *Rural* Jawa Timur

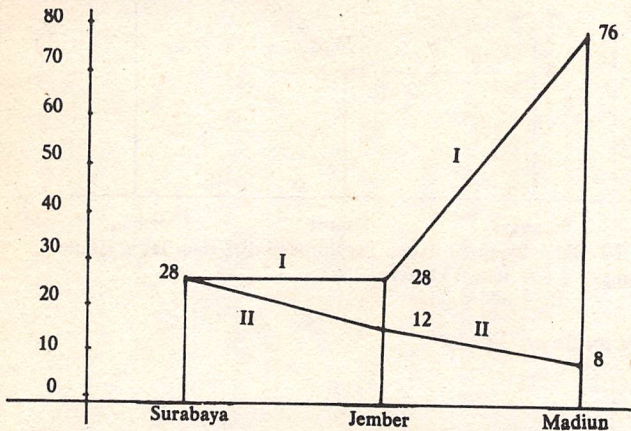
Di *Rural* Jawa Timur, dalam perjumpaan tak pernah dipakai BI baik di kantor maupun di jalan.

Dengan variabel tetap:

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) lokasi : jalan,
- (4) situasi : resmi,

dan variabel penentu pemilihan bahasa: partisipan (PFD atau P), maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam perjumpaan di tiap desa Jawa Timur dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Desa *Urban* Jawa Timur

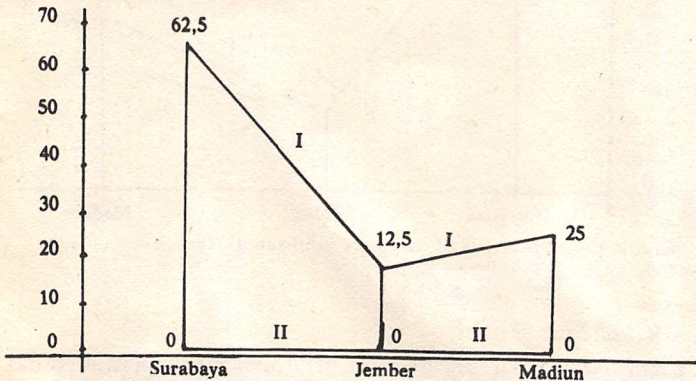


Grafik 44: Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Urban* Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan PFD

II = partisipan P

2) Desa *Rurban* Jawa Timur



Grafik 45: Pemakaian BI dalam Perjumpaan di *Rurban* Jawa Timur

Keterangan: I = partisipan PFD

II = partisipan P

3) Desa *Rural* Jawa Timur

Di *rural* Jawa Timur, dalam perjumpaan tak pernah dipakai BI baik dengan PFD maupun dengan P.

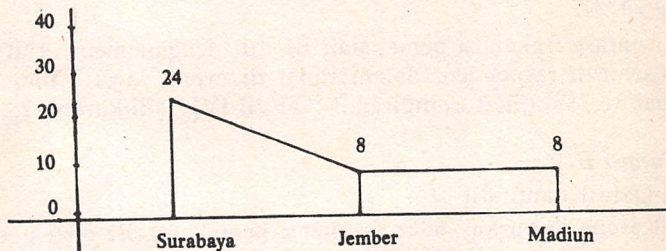
d. Pemakaian BI dalam Perintah

Dengan variabel tetap :

- (1) pembicara (O1) : PFD,
- (2) topik : kedinasan,
- (3) partisipan : P,
- (4) lokasi : rumah P,
- (5) situasi : resmi,

tanpa variabel pembeda, maka persentase frekuensi pemakaian BI dalam perintah di tiap jenis desa Jawa Timur dapat dilukiskan secara grafis sebagai berikut.

1) Desa *Urban* Jawa Timur



Grafik 46: Pemakaian BI dalam Perintah di *Urban* Jawa Timur

2) Desa *Rurban* Jawa Timur

Di *rurban* Jawa Timur, perintah kepada P tidak pernah diucapkan dengan BI.

3) Desa *Rural* Jawa Timur

Di *rural* Jawa Timur, perintah kepada P tak pernah diucapkan dengan BI.

5.2 Hasil Kualitatif

Yang dimaksud hasil kualitatif adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan, atau hasil interpretasi terhadap berbagai data baik data kuantitatif maupun data kualitatif.

Berbagai hasil kualitatif atau kesimpulan itu dilaporkan pada nomor-nomor di bawah ini.

5.2.1 Pembuktian Hipotesis

Dengan "ukuran" persentase frekuensi pemakaian BI oleh para PFD yang hanya 60% itu (lihat 1.3.2 (2)), maka hipotesis yang berbunyi: "Dalam *domain* pemerintahan desa, para PFD dari desa-desa daerah Jawa Timur, sebagai pembicara (orang pertama = O1), mempergunakan BI secara lisan, baik kepada sesama PFD maupun kepada P" (lihat 1.5) tidak terbukti kebenarannya, baik untuk tiap jenis desa (*urban*, *rurban*, *rural*) dari tiap daerah sampel maupun untuk seluruh Jawa Timur baik untuk tiap jenis kegiatan yang paling resmi (rapat) maupun untuk jenis kegiatan yang paling kurang resmi (perjumpaan).

Dengan anggapan bahwa *rapat* merupakan jenis kegiatan yang paling resmi dalam *domain* pemerintahan desa dan *urban* merupakan jenis desa yang penduduknya paling mampu ber-BI, "ukuran" 60% frekuensi pemakaian BI itu pun belum tercapai. Persentase yang mendekati 60% itu, secara berturut-turut adalah : *urban* Surabaya 56% (kurang 4%), *urban* Madiun 52% (kurang 8%), dan *urban* Jember 36% (kurang 24%).

Persentase frekuensi pemakaian BI itu, dengan memperhitungkan jumlah seluruh responden, dalam rapat di *urban* Jawa Timur, hanya mencapai 31,7% (lihat Lampiran 3 : TFPB IV); jadi kurang 28,3%.

5.2.2 Fungsi BI

a. Dari Data Kuantitatif

Karena "ukuran" 60% frekuensi pemakaian BI oleh para PFD dalam *domain* pemerintahan desa belum tercapai maka dapat disimpulkan bahwa BI dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur belum berfungsi.

Di sini dikatakan belum berfungsi, bukannya tidak berfungsi, karena syarat untuk membuat BI berfungsi dalam *domain* pemerintahan desa memang belum ada. Syarat itu ialah kemampuan P untuk berbahasa Indonesia. Seandainya P telah mampu ber-BI, tetapi dalam *domain* pemerintahan desa para PFD tidak mempergunakan BI, maka dapat disimpulkan bahwa BI tidak berfungsi dalam *domain* pemerintahan desa.

Mengingat bahwa jika rapat itu hanya dihadiri oleh PFD mencapai persentase yang cukup tinggi (melebihi ukuran 60%), yaitu: 62,5% (Surabaya), 65% (Jember), 77,5% (Madiun), dan 68,4% (Jawa Timur), maka dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya per-

sentase "ukuran" 60% atau tidak dipakainya BI dalam rapat yang juga dihadiri oleh P itu tentulah tidak disebabkan oleh sikap kebebasan yang negatif terhadap BI, melainkan oleh ketidak mampuan P untuk berbahasa Indonesia.

b. Dari Data Kualitatif

Dari data kualitatif, yang berupa pernyataan-pernyataan atau komentar responden tentang pemakaian BI, dapat dipaparkan beberapa hal yang bersangkutan-paut dengan fungsi BI tetapi tidak dalam kedudukannya sebagai bahasa negara.

Dari pernyataan seorang responden yang berbunyi: "Dalam berbicara dengan orang tua, misalnya dengan Pak Kyai, kami mempergunakan BM, karena kalau dengan BI tidak sopan". Di sini pemakaian BI dihubungkan dengan masalah kesopanan. Pernyataan ini sama dengan pernyataan mahasiswa Indonesia di Amerika yang berbunyi: "*Oh yes, we may speak Indonesian, but in speaking to our older relatives it is not so polite*" (lihat 2.1).

Komentar atau pernyataan yang agak berlawanan dengan pernyataan tersebut di atas adalah: "Umumnya para kerawat Mayang berbahasa Indonesia kepada atasan (khususnya kepada Pak Camat) untuk menghormat" dan pernyataan lain: "Umumnya Ketua RK/RT di sini (Mangli) dalam berbicara dengan Petinggi mempergunakan BI."

Dari kedua pernyataan terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa pemakaian BI itu justru untuk menghormat. Gejala yang terakhir ini barangkali dapat diterangkan dengan uraian John. U. Wolff bahwa pemakaian BI itu disebabkan oleh penghindaran pemakaian BD "tingkat tinggi" (lihat 2.1 (3)), yang mungkin memang tidak dikuasai secara baik.

5.2.3 Penguasaan BI

Kekurangmampuan berbahasa Indonesia yang menyebabkan belum berfungsinya BI dalam *domain* pemerintahan desa itu tidak saja terdapat pada P, tetapi juga pada PFD. Dari 120 responden PFD yang belum mampu berbahasa Indonesia sebanyak 8 orang, yaitu dari *rural* Surabaya 6 orang, *rurban* Surabaya 1 orang, dan *rurban* Jember 1 (satu) orang.

Dari kenyataan di atas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi yang berbunyi: "Penduduk desa-desa di daerah Jawa Timur, sekurangnya telah menguasai dua macam bahasa, yaitu BI dan BD setempat" (lihat 1.4 a)) tidak sepenuhnya berlaku. Berdasarkan hasil

analisis data tentang persentase frekuensi pemakaian BI dalam *domain* pemerintahan desa oleh para PFD dari tiap jenis desa dan dari tiap daerah sampel ternyata bahwa "tingkat keberlakuan" asumsi itu berbeda-beda. Umumnya di *urban* asumsi itu lebih berlaku daripada di *rurban*, dan di *rurban* lebih berlaku daripada di *rural*. Jadi di *rural*, asumsi itu paling tidak sudah berlaku.

5.2.4 Tipe-tipe Masyarakat Bahasa (*speech community*) di Jawa Timur

Berdasarkan "*one-language-one-culture assumption*" (J.B. Pride 1974:90), maka Jawa Timur merupakan masyarakat yang bertipe multilingual, yaitu "masyarakat yang menggunakan lebih dari dua bahasa" (Soepomo Poedjosoedarmo, 1975:1). Di Jawa Timur paling tidak terdapat tiga macam bahasa, yaitu: BJ, BM, dan BI, yang masing-masing merupakan citra (*image*) budaya tradisional Jawa, budaya tradisional Madura, dan budaya nasional Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, asumsi yang menyatakan:

- a. Bahwa Jawa Timur merupakan masyarakat bertipe multilingual ternyata benar. Ketiga bahasa tersebut di atas dipakai dalam *domain* pemerintahan desa, baik secara "murni" maupun secara "tercampur" (lihat Lampiran 3 : TFPB IV);
- b. Bahwa daerah Surabaya merupakan masyarakat bertipe "multilingual" ternyata tidak benar (lihat Lampiran 3 : TFPB I). Dalam *domain* pemerintahan desa di daerah Surabaya ternyata hanya dipakai BI dan BJ, baik secara "murni" maupun secara "tercampur". Pemakaian BI, BJ, dan BI + BJ hanya terjadi di *urban* (lihat Lampiran 3: TFPB Ia) dan *rurban* (lihat lampiran 3: TFPB Ib), sedang di *rural* hanya dipakai BJ;

Dari kenyataan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa *urban* dan *rurban* Surabaya bertipe "bilingual BJ-BI", sedang *rural* Surabaya bertipe "monolingual BJ" (lihat Lampiran 3: TFPB Ic).

- c. Bahwa daerah Jember merupakan masyarakat bertipe "trilingual BJ-BM-BI" ternyata benar (lihat Lampiran 3 : TFPB II). Ketiga bahasa itu ternyata dipakai dalam *domain* pemerintahan desa, baik secara "murni" maupun secara "tercampur".

Berdasarkan "tingkatannya", trilingual Jember itu dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) "tri-lingual *urban*", dengan BJ lebih dominan daripada BM;
- 2) "tri-lingual *rurban*", dengan BM lebih dominan daripada BJ;
- 3) "tri-lingual *rural*", dengan BM paling dominan.

- d. Bahwa daerah Madiun merupakan masyarakat bertipe "bilingual BJ +

BI" ternyata benar. Kedua bahasa itu dalam *domain* pemerintahan desa dipakai, baik secara "murni" maupun secara "tercampur" (lihat Lampiran 3 : TFPB III). Khusus untuk *rural* Madiun, pemakaian BI "murni" tidak terjadi, sedangkan pemakaian BI + BJ hanya mencapai 42,9% untuk jenis kegiatan rapat dengan partisipan PFD. Dengan demikian *rural* Madiun bertipe "bilingual BJ-BI" dengan BJ lebih dominan.

Kesimpulan tentang tipe-tipe "masyarakat bahasa" sebagai yang tersebut di atas tentulah masih sangat sementara, karena data dan wilayah penelitian masih sangat terbatas. Untuk dapat menentukan tipe-tipe "masyarakat bahasa" di Jawa Timur secara cermat masih diperlukan penelitian tersendiri yang lebih luas, sehingga dapat diperoleh peta kebahasaan (*linguistic map*) yang tepat.

5.2.5 Variabel Penentu Pemilihan BI

Dari hasil analisis data di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang variabel penentuan pemilihan BI (lihat Lampiran 3 : TFPB IV) sebagai berikut.

a. Partisipan

Partisipan merupakan variabel penentu pemilihan bahasa yang paling dominan. (lihat 2.2.5). Dalam penelitian ini, pembicara (O1), yaitu PFD, dihadapkan dengan partisipan yang status hubungannya berbeda, yaitu sesama PFD atau P, dan yang jumlahnya berbeda, yaitu P2 atau P1.

1) Status Hubungan antara O1 dan O2

Dalam kegiatan rapat di kantor, persentase frekuensi pemakaian BI oleh PFD dalam menghadapi partisipan PFD dan PFD + P ternyata berbeda. Selisih persentasenya adalah 36,7% (68,4% - 31,7%). Dalam perjumpaan di jalan, selisih persentase frekuensi pemakaian BI itu adalah 24,2% (34,2% - 10%).

Berdasarkan hasil analisis yang lain secara menyeluruh, pengaruh yang menentukan perbedaan persentase itu bukanlah status kerelasian semata-mata, melainkan kemampuan P berbahasa Indonesia. Alasan yang terakhir ini justru lebih dominan.

2) Jumlah Partisipan

Jumlah partisipan ternyata mempengaruhi persentase pemakaian BI. Dalam melayani P2 atau P1 di kantor, persentase itu berbeda. Selisihnya adalah 9,8% (16,7% - 6,9%).

b. Lokasi

Lokasi yang merupakan pengaruh terhadap "tingkat koresmian"

juga memperlihatkan pengaruh terhadap persentase frekuensi pemakaian BI, walaupun sangat kecil. Dengan partisipan yang sama, yaitu PFD maka perbedaan persentase perjumpaan di kantor dan di jalan hanyalah 3,3% (37,5% - 34,2%).

Dengan membandingkan selisih antara lokasi yang sama, tetapi partisipan berbeda dengan selisih antara lokasi berbeda, tetapi partisipan sama, yaitu 24,2% (lokasi jalan, partisipan PFD atau P) dan 3,3% (lokasi kantor dan jalan, partisipan sesama PFD), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan persentase frekuensi pemakaian BI itu disebabkan oleh kekurangan kemampuan P untuk berbahasa Indonesia.

c. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan merupakan variabel penentu pemilihan BI yang nampak jelas juga. Dengan variabel tetap lokasi dan partisipan dan jenis kegiatan berbeda menghasilkan persentase frekuensi yang berbeda.

Dari TFPB IV, (lihat Lampiran 3) kita lihat bahwa:

- 1) selisih antara *rapat-perjumpaan* (lokasi: kantor; partisipan: PFD) sebesar $68,4\% - 37,5\% = 30,9\%$;
- 2) selisih antara *rapat-pelayanan* (lokasi: kantor; partisipan: P) sebesar $31,7\% - 16,7\% = 15\%$;
- 3) selisih antara *perintah-pelayanan* (lokasi berbeda: kantor/rumah; partisipan sama: P) sebesar $8,3\% - 6,9\% = 1,4\%$.

d. Situasi

Dalam penelitian ini situasi dianggap resmi (formal), karena proses konversasi bergerak dalam *domain* pemerintahan desa dan dengan topik kedinasan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa keresmian itu sendiri ada tingkat-tingkatnya yang disebabkan oleh lokasi dan jenis kegiatan.

Lokasi kantor dan jenis kegiatan rapat merupakan situasi yang paling resmi, karena terbukti menghasilkan persentase frekuensi pemakaian BI yang paling besar (68,4% untuk partisipan PFD dan 31,7% untuk partisipan PFD + P). Yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa persentase perjumpaan dengan lokasi jalan ternyata lebih tinggi daripada perintah dengan lokasi rumah (jenis dan partisipan sama), yaitu 10% berbanding dengan 8,3%, padahal yang terakhir itu tentunya merupakan situasi yang lebih resmi daripada yang pertama.

Hal ini barangkali disebabkan oleh variabel rumah yang dirasakan kurang resmi daripada jalan.

e. Pembicara pertama (O1)

Walaupun penelitian ini telah membatasi bahwa PFD sebagai O1 dalam memilih jenis bahasa akan "diarahkan" oleh variabel tetap: *domain* pemerintahan desa yang secara implisit melibatkan topik kedinasan, situasi resmi, hubungan peran (*role relationship*) antara pemimpin dan pemimpin, serta antara pemimpin dan penduduk, dan tidak memperhitungkan hubungan personal (*personal relationship*) antara O1 dan O2. Namun, berdasarkan data kualitatif (lihat 5.2.2 b.) yang berhasil dikumpulkan, tampak adanya gejala tentang munculnya variabel kerelasian personal itu.

Oleh karena itu, dalam laporan ini dicoba juga untuk memberi interpretasi secara tuntas terhadap data yang ada itu. Berbagai variabel penentu pemilihan BI oleh O1 yang relevan dengan *domain* pemerintahan desa, telah diuraikan di atas. (5.2.5 a. — d.).

Sebagai hasil "tambahan", pada pasal ini akan dilaporkan interpretasi terhadap variabel penentu pemilihan BI yang lain, yaitu

(1) Kemampuan berbahasa Indonesia:

Tidak dipakainya BI dalam *domain* pemerintahan desa tentulah disebabkan oleh ketidakmampuan berbahasa Indonesia PFD itu sendiri, atau bila PFD mampu, tetapi lawan bicaranya tidak mampu.

(2) Hubungan personal antara O1 dan O2:

Yang dimaksud "hubungan personal" ini adalah hubungan yang dilatarbelakangi oleh sikap budaya O1 yang merupakan hasil dari interpretasi terhadap sikap budaya O2.

Jadi, variabel "hubungan personal" ini menyangkut masalah sikap jiwa, atau refleksi sikap jiwa. Dalam hubungan ini J.J. Gumperz (Pride, 1974:203) mengatakan: "*Choice of expression, words or speech style is regarded primarily as a matter of individual intent, a reflection of a person's attitude or psychic state.*"

Pernyataan sebagai: "Dalam berbicara dengan orang tua, misalnya Pak Kyai, kami mempergunakan BM, karena kalau dengan BI tidak sopan". bila ditinjau dari *a reflection of a person's attitude or psychic state*, sama dengan pernyataan: "Umumnya para kerawat Mayang berbahasa Indonesia bila berbicara dengan atasan (khususnya dengan Pak Camat) untuk menghormati", atau pernyataan: "Umumnya Ketua RK/RT di sini (Mangli) dalam berbicara dengan Petinggi mempergunakan BI".

Kasus yang pertama, yaitu tidak memakai BI (walaupun partisipan menguasai BI), mencerminkan sikap sopan, sedang kasus kedua memakai BI untuk menghormati.

Pilihan memakai BM pada kasus pertama oleh O1 terhadap O2,

yang keduanya bersuku Madura, sebenarnya tidak untuk keperluan kesopanan saja, tetapi juga untuk "memperdekat jarak" atau mengubah situasi formal menjadi informal. Hal ini sesuai dengan interpretasi R.F. Salisbury (Pride, 1974 : 55) terhadap data tentang pemilihan bahasa pada masyarakat "trilingual Komunku - Dene - Ramfau" di New Guinea, yang berbunyi: *"The language a speaker chooses to use may thus symbolically indicate that he is 'at home' in a foreign area, ..."*

Pilihan memakai BI untuk menghormat pada kasus kedua oleh O1 terhadap O2, agaknya dilatarbelakangi oleh tiadanya "cadangan kebahasaan" (*linguistic repertoire*) O1 yang sesuai dengan nilai kesopanan menurut nilai budaya O2. Petinggi Mangli bersuku Jawa, sedang ketua RT/RK kebanyakan bersuku Madura. Ketua RT/RK ini mungkin kurang menguasai macam-macam kode (varian bahasa yang mendukung makna sosial) dalam BJ (*unda-usuk*). Daripada menggunakan BJ dalam tingkatan yang mencerminkan sikap kurang sopan, lebih baik memakai BI. Hal ini sesuai dengan kesimpulan John. U Wolff (1975 : 9) yang berbunyi: *"A momentary shift to Indonesian also may serve the function of avoiding the choice or absence of an honorific where the decision is a difficult one."*

Kedua kasus di atas, yaitu mempergunakan dua macam bahasa (BM di satu pihak dan BI di lain pihak) untuk mendukung nilai moral yang sama, agaknya bertentangan dengan asumsi C.A. Ferguson (Pride 1974 : 122) bahwa *"... some of these beliefs (about language) and attitude (toward language) will be about the appropriateness of the use of particular languages for different purposes as well as about esthetic and moral values inherent in one language and its uses in comparison with another"* karena nilai moral ternyata tidak inheren dalam bahasa. Bahasa hanya merupakan "variabel tak bebas", yang merupakan alat *ad hoc* yang sewaktu-waktu dibebani tugas untuk mendukung nilai moral (Marsoedi, 1975). Tetapi bahwa nilai moral tidak inheren dalam bahasa itu, barangkali disebabkan oleh perubahan struktur sosial yang mengakibatkan berubahnya nilai "intrinsik" bahasa. Untuk menjawab masalah ini diperlukan penelitian tersendiri.

6. PENUTUP

6.1 Ringkuman Hasil Penelitian

6.1.1 Hasil Kuantitatif

- 1) Persentase frekuensi pemakaian BI oleh para PFD dalam domain pemerintahan desa di Jawa Timur dapat ditabelkan sebagai berikut.

Jenis Kegiatan	Lokasi	Partisipan		Persentase Frekuensi Pemakaian BI			
		Jenis	Jumlah	Sura-baya	Jember	Madiun	Jawa Timur
Kantor	Rapat	PFD	n	62,5	65	77,5	68,4
		PFD+P	n	35	25	35	31,7
Pelayanan	Kantor	P	2	25	17,5	7,5	16,7
		P	1	4,2	8,4	8,3	6,9
Perintah	Rumah	P	1	15	5	5	8,3
Perjumpaan	Kantor	PFD	1	35	20	57,5	37,5
	Jalan	PFD	1	30	20	52,5	34,2
		P	1	17,5	7,5	5	10

Tabel . : Persentase Frekuensi Pemakaian BI dalam *Domain* Pemerintahan Desa di Jawa Timur

- 2) Dengan mengabaikan X dan TB pada TFPB I, II, III, IV (lihat Lampiran 3), dan memperhitungkan hasil kuantitatif secara vertikal dan menyeluruh, maka persentase rata-rata frekuensi pemakaian bahasa dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur oleh para PFD dapat ditabelkan sebagai berikut.

Daerah	Persentase Frekuensi Pemakaian Bahasa						
	BI	BJ	BM	BI+BJ	BI+ BM	BJ+ BM	BI+BJ+BM
Surabaya	28	19,2	—	29,4	—	—	—
Jember	19,8	19,6	20,8	1,3	2,8	0,3	2,5
Madiun	29,8	28,2	—	25,5	—	—	—
Jawa Timur	26,7	22,4	7	19,6	0,9	0,1	0,8

Tabel: Persentase Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Domain Pemerintahan Desa di Jawa Timur

6.1.2 Hasil Kualitatif

1) Hipotesis

Hipotesis yang berbunyi: "Dalam *domain* pemerintahan desa, para PFD dari desa-desa daerah Jawa Timur, sebagai pembicara pertama (O1), mempergunakan BI secara lisan, baik kepada sesama PFD maupun kepada P", dengan "ukuran" frekuensi 60% ternyata tidak terbukti kebenarannya.

2) Fungsi BI

Akibat tidak terbuktinya hipotesis di atas ialah bahwa dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara yang harus berfungsi sebagai bahasa resmi BI belum berfungsi.

3) Penguasaan BI

Sebab utama belum berfungsinya BI dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur itu ialah kemampuan berbahasa Indonesia penduduk (P) masih sangat kurang, lebih-lebih di desa *rural*, bahkan ada juga PFD yang belum dapat berbahasa Indonesia.

4) Asumsi tentang P yang Bilingual

Karena sebagian besar P dan sebagian kecil PFD belum mampu berbahasa Indonesia, maka *asumsi* yang berbunyi "Penduduk desa-desa di daerah Jawa Timur, sekurang-kurangnya telah

menguasai dua macam bahasa, yaitu BI dan BD setempat" tidak sepenuhnya berlaku.

Tingkat keberlakuan asumsi itu secara berturut-turut, dari berlaku — kurang berlaku — tidak berlaku, ialah di daerah *urban* — *rurban* — *rural*.

5) Tipe-tipe "masyarakat bahasa" Jawa Timur

Dengan hanya memperhatikan bahasa yang dipakai dalam *domain* pemerintahan desa di Jawa Timur ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Jawa Timur merupakan "masyarakat bahasa" yang bertipe multilingual.
- b) "Masyarakat bahasa" daerah Surabaya bertipe "bilingual BJ-BI" untuk *urban* dan *rurban*, dan "monolingual BJ" untuk *rural*.
- c) "Masyarakat bahasa" daerah Jember bertipe: "trilingual BI — BJ — BM" dengan catatan bahwa (1) di *urban* BJ lebih dominan daripada BJ, (2) di *rurban* sebaliknya, BM lebih dominan daripada BJ, dan (3) di *rural* BM paling dominan.
- d) "Masyarakat bahasa" daerah Madiun bertipe "bilingual BJ — BI" dengan catatan bahwa di *rural* BJ lebih dominan daripada BI.

6) Variabel Penentu Pemilihan BI

Dengan variabel tetap: pembicara (O1) PFD dan topik kedinasan, maka persentase frekuensi pemakaian BI oleh para PFD Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel pembeda sebagai berikut:

a) Partisipan

Baik jenis partisipan (hubungan peran) maupun jumlah partisipan mempengaruhi tinggi-rendahnya persentase frekuensi pemakaian BI. Partisipan yang hubungan perannya (*role relation*) sama dengan pembicara (jadi PFD dengan PFD) menghasilkan persentase yang lebih tinggi daripada partisipan yang hubungan perannya berbeda (yaitu PFD dengan P). Partisipan dua orang menghasilkan persentase lebih tinggi daripada partisipan hanya seorang.

b) Lokasi

Lokasi, yang juga merupakan variabel penentu tingkat keresmian dalam proses percakapan, mempengaruhi persentase frekuensi pemakaian BI. Persentase frekuensi pemakaian BI dalam pembicaraan di kantor lebih tinggi daripada pembicaraan di jalan atau di rumah.

c) Jenis Kegiatan

Perbedaan jenis kegiatan mempengaruhi persentase pemakaian BI. Jenis kegiatan rapat menghasilkan persentase yang lebih tinggi daripada kegiatan pelayanan maupun perjumpaan.

d) Situasi

Jenis kegiatan dan lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi situasi pembicaraan. Kegiatan rapat lebih resmi daripada pelayanan maupun perjumpaan.

Akibatnya, makin resmi situasi pembicaraan, makin tinggi pula persentase pemakaian BI.

e) Pembicara Pertama

Variabel pembicara atau pengirim sebenarnya merupakan variabel yang paling menentukan dalam pemilihan bahasa. Tetapi karena dalam penelitian ini variabel ini telah (seharusnya) dibatasi oleh *domain* pemerintahan desa yang secara implisit telah melibatkan topik kedinasan, maka variabel *tone*, yaitu "*refers to be the speaker's intent to be serious, jocular, etc.*" dan "*Speaker has to do not only with person's linguistic competence in the various codes, but also with the impression he wishes to convey about himself.*" (Pride, 1974:44 — 45), tidak dipersoalkan dalam penelitian ini.

6.2 Masalah yang Masih Belum Digarap

Masalah yang masih belum digarap dalam penelitian ini dan kini masih tersimpan dalam "simpanan data" antara lain :

- 1) korelasi antara tingkat pendidikan dan frekuensi pemakaian BI;
- 2) korelasi antara golongan etnis dan frekuensi pemakaian BI;
- 3) korelasi antara golongan usia dan frekuensi pemakaian BI; dan
- 4) perbedaan persentase frekuensi pemakaian BI antara jenis-jenis PFD (pamong desa, ketua RT/RK (RW), pengurus LSD).

6.3 Saran

Sebagai penutup perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Untuk memantapkan kesimpulan hasil penelitian ini, perlu dilaksanakan survei atau observasi yang penelitiannya bertindak sebagai partisipan aktif atau sebagai "orang luar" atau dengan mewawancarai P dengan topik-topik yang sama.
- 2) Untuk mengetahui secara agak lengkap tentang fungsi BI dalam *domain* pemerintahan, penelitian sekarang ini perlu dilanjutkan dengan

meningkatkan sasaran, yaitu dalam *domain* pemerintahan tingkat kecamatan dan tingkat kotamadya atau tingkat kabupaten.

- 3) Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan BI secara menyeluruh perlu dilaksanakan penelitian lanjutan yang meliputi berbagai *domain* perilaku bahasa, misalnya *domain* sosial budaya, domain perekonomian, *domain* keluarga. Penelitian ini tidak saja memandang BI sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional, tetapi juga sebagai bahasa kedua di daerah Jawa Timur.
- 4) Untuk menetapkan tipe-tipe masyarakat bahasa Jawa Timur secara cermat, perlu dilaksanakan penelitian berupa "pemetaan bahasa" secara menyeluruh, dalam arti tidak saja dengan menggunakan teknik *sampling*, tetapi dengan wilayah sasaran cukup luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, Wayan dan Soegeng Soetrisno. 1973. *Statistik Diskriptif*. Malang: Swadaya.
- Bintarto, R. 1968. *Geografi Sosial*. Jogjakarta: U.P. Spring.
- Braunshausen, N. 1928. "Le Bilinguisme et la Famille." Dalam *Le Bilinguisme et l' Education*. Geneva-Luxembourg: Bureau International d' Education.
- Direktorat Djenderal Pembangunan Masyarakat Desa. Tanpa tahun. *Pokok-pokok Pengertian tentang Kebijaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa*. Djakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Ervin, S.M. 1964. "An Analysis of the Interaction of Language, Topic and Listener." *Am. A.*, Vol. 66, Part 2.
- Ferguson, C.A. 1972. "Diglossia." Dalam Pier Paolo Giglioli (Ed.), *Language and Social Context*. Great Britain: Nicholls & Company Ltd.
- _____. 1974. "The Role of Arabic in Ethiopia: a Sociolinguistic Perspective." Dalam J.B. Pride dan Janet Holmes (Ed.), *Sociolinguistics*. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd.
- Fishman, J.A. 1974. "The Realitonship between Macro-and Micro-Sociolinguistics in the Study of Who Speaks What Language to Whom and When." Dalam J.B. Pride dan Janet Holmes (Ed.), *Sociolinguistics*. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd.
- _____. 1974. "The Implication of Bilingualism for Language Teaching and Language Learning." Dalam Zaini Machmoed (Ed.), *Bilingualisme*. Kumpulan Bahan Kuliah Penataran Pengajaran Bahasa Dosen-Dosen FK/FKSS seluruh Indonesia di Malang. Malang: FKSS-IKIP Malang.
- Goodenough, W.H. 1965. "Rethinking 'Status' and 'Role': Toward a General Model of the Cultural Organization of Social Relationship." Dalam M. Banton (Ed.), *Relevance of Models for Social Anthropology*. Praeger.
- Gross, F. 1951. "Language and Value Changes among the Arapaho." *I.J.A.L.*, Vol. 17.
- Gumperz, J.J. 1964. "Linguistic and Social Interaction in Two Communities." *Am. A.*, Vol. 66, Part. 2.
- Halim, Amran. 1975. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia." Dalam Lembaga Bahasa Nasional, "Politik Bahasa Nasional:

- Laporan Seminar Jakarta 25—28 Februari 1975." Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1975. "Metode-Metode Wawancara." Fotokopi.
Bahan Kuliah Penataran Linguistik, Tugu, 1 Juli—31 Agustus
1975. Tugu: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Labov, W. 1974. "The Study of Language in Its Social Context."
Dalam J.B. Pride dan Janet Holmes (Ed.), *Sociolinguistics*.
Great Britain: Hazel Watson & Viney Ltd. Halaman 180-202.
- Lembaga Bahasa Nasional. 1975. "Politik Bahasa Nasional: Laporan
Seminar Jakarta 25—28 Februari 1975." Jakarta.
- Mackey, William F. 1974. "The Description of Bilingualism." Dalam
Zaini Machmoed (Ed.), *Bilingualisme*. Kumpulan bahan kuliah
Penataran Pengajaran Bahasa Dosen-Dosen FK/FKSS seluruh
Indonesia di Malang. Malang: FKSS-IKIP Malang.
- Marsoedi, I.L. 1976. "Studi tentang Fungsi Alih-Kode dalam Domain
Perekonomian Rendah oleh Orang-orang Madura Desa
Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Daerah Kotamadya
Malang." Laporan Penelitian (Sementara) untuk Proyek
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- _____. dkk. 1975. "Laporan Penelitian Kelompok B." Penelitian
Latihan oleh Para Peserta Penataran Linguistik di Tugu. Pro-
yek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1975. "Bilingualisme." Bahan Kuliah Pe-
nataran Linguistik, Tugu, 1 Juli—31 Agustus 1975. Tugu: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rosidi, Ajip. 1975. "Pengembangan Bahasa Daerah." Dalam Lem-
baga Bahasa Nasional, "Politik Bahasa Nasional: Laporan
Seminar Jakarta 25—28 Februari 1975." Jakarta.
- Salisbury, R.F. 1974. "Notes on Bilingualism and Linguistic Change in
New Guinea." Dalam J.B. Pride dan Janet Holmes (Ed.),
Sociolinguistics. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd.
- Sankoff, G. 1974. "Language Use in Multilingual Societies: Some Al-
ternative Approaches." Dalam J.B. Pride dan Janet Holmes
(Ed.), *Sociolinguistics*. Great Britain: Hazell Watson & Viney
Ltd.
- Stewart, William A. 1974. "A Sociolinguistic Typology for Describing
National Multilingualism." Dalam Zaini Machmoed. (Ed.), *Bi-
lingualisme*. Kumpulan Bahan Kuliah Penataran Pengajaran

- Bahasa Dosen-Dosen FK/FKSS seluruh Indonesia di Malang.
- Tan, Mely G. 1975. "Masalah Perencanaan Penelitian." Bahan Kuliah Penataran Linguistik, Tugu, 1 Juli—31 Agustus 1975. Tugu: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Tanner, N. 1974. "Speech and Society among the Indonesian Elite: a Case Study of a Multilingual Community." Dalam J.B. Pride dan Janet Holmes (Ed.), *Sociolinguistics*. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd.
- Wolff, John U. 1975. "The Function of Indonesian in Central Java." Bahan Ceramah di FKSS-IKIP Malang.
- . 1974. "Diglosia dan Bilingualisme." Bahan Ceramah di FKSS-IKIP Malang.

Lampiran 1a

DAFTAR PERTANYAAN
(RESPONDEN PAMONG DESA)

Lokasi Desa : S/J/M

Tipe Desa : Ub/Rb/Rr

0. Nama responden		
1. Nomor responden		
2. Jenis kelamin	Pria ☐ 1 Wanita ☐ 2	
3. S u k u	Jawa ☐ 1 Madura ☐ 2 Lain ☐ 3	
4. U m u r	20 - 39 tahun ☐ 1 40 - 59 tahun ☐ 2 60 tahun ke atas ☐ 3	
5. Pendidikan	TS ☐ 1 SD ⁻ ☐ 2 SD+ ☐ 3 SLP ☐ 4 SLA ☐ 5 Akademi ☐ 6 PT ☐ 7	
6. Jabatan dalam Pemdes	Lurah/Petinggi ☐ 1 Carik ☐ 2 Kamituwo ☐ 3 Kebayan ☐ 4 Jogotirto ☐ 5 Jogoboyo ☐ 6 Modin ☐ 7	
7. Apakah bahasa-ibu (bahasa pertama) Bapak/Ibu ?	BI ☐ 1 BJ ☐ 2 BM ☐ 3 Lain ☐ 4	

8. Bahasa apa sajakah yang dapat Bapak/Ibu pergunakan dalam pembicaraan?	BJ ☐ 0 BI + BJ ☐ 1 BI + BJ + BA ☐ 4 BI + B ☐ 2 BI + BM + BA ☐ 5 BJ + BM ☐ 3 BI + BJ + BM ☐ 8
9. Apakah Bapak/Ibu sering berbicara dengan orang-orang bukan suku Jawa/Madura, misalnya: Cina, Arab dsb. yang tidak Bapak/Ibu kenal?	selalu ☐ 1 sering ☐ 2 jarang ☐ 3 tidak pernah ☐ 4
10. Rapat pamong desa membicarakan rencana pembangunan desa. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
11. Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh penduduk biasa. Rapat itu membicarakan masalah keluarga berencana. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
12. Bapak/Ibu sedang berada di kantor, tetapi bukan rapat, bersama dengan pamong desa lainnya. Di tempat itu Bapak/Ibu membicarakan masalah keamanan desa. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
13. Sedang Bapak/Ibu berada di kantor, datang dua orang penduduk yang minta kesaksian kepada Bapak/Ibu tentang jual beli tanah/rumah dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan dalam berbicara dengan mereka ?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa mereka ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9

14. Seorang penduduk datang ke- pada Bapak/Ibu meminta surat keterangan/tanda tangan wesel pos dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan untuk melayaninya?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
15. Bapak/Ibu sedang melihat-lihat keadaan desa, berjumpa dengan pamong desa lainnya. Di tempat itu Bapak/Ibu membicarakan perbaikan saluran air, pagar, ja- lan, dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
16. Bapak/Ibu berjumpa dengan seorang penduduk yang pagar- nya telah rusak. Bapak/Ibu me- nyuruh memperbaiki pagar itu. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
17. Bapak/Ibu mendatangi pendu- duk di rumah masing-masing untuk menarik pajak. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergu- nakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9

Tanggal pelaksanaan :
Nama pewawancara :
.....

Lampiran 1b

DAFTAR PERTANYAAN
(RESPONDEN RK(RW/RT))

Lokasi Desa : S/J/M
Tipe Desa: Ub/Rb/Rr

0. Nama responden		
1. Nomor responden		
2. Jenis kelamin	Pria ☐ 1 Wanita ☐ 2	
3. Suku	Jawa ☐ 1 Madura ☐ 2 Lain ☐ 3	
4. Umur	20-39 tahun ☐ 1 40-59 tahun ☐ 2 60 tahun ke atas ☐ 3	
5. Pendidikan	TS ☐ 1 SD- ☐ 2 SD+ ☐ 3 SLP ☐ 4 SLA ☐ 5 Akademi ☐ 6 PT ☐ 7	
6. Jabatan dalam RK(RW)/RT	Ketua RK (RW) ☐ 1 Wakil RK (RW) ☐ 2 Ketua RT ☐ 3 Wakil RT ☐ 4	
7. Apakah bahasa-ibu (bahasa pertama) Bapak/Ibu ?	BI ☐ 1 BJ ☐ 2 BM ☐ 3 Lain ☐ 4	

8. Bahasa apa sajakah yang dapat Bapak/Ibu pergunakan dalam pembicaraan?	BJ ☐ 0 BI + BJ ☐ 1 BI + BJ + BA ☐ 4 BI + BM ☐ 2 BI + BM + BA ☐ 5 BJ + BM ☐ 3 BI + BJ + BM ☐ 6
9. Apakah Bapak/Ibu sering berbicara dengan orang-orang bukan suku Jawa/Madura, misalnya Cina, Arab dsb. yang tidak Bapak/Ibu kenal?	selalu ☐ 1 sering ☐ 2 jarang ☐ 3 tidak pernah ☐ 4
10. Rapat RK(RW)/RT membicarakan pelaksanaan peringatan hari besar nasional. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan dalam rapat itu?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
11. Rapat RT yang dihadiri oleh warganya membicarakan rencana kerja bakti. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
12. Bapak/Ibu sedang berada di tempat kerja/kantor, tetapi bukan rapat bersama dengan staf RK(RW)/RT lainnya. Di tempat itu dibicarakan masalah perbaikan jalan/saluran air/pos penjagaan dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
13. Sedang Bapak/Ibu berada di tempat kerja/kantor, datang seorang penduduk mengantar tamu yang akan menginap/bertempat tinggal di rumahnya. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI 1 BI + BJ ☐ 4 BJ 2 BI + BM ☐ 5 BM 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa mereka ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9

14. Bapak/Ibu berjumpa dengan staf RK(RW)/RT di jalan. Di tempat itu Bapak/Ibu membicarakan pelaksanaan perbaikan saluran air/pelebaran jalan dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu gunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
15. Di tengah jalan Bapak/Ibu berjumpa dengan seorang penduduk. Di tempat itu Bapak/Iu membicarakan masalah pemasangan tiang bendera/pengapuran pagar, dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu gunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 9 TB ☐ 9
16. Bapak/Ibu mendatangi penduduk di rumah masing-masing, untuk menarik sumbangan peringatan 17 Agustus. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu gunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9

Tanggal pelaksanaan :
 Nama pewawancara :

Lampiran 1c

DAFTAR PERTANYAAN
(RESPONDEN LSD)

Lokasi Desa : S/J/M
Tipe Desa : Ub/Rb/Rr

0. Nama responden		
1. Nomor responden		
2. Jenis kelamin	Pria Wanita	☐ 1 ☐ 2
3. Suku	Jawa Madura Lain	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
4. Umur	20-39 tahun 40-59 tahun 60 tahun ke atas	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
5. Pendidikan	TS SD - SD + SLP SLA Akademi PT	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7
6. Jabatan dalam LSD	Ketua Wakil Sekretaris Bendahara Pembantu Umum Ketua Seksi	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
7. Apakah bahasa ibu (bahasa pertama) Bapak/Ibu?	BI BJ BM Lain	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

8. Bahasa apa sajakah yang dapat Bapak/Ibu pergunakan dalam pembicaraan ?	BJ ☐ 0 BI + BJ ☐ 1 BI + BJ + BA ☐ 4 BI + BM ☐ 2 BI + BM + BA ☐ 5 BJ + BM ☐ 3 BI + BJ + BM ☐ 8
9. Apakah Bapak/Ibu sering berbicara dengan orang-orang bukan suku Jawa/Madura, misalnya : Cina, Arab dsb. yang tidak Bapak/Ibu kenal?	selalu ☐ 1 sering ☐ 2 jarang ☐ 3 tidak pernah ☐ 4
10. Dalam rapat LSD/LSK dibicarakan rencana penggunaan subsidi pemerintah. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
11. LSD/LSK mengadakan penyuluhan mengenai pertanian/perindustrian/perusahaan/pendidikan/mental agama kepada rakyat. Dalam memberikan penyuluhan itu bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
12. Bapak/Ibu sedang berada di tempat kerja/kantor bersama dengan pengurus yang lain, tetapi bukan rapat. Di tempat itu Bapak/Ibu membicarakan pelaksanaan penggunaan subsidi pemerintah. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
13. Sedang Bapak/Ibu berada di tempat kerja/kantor, datang seorang penduduk yang mengajak seseorang yang ingin menjual bahan bangunan untuk membangun balai desa. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa mereka ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9

14. Sedang Bapak/Ibu berada di tempat kerja/kantor, datang seorang penduduk yang menanyakan masalah dana kematian. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
15. Di jalan Bapak/Ibu berjumpa dengan sesama pengurus. Di tempat itu Bapak/Ibu membicarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian/perindustrian/mental agama dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
16. Di jalan Bapak/Ibu berjumpa dengan seorang penduduk. Di tempat itu Bapak/Ibu membicarakan masalah PKK. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9
17. Bapak/Ibu mendatangi penduduk di rumah masing-masing untuk mengajak ikut serta mengikuti latihan kesenian/olahraga/kursus menjahit dsb. Bahasa apakah yang Bapak/Ibu pergunakan?	BI ☐ 1 BI + BJ ☐ 4 BJ ☐ 2 BI + BM ☐ 5 BM ☐ 3 BJ + BM ☐ 6 Bergantung pada siapa dia ☐ 7 BI + BJ + BM ☐ 8 TB ☐ 9

Tanggal pelaksanaan :

Nama pewawancara :

.....

Lampiran 2a

TPP I

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Rapat
di Desa *Urban, Rurban, Rural*
Daerah Surabaya

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. *domain* = Pemerintahan Desa
3. Topik = Kedinasaan
4. Situasi = Resmi
5. Lokasi = Kantor

N = 40

Jenis Desa Sumber Data	Partisipan		Pemilihan Bahasa									
	Jenis	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	BM	TB	Total
<i>Urban</i>	PFD	n	68	-	-	32	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	56	-	-	44	-	-	-	-	-	100
<i>Rurban</i>	PFD	n	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
<i>Rural</i>	PFD	n	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Rapat
di Desa *Urban, Rurban, Rural*
Daerah Jember

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. *Domain* = Pemerintahan Desa
3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi
5. Lokasi = Kantor

N = 40

Jenis Desa Sumber Sampel	Partisipan		Pemakaian Bahasa									
	Jenis	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
	PFD	n	84	4	-	-	8	-	-	-	-	4
Urban	PFD + P	n	36	16	4	4	16	-	16	-	8	100
	PFD	n	37,5	12,5	37,5	-	12,5	-	-	-	-	100
Rurban	PFD + P	n	12,5	-	50	-	-	12,5	12,5	-	12,5	100
	PFD	n	28,6	-	57,1	-	-	-	-	-	14,3	100
Rural	PFD + P	n	-	14,2	42,9	-	-	-	-	-	42,9	100

Lampiran 2c

TPP III

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Rapat
di Desa *Urban, Rurban, Rural*
Daerah Madiun

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. *Domain* = Pemerintah Desa
3. *Topik* = Kedinasaan
4. Situasi = Resmi
5. Lokasi = Kantor

N = 40

Jenis Desa Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa									
	Jenis	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
<i>Urban</i>	PFD	n	100	—	—	—	—	—	—	—	—	100
	PFD + P	n	52	—	—	48	—	—	—	—	—	100
<i>Rurban</i>	PFD	n	75	12,5	—	12,5	—	—	—	—	—	100
	PFD + P	n	12,5	37,5	—	50	—	—	—	—	—	100
<i>Rural</i>	PFD	n	—	57,1	—	42,9	—	—	—	—	—	100
	PFD + P	n	—	85,9	—	14,1	—	—	—	—	—	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Rapat
di *Urban* Jawa Timur

Variabel Tetap: 1. Pembicara (OI) = PFD
2. *Domain* = Pemerintahan Desa
3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi
5. Lokasi = Kantor

N = 25

Daerah Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa										Total
	Jenis	Σ	BI	BJ	BM	BI	BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	
Surabaya	PFD	n	68	-	-	32	-	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	56	-	-	44	-	-	-	-	-	-	100
Jember	PFD	n	84	4	-	-	8	-	-	-	-	4	100
	PFD + P	n	36	16	4	4	16	-	-	16	-	8	100
Madiun	PFD	n	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	52	-	-	48	-	-	-	-	-	-	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Rapat
di *Rurban Jawa Timur*

Variabel Tetap 1. Pembicara (O1) = PFD

2. *Domain* = Pemerintah Desa

3. Topik = Kedinasan

4. Situasi = Resmi

5. Lokasi = Kantor

N = 8

Daerah Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa									
	Jenis	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
Surabaya	PFD	n	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
Jember	PFD	n	37,5	12,5	37,5	-	12,5	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	12,5	-	50	-	-	12,5	12,5	-	12,5	100
Madiun	PFD	n	75	12,5	-	12,5	-	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	12,5	37,5	-	50	-	-	-	-	-	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Rapat
di Rural Jawa Timur

Variabel Tetap: 1. Pembicara (OI) = PFD
2. *Domain* = Pemerintahan Desa
3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi
5. Lokasi = Kantor

N = 7

Daerah Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa							
	Jenis	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	Total
Surabaya	PFD	N	-	100	-	-	-	-	-	100
	PFD + P		-	100	-	-	-	-	-	100
Jember	PFD	n	28,6	-	57,1	-	-	-	-	100
	PFD + P	n	-	14,2	42,9	-	-	-	-	100
Madiun	PFD	n	-	57,1	-	42,9	-	-	-	100
	PFD + P	n	-	85,9	-	14,1	-	-	-	100

TPP VII

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Melayani Penduduk
di Desa *Urban* Jawa Timur

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) : PFD
2. *Domain* : Pemerintahan Desa
3. Topik : Kedinasan
4. Situasi : Resmi
5. Lokasi : Kantor

N = 15

Daerah Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa									
	Jen.	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
Surabaya	P	2	20,1	6,7	-	46,7	-	-	-	26,3	-	100
	P	1	6,7	-	-	53,3	-	-	-	40	-	100
Jember	P	2	26,4	46,9	-	-	6,7	-	-	13,3	6,7	100
	P	1	13,3	33,4	-	-	-	-	-	46,6	6,7	100
Madiun	P	2	20,1	-	-	33,3	-	-	-	46,6	-	100
	P	1	13,3	6,7	-	33,4	-	-	-	46,6	-	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Melayani Penduduk
di Desa *Rurban* Jawa Timur

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) : PFD
2. Domain : Pemerintahan Desa
3. Topik : Kedinasaan
4. Situasi : Resmi
5. Lokasi : Kantor

N = 5

Daerah Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa									
	Jen.	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
Surabaya	P	2	20	-	-	-	-	-	-	80	-	100
	P	1	-	-	-	20	-	-	-	80	-	100
Jember	P	2	-	40	40	-	-	-	-	20	-	100
	P	1	-	-	20	-	-	-	-	80	-	100
Madiun	P	2	-	40	-	20	-	-	-	40	-	100
	P	1	-	60	-	40	-	-	-	-	-	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Melayani Penduduk
di Desa *Rural* Jawa Timur

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) : PFD
2. *Domain* : Pemerintahan Desa
3. Topik : Kedinasan
4. Situasi : Resmi
5. Lokasi : Kantor

N = 4

Daerah Sumber Sampel	Partisipan		Pemilihan Bahasa							
	Jen.	Σ	BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	Total
Surabaya	P	2	-	100	-	-	-	-	-	100
	P	1	-	100	-	-	-	-	-	100
Jember	P	2	-	-	50	-	-	-	-	100
	P	1	-	-	75	-	-	-	-	100
Madiun	P	2	-	100	-	-	-	-	-	100
	P	1	-	100	-	-	-	-	-	100

Lampiran 2j

TPP X

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Perjumpaan
di Desa *Urban Jawa Timur*

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) : PFD
2. Partisipan (O2) : PFD
3. Jumlah O2 : 1
4. *Domain* : Pemerintahan Desa
5. Topik : Kedinasan
6. Situasi : Resmi

N = 25

Daerah Sumber Sampel	Lokasi	Pemilihan Bahasa									
		BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BJ + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
Surabaya	Kantor	36	8	-	52	-	-	-	12	-	100
	Jalan	28	4	-	44	-	-	-	24	-	100
Jember	Kantor	28	40	8	8	4	-	-	12	-	100
	Jalan	28	32	8	4	-	-	-	28	-	100
Madiun	Kantor	80	-	-	16	-	-	-	4	-	100
	Jalan	76	-	-	24	-	-	-	-	-	100

Lampiran 2k

TPP XI

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa dalam Perjumpaan
di Desa *Rurban* Jawa Timur

- | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Pembicara (O1) : PFD | 4. <i>Domain</i> | : Pemerintahan Desa |
| 2. Partisipan (O2) : PFD | 5. Topik | : Kedinasan |
| 3. Jumlah O2 : 1 | 6. Situasi | : Resmi |

N = 8

Daerah Sumber Sampel	Lokasi	Pemilihan Bahasa									
		BI	BJ	BM	BI + BJ	BJ + BM	BI + BM	BI + BJ + BM	X	TB	Total
Surabaya	Kantor	62,5	-	-	12,5	-	-	-	25	-	100
	Jalan	62,5	-	-	25	-	-	-	12,5	-	100
Jember	Kantor	12,5	25	50	-	-	-	12,5	-	-	100
	Jalan	12,5	25	37,5	-	-	-	-	25	-	100
Madiun	Kantor	37,5	37,5	-	25	-	-	-	-	-	100
	Jalan	25	50	-	25	-	-	-	-	-	100

Perbandingan Persentase
Frekuensi Pemakaian Bahasa Dalam Perjumpaan
di Desa Rural Jawa Timur

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) : PFD 4. *Domain* : Pemerintahan Desa
2. Partisipan (O2) : PFD 5. Topik : Kedinasan
3. Jumlah O2 : 1 6. Situasi : Resmi

N = 7

Daerah Sumber Sampel	Lokasi	Pemilihan Bahasa							
		BI	BJ	BM	BI + BJ	BI + BM	BI + BJ	BI + BJ + BM	Total
Surabaya	Kantor	-	100	-	-	-	-	-	100
	Jalan	-	100	-	-	-	-	-	100
Jember	Kantor	-	-	71,42	-	-	-	-	100
	Jalan	-	-	71,42	-	-	-	-	100
Madiun	Kantor	-	100	-	-	-	-	-	100
	Jalan	-	100	-	-	-	-	-	100

Frekuensi Pemakaian Bahasa
di *Urban* Surabaya

3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. *Domain* : Pemerintahan Desa

N = 25

Jenis Kegiatan	Lokasi	Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																			
		Jenis	Jml.		BI		BJ		BM		BI+BJ		BI+BM		BJ+BM		BI+BJ+BM		X		TB	Total		
					f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			f	%
Rapat	Kantor	PFD	n	10	17	68	-	-	-	-	-	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100	
sda	sda	PFD + P	n	11	14	56	-	-	-	-	-	11	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100
Pelatihan	sda	P	2	13	9	36	1	4	-	-	-	7	28	-	-	-	-	-	8	32	-	-	25	100
sda	sda	P	1	14/	1	6,6	-	-	-	-	-	8	53,4	-	-	-	-	-	6	40	-	-	15	100
Pertintah	Rumah		1	17/16	6	24	11	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	8	32	-	-	25	100
Perjumlahan	Kantor	PFD	1	12	9	36	2	8	-	-	-	13	52	-	-	-	-	-	1	4	-	-	25	100
sda	Jalan	PFD	1	15/14	7	28	2	8	-	-	-	13	52	-	-	-	-	-	3	12	-	-	25	100
sda	sda	P	1	16/15	7	28	1	4	-	-	-	11	44	-	-	-	-	-	6	24	-	-	25	100

Frekuensi Pemakaian Bahasa
di *Rurban* Surabaya

3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi

Variabel Tetap: 1. Pembicaraan (Ot) = PFD

2. *Domain*

N = 8

Pemilihan Bahasa																														
Jenis Kegiatan	Lokasi	Partisipan		No. Butir	BI						BJ		BM		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM		X		TB		Total			
		Jenis	Jumlah		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	N	%
Rapat	Kantor	PFD	n	10	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100		
sda	sda	PFD + P	n	11	-	-	-	-	-	-	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100	
Pelaksanaan	sda	P	2	13	1	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	87,5	-	-	8	100	
sda	sda	P	1	14/-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80	-	-	5	100	
Pertintah	Rumah	P	1	17/16	-	-	-	-	-	-	1	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	87,5	-	-	8	100	
Pertemuan	Kantor	PFD	1	12	5	62,5	-	-	-	-	1	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-	-	8	100		
sda	Jalan	PFD	1	15/14	5	62,5	-	-	-	-	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,5	-	-	8	100		
sda	sda	P	1	16/15	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	87,5	-	-	8	100		

Frekuensi Pemakaian Bahasa
di Rural Surabaya

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. Domain = Pemerintahan Desa
3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi

N = 7

Jenis Kegiatan		Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																					
					Jenis		BI		BJ		BM		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM		X		TB		Total	
Rapat	Kantor	PFD	n	10	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		
sda	sda	PFD + P	n	11	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		
Pelaksanaan	sda	P	2	13	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		
sda	sda	P	1	14/-	-	-	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100		
Pertintah	Rumah	P	1	17/16	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		
Perjumpaan	Kantor	PFD	1	12	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		
sda	Jalan	PFD	1	15/14	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		
sda	sda	P	1	16/15	-	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100		

Frekuensi Pemakaian Bahasa

di Daerah Surabaya

Variabel Tetap : 1. Pembicara (O1) = PFD

2. *Domain*

3. Topik

= Resmi

$$N = 40$$

Pemilihan Bahasa																								
Jenis Kegiatan	lokalitas	Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																			
		Jenis	Jml.		BI		BJ		BM.		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM		X		TB		Total	
					f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Rapat	Kantor	PFD	n	10	25	62,5	7	17,5	-	-	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100
sda	sda	PFD + P	n	11	14	35	7	17,5	-	-	19	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100	
Pelaksanaan	sda	P	2	13	10	25	8	20	-	-	7	17,5	-	-	-	-	-	-	15	37,5	-	40	100	
sda	sda	P	1	14/-	1	4,2	4	16,7	-	-	9	37,5	-	-	-	-	-	-	10	41,6	-	24	100	
Pertin-tah	Rumah	P	1	17/16	6	15	7	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	37,5	-	40	100	
Pertemuan	Kantor	PFD	1	12	14	35	9	22,5	-	-	14	35	-	-	-	-	-	-	3	7,5	-	40	100	
sda	Jalan	PFD	1	15/14	12	30	9	22,5	-	-	15	37,5	-	-	-	-	-	-	4	10	-	40	100	
sda	sda	P	1	16/15	7	17,5	8	20	-	-	12	30	-	-	-	-	-	-	13	32,5	-	40	100	

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. *Domatin* = Pemerintahan Desa
3. Topik = Kedinasan
4. Situasi = Resmi

N = 25

Jenis Kegiatan	Lokasi	Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																								Total								
		Jenis	Jml.		BI		BJ		BM		BI+BJ		BI+BM		BJ+BM		BI+BJ+BM		X		TB																
					f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%													
Rapat	Kantor	PFD	n	10	21	84	1	4	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	25	100				
sda	sda	PFD + P	n	11	9	36	4	16	1	4	1	4	4	16	-	-	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	25	100			
Pelaksanaan	sda	P	2	13	7	28	7	28	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	28	3	12	25	100	
sda	sda	P	1	14/-	2	13,3	5	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	46,7	1	6,7	15	100	
Pertintah	Rumah	P	1	17/16	2	8	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	60	1	4	25	100	
Pertemuan	Kantor	PFD	1	12	7	28	10	40	2	8	2	8	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	25	100
sda	Jalan	PFD	1	15/14	7	28	8	32	2	8	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	28	-	-	-	25	100
sda	sda	P	1	16/15	3	12	9	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	48	1	4	25	100

Frekuensi Pemakaian Bahasa

di *Rurban Jember*

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD 3. Topik = Kedinasan
 2. Domain = Pemerintahan Desa 4. Situasi = Resmi

N = 8

Jenis Kegiatan	Partisipan	No. Butir	Pemilihan Bahasa															
			BI		BJ		BM		BI + BJ + BM		BJ BM		BI + BJ + BM		X		TB	
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Rapat	Kantor	n	10	37,5	1	12,5	3	37,5	-	1	12,5	-	-	-	-	-	-	8 100
sda	sda	n	11	12,5	-	-	4	50	-	-	1	12,5	1	12,5	-	1	12,5	8 100
Pelaksanaan	sda	P	2	-	2	25	3	37,5	-	-	-	-	-	-	3	37,5	-	8 100
sda	sda	P	1	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	4	80	-	5 100
Pertintah	Rumahan	P	1	-	1	12,5	3	37,5	-	-	-	-	-	-	4	50	-	8 100
Pertemuan	Kantor	PFD	1	12,5	2	25	4	50	-	-	1	12,5	-	-	-	-	-	8 100
sda	Jalan	PFD	1	12,5	2	25	3	37,5	-	-	-	-	-	-	2	25	-	8 100
sda	sda	P	1	-	1	12,5	3	37,5	-	-	-	-	-	-	4	50	-	8 100

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD 3. Topik = Kedinasan
2. Domain = Pemerintahan Desa 4. Situasi = Resmi

N = 7

Pemilihan Bahasa																										
Jenis Kegiatan	Partisipan		No. Butir	BI + BJ + BM												BI + BJ + BM		X		TB		Total				
	Jenis	Jml.		BI	f	%	BJ	f	%	BM	f	%	BI+BJ	f	%	BI+BM	f	%	BI+BJ+BM	f	%	f	%	N	%	
Rapat	Kantor	PFD	n	10	2	28,6	-	-	-	4	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14,3	7	100	
sda	sda	PFD + P	n	11	-	-	1	14,2	3	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42,9	7	100	
Pelaksanaan	sda	P	2	13	-	-	-	-	-	4	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28,6	1	14,3	7	100
sda	sda	P	1	14	-	-	-	-	-	3	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	4	100	
Pelatihan	Rumahan	P	1	17/16	-	-	-	-	-	6	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14,3	7	100	
Pertemuan	Kantor	PFD	1	12	-	-	-	-	-	5	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14,3	1	14,3	7	100
sda	Jalan	PFD	1	15/14	-	-	-	-	-	5	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14,3	1	14,3	7	100
sda	sda	P	1	16/15	-	-	-	-	-	6	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14,3	7	100	

TFPB II
Frekuensi Pemakaian Bahasa
di Daerah Jember

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
2. *Domain* = Pemerintahan Desa

3. Topik
4. Situasi

= Kedinasan
= Resmi

N = 40

Jenis Kegiatan		Partisipan	No. Butir	Pemilihan Bahasa																									
				Lo-kasi		Jenis		Jml.		BI		BJ		BM		BI+BJ		BI+BM		BJ+BM		BI+BJ+		X		TB		Total	
										f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			N	%
Ra-pat	Kan-tor	PFD	n	10	26	65	2	5	7	17,5	—	—	—	—	3	7,5	—	—	—	—	1	2,5	—	—	—	1	2,5	40	100
sda	sda	PFD + P	n	11	10	25	5	12,5	8	20	1	2,5	4	10	1	2,5	5	12,5	—	—	—	—	—	—	6	15	40	100	
Pela-yan-an	sda	P	2	13	7	17,5	9	22,5	6	15	—	—	—	—	1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	13	32,5	4	10	40	100
sda	sda	P	1	14/-	2	8,3	5	20,9	4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	45,5	2	8,3	24	100
Pe-rin-tah	Ru-mah	P	1	17/16	2	5	7	17,5	9	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,5	19	47,5	2	5	40	100	
Per-jum-paan	Kan-tor	PFD	1	12	8	20	12	30	11	27,5	2	5	1	2,5	—	—	—	—	—	—	1	2,5	4	10	1	2,5	40	100	
sda	Jalan	PFD	1	15/14	8	20	10	25	10	25	1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	25	1	2,5	40	100	
sda	P	P	1	16/15	3	7,5	10	25	9	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	40	2	5	40	100	

Frekuensi Pemakaian Bahasa
di *Urban* Madiun

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O2) = PFD
2. *Domain* 1 = Pemerintahan Desa 4. Situasi
3. Topik
= Kedinasan
= Resmi

N = 25

Jenis Kegiatan		Partisipan	No. Butir	Pemilihan Bahasa																					
				Jenis Jml.		BI		BJ		BM		BI+BJ		BI+BM		BJ+BM		BI+BJ+BM		X		TB		Total	
						f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	N	%
Rapat	Kantor	PFD	n	10	25	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100		
sda	sda	PFD + P	n	11	43	52	-	-	-	-	12	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100		
Pelayanan	sda	P	2	13	3	12	-	-	-	10	40	-	-	-	-	-	-	12	48	-	-	25	100		
sda	sda	P	1	14/-	2	13,3	1	6,7	-	5	33,3	-	-	-	-	-	-	7	46,7	-	-	15	100		
Pertemuan	Rumah	P	1	17/16	2	8	1	4	-	12	48	-	-	-	-	-	-	10	40	-	-	25	100		
Pertemuan	Kantor	PFD	1	12	20	80	-	-	-	4	16	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	25	100		
sda	Jalan	PFD	1	15/14	19	76	-	-	-	6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100		
sda	sda	P	1	16/ 5	2	8	1	4	-	12	48	-	-	-	-	-	-	10	40	-	-	25	100		

Frekuensi Pemakaian Bahasa

Di Rurban Madiun

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD
 2. Domain = Pemerintahan Desa
 3. Topik = Kedinasan
 4. Situasi = Resmi

N = 8

Jenis Kegiatan	Lokasi	Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																Total	
		Jenis	Jml.		BI		BJ		BM		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM		X			TB
					f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
Rapat	Kantor	PFD	n	10	6	75	1	12,5	-	-	1	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
sda	sda	PFD + P	n	11	1	12,5	3	37,5	-	-	4	50	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
Pelayanan	sda	P	2	13	-	-	3	37,5	-	-	1	12,5	-	-	-	-	-	4	50	-	8	100
sda	sda	P	1	14/-	-	-	3	60	-	-	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
Pertintah	Rumahan	P	1	17/16	-	-	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
Perjumpaan	Kantor	PFD	1	12	3	37,5	3	37,5	-	-	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
sda	Jalan	PFD	1	15/14	2	25	4	50	-	-	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
sda	sda	P	1	16/15	-	-	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100

N = 7

Jenis Kegiatan		Partisipan	No. Butir	Pemilihan Bahasa														X	TB	Total
				BI		BJ		BM		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM				
				f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
rapat	kan-tor	PFD	n 10	-	4	57,1	-	-	3	42,9	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
sda	sda	PFD + p	n 11	-	6	86	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
pela-yan-an	sda	P	2 13	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
sda	sda	P	1 14/-	-	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100	
perir-tah	ru-mah	P	1 17/16	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
per-jum-paan	kan-tor	PFD	1 12	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
sda	jalan	PFD	1 15/14	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
sda	sda	P	1 16/15	-	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	

Frekuensi Pemakaian Bahasa
di Daerah Madiun

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD 3. Topik = Kedinasan
2. Domain = Pemerintahan Desa 4. Situasi = Resmi

N = 40

Jenis Kegiatan		* Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																									
					Jenis		Jml.		BI		BJ		BM		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM		X		TB		Total			
									f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	N	%
rapat	kan-tor	PFD	n	10	31	77,5	5	12,5	-	-	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100					
sda	sda	PFD + P	n	11	14	35	9	22,5	-	-	17	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100					
pela-yan-an	sda	P	2	13	3	7,5	10	25	-	-	11	27,5	-	-	-	-	-	-	-	16	40	-	-	40	100					
sda	sda	P	1	14/-	2	8,3	8	33,3	-	-	7	29,2	-	-	-	-	-	-	-	7	29,2	-	-	24	100					
perintah	rumah	P		17/16	2	5	16	40	-	-	12	30	-	-	-	-	-	-	-	10	25	-	-	40	100					
per-jum-paan	kan-tor	PFD	1	12	23	57,5	10	25	-	-	6	15	-	-	-	-	-	-	-	1	2,5	-	-	40	100					
sda	jalan	PFD	1	15/14	21	52,5	11	27,5	-	-	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100					
sda	sda	P	1	16/15	2	5	16	40	-	-	12	30	-	-	-	-	-	-	-	10	25	-	-	40	100					

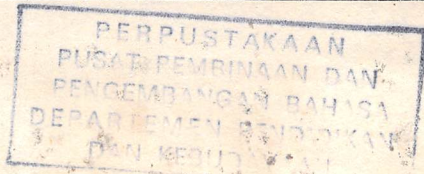
Frekuensi Pemakaian Bahasa
di Daerah Jawa Timur

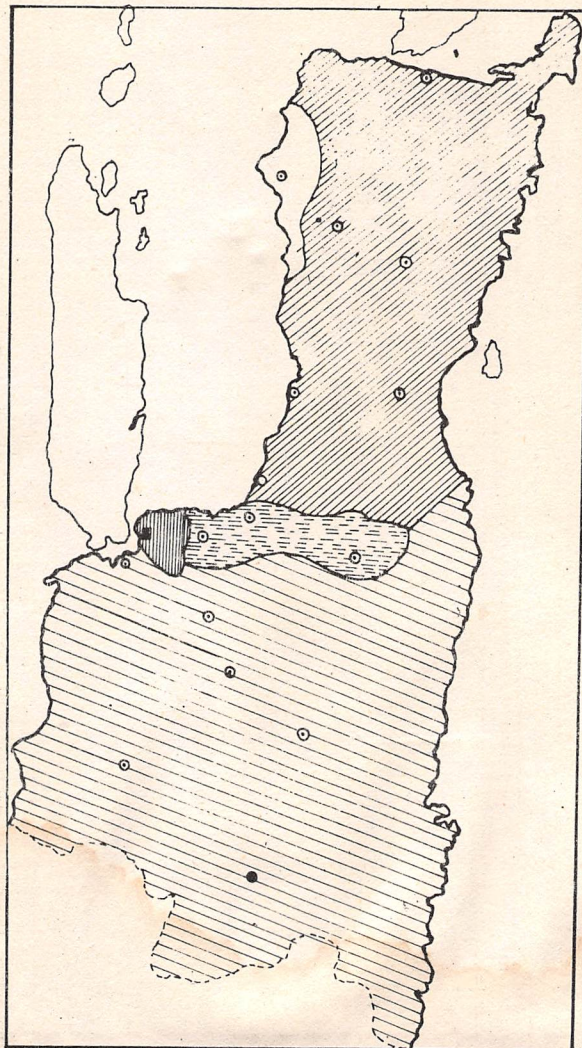
= Kedinasan
= Resmi

Variabel Tetap: 1. Pembicara (O1) = PFD 3. Topik
2. Domain = Pemerintahan Desa 4. Situasi

N = 120

Jenis Kegiatan		Partisipan		No. Butir	Pemilihan Bahasa																				
					BI		BJ		BM		BI + BJ		BI + BM		BJ + BM		BI + BJ + BM		X		TB		Total		
					f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	N
rapat	kan-tor	PFD	n	10	82	68,4	14	11,7	5,8	12	10	3	2,5	-	-	-	-	1	0,8	-	-	1	0,8	120	100
sda	sda	PFD + P	n	11	38	31,7	21	17,5	8	6,7	37	30,8	4	3,3	1	0,8	5	4,2	-	-	6	5	120	100	
pela-yan-an	sda	P	2	13	20	16,7	27	22,5	6	5	18	15	1	0,8	-	-	-	-	-	44	36,7	4	3,3	120	100
sda	sda	P	1	14/-	5	6,9	17	23,6	4	5,6	16	22,2	-	-	-	-	-	-	-	28	38,9	2	2,8	72	100
pe-rin-tah	ru-mah	P	1	17/16	10	8,3	30	25	9	7,5	24	20	-	-	-	-	-	1	0,8	44	36,7	2	1,7	120	100
per-jum-paan	kan-tor	PFD	1	12	45	37,5	31	25,8	11	9,3	22	18,3	1	0,8	-	-	1	0,8	-	8	6,7	1	0,8	120	100
sda	jalan	PFD	1	15/14	41	38,2	30	25	10	8,3	24	20	-	-	-	-	-	-	-	14	11,7	1	0,8	120	100
sda	sda	P	1	16/15	12	10	34	28,3	9	7,5	24	20	-	-	-	-	-	-	-	39	32,5	2	1,7	120	100





= Tipe : Multilingual

= Tipe : Bilingual : BM - BI

= Tipe : Bilingual : BJ - BI

= Tipe : Trilingual : BJ - EM - BI

= Tipe : Bitrilingual : BJ - BM - BI (BJ BM)



1. Madiun

2. Bojonegoro

3. Kediri

4. Jombang

5. Mojokerto

6. Gresik

7. Surabaya

8. Sidoarjo

9. Bangil

10. Malang

11. Pasuruan

12. Probolinggo

13. Lumajang

14. Jember

15. Bondowoso

16. Situbondo

17. Banyuwangi

P. 1000			
78-8	-	1	2

07-3740

URUTAN			
9	1	-	8385